

KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

WIDI HARTANTO
L4D004112



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

WIDI HARTANTO
L4D004112

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 16 Desember 2006

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 16 Desember 2006

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Wido Prananing Tyas, ST, MDP

Ir. Hadi Wahyono, MA

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Desember 2006

WIDI HARTANTO

NIM L4D004112

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan
Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan
Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
(Q.S. Alam Nasyah 6-8)

Kupersembahkan untuk;
Istri dan Anakku tersayang,
Ayah dan Ibu serta
Saudara-saudaraku.
Terima kasih atas doa dan restunya

ABSTRAK

Perkembangan Kota Gombong sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen membawa dampak terhadap peningkatan jumlah penduduk dan berbagai aktifitas di dalamnya, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah sampah yang dihasilkan. Sementara itu permasalahan yang muncul adalah banyaknya pembuangan sampah ke sungai, saluran irigasi, pekarangan, masih terbatasnya sampah yang terangkut ke TPA serta jangkauan pelayanan yang masih terbatas. Hal ini menunjukkan ada indikasi kinerja pengelolaan sampah yang belum optimal. Oleh karena itu, maka perlu dikaji kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sasaran dari penelitian ini adalah menganalisis produksi sampah, menganalisis sarana prasarana pengelolaan sampah, mengkaji lingkup wilayah pelayanan sampah, mengkaji kinerja pengelolaan sampah berdasarkan standar normatif maupun berdasarkan persepsi masyarakat, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, menganalisis secara komprehensif kinerja pengelolaan sampah, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ruang lingkup spasial penelitian ini meliputi 29 Desa/Kelurahan berdasarkan RUTRK Kota Gombong. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan teknik analisis menggunakan standar normatif dan distribusi frekuensi. Teknik sampling menggunakan metode *stratified random sampling* yang membagi populasi yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan sumber penghasil sampah dengan jumlah sampel 99 responden.

Hasil dari penelitian ini adalah produksi sampah di Kota Gombong mencapai 279 m³/hari. Dari 29 Desa/Kelurahan di Kota Gombong, yang seharusnya mendapat prioritas jangkauan pelayanan sampah mencapai 17 Desa/Kelurahan, dengan jumlah sampah yang seharusnya terangkut sebesar 109,43 m³/hari. Sampah yang terangkut saat ini, hanya mencapai 40 m³/hari, sehingga kinerja pengelolaan sampah mencapai 36,5 %. Luas daerah terlayani mencapai 36,20 % dan penduduk terlayani mencapai 30,17%. Dari kondisi tersebut, maka kinerja pengelolaan sampah masih sangat kurang. Hasil kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat, sebagian besar dinilai oleh masyarakat masih kurang baik sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kepuasan atau harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan efektif. Hasil kinerja dipengaruhi oleh aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah antara lain jumlah personil dan sarana prasarana masih sangat terbatas, operasional pengangkutan yang belum optimal, masih kurang jelasnya pembagian tugas terutama pada sistem pengumpulan dan pengangkutan, pendapatan dari retribusi rendah sehingga perlu subsidi untuk operasional, biaya operasional sangat terbatas, masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah dan masih kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturan tentang persampahan.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu pemerintah perlu menambah jangkauan pelayanan sampah, personil, peralatan serta memberikan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat.

Kata kunci : sampah, kinerja, pengelolaan

ABSTRACT

The amount of solid waste increasing as long as the development of Gombong town as the centre of economic growth in Kebumen district. The problem arising for that development such as recharging the solid waste into the river, irrigation system, back yard, and the limitation of final solid waste disposal to treat the solid waste within Gombong town. There fore it is need to carry out research of Gombong town solid waste management.

The purpose of this research is to know solid waste management done by town government and many kind of influence in it. Target for this research is to analysis solid waste production, to analyze infrastructure, to review solid waste service area system, to review solid waste management based on normative standard or based on public perceive, to review solid waste management performance, to analyze solid waste management performance comprehensively, and to develop recommendation for improving solid waste management based on factors which influence to the performance it self.

This research consists of 29 villages based on Gombong city planning and using qualitative and quantitative description methodology with normative standard and frequency analysis. This research is using stratified random sampling which divided heterogenic population in to several homogeny groups based on solid waste amount in 99 respondents.

Outcome of this research is solid waste amount is 279 m³/day. From 29 villages in Gombong town should be 17 villages covered to this service, with the amount of the solid waste 109,43 m³/day. The amount of solid waste which is in the service only 40 m³/day, there fore solid waste management performance only 36,5 %, service area only 36,2 % and public who receive this service only 30,17 %. From the explanation above, solid waste management performance is still far from the public expectation. Technical aspect, organization aspect, budget aspect, regulation aspect and public opinion aspect are influencing solid waste management performance, also the number of personal, limitation of infrastructure including transportation system, lack of responsibility, lack of budget, lack of public awareness and lack of law enforcement.

Recommendation of this research is government need to improve the area solid waste service within the town, need more personal, equipment and need more socialization of solid waste management to the public.

Key word: Solid waste, performance, management.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul *“Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen”*. Tesis ini disusun sebagai syarat meraih gelar Magister Teknik pada Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Sugiono Sutomo, DEA selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA selaku Pembimbing Utama dan Ibu Wido Prananing Tyas, MDP selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan hingga selesainya Tesis ini.
3. Bapak Okto R Manullang, ST, MT dan Ibu Ir. Artiningsih, M.Si selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan Tesis ini.
4. Kepala Pusbikte Departemen Pekerjaan Umum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
5. Kepala Balai, segenap Dosen Pengajar dan Pengelola Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal pengetahuan dan fasilitas sehingga tugas ini dapat selesai dengan baik.
6. Seluruh keluarga, sahabat dan rekan kerja serta Rekan-rekan seangkatan Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
7. Istri dan anakku yang dengan tulus telah memberikan dorongan dan perhatian yang besar serta telah kehilangan waktu bersama selama berlangsungnya pendidikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran dan kritik demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, Desember 2006
P e n u l i s

Widi Hartanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
 BAB. I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan	6
1.3.2. Sasaran.....	6
1.3.3. Manfaat.....	7
1.4. Ruang Lingkup Studi.....	7
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial.....	7
1.4.2. Ruang Lingkup Spasial.....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
1.6. Kerangka Pemikiran.....	11
1.7. Metodologi Penelitian.....	12
1.7.1. Pendekatan Studi.....	12
1.7.2. Metode Penelitian.....	14
1.8. Sistematika Penulisan Tesis.....	24
 BAB. II TINJAUAN PUSTAKA KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH	 26 26
2.1. Konsep Dasar Sampah.....	26
2.1.1. Pengertian Sampah.....	26
2.1.2. Klasifikasi Sampah.....	28
2.1.3. Jenis Dan Sumber Sampah	27
2.2. Sistem Pengelolaan Sampah	29
2.2.1. Aspek Teknik Operasional.....	29
2.2.2. Aspek Kelembagaan.....	45
2.2.3. Aspek Pembiayaan.....	46
2.2.4. Aspek Peraturan.....	48
2.2.5. Aspek Peran Serta Masyarakat.....	48
2.3. Kinerja.....	51

	2.3.1. Pengertian.....	51
	2.3.2. Kinerja Pengelolaan Sampah.....	52
2.4.	Persepsi.....	54
	2.4.1. Konsep Dasar Persepsi.....	54
	2.4.2. Persepsi Terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah	56
2.5.	Rangkuman Kajian Literatur.....	58
BAB III	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH	63
3.1.	Gambaran Umum Kota Gombong.....	63
3.2.	Keadaan Geografis dan Kependudukan	65
3.3.	Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kota Gombong.....	67
	3.3.1. Aspek Kelembagaan.....	67
	3.3.2. Aspek Hukum.....	68
	3.3.3. Aspek Pembiayaan.....	68
	3.3.4. Aspek Teknik Operasional.....	69
	3.3.5. Luas Wilayah, Kependudukan dan Fasilitas Umum di Daerah Pelayanan.....	74
3.4.	Karakteristik Responden Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong.....	76
	3.4.1. Karakteristik Usia Responden.....	76
	3.4.2. Karakteristik Tingkat Pendidikan.....	77
	3.4.3. Karakteristik Pekerjaan.....	77
	3.4.4. Karakteristik Tingkat Penghasilan dan Pengeluaran	78
	3.4.5. Karakteristik Jumlah Anggota Keluarga.....	79
BAB IV	ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN.....	81
4.1.	Analisis Produksi Sampah dan Lingkup Pelayanan Sampah di Kota Gombong.....	81
	4.1.1. Analisis Produksi Sampah.....	81
	4.1.2. Analisis Lingkup Pelayanan Sampah.....	84
	4.1.3. Rangkuman Analisis Produksi Sampah dan Jangkauan Pelayanan Sampah.....	85
4.2.	Analisis Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.....	87
	4.2.1. Pewadahan.....	87
	4.2.2. Pengumpulan dan Pemindahan.....	92
	4.2.3. Pengangkutan	95
4.3.	Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah Berdasarkan Standar Normatif	98
4.4.	Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah Berdasarkan Persepsi Masyarakat	104
	4.4.1. Kondisi Kebersihan	105

4.4.2.	Kondisi Sarana Prasarana	109
4.4.3.	Personil.....	117
4.4.4.	Keluhan Pelanggan.....	119
4.4.5.	Rangkuman Kinerja Pengelolaan Sampah Berdasarkan Persepsi Masyarakat	121
4.5	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Sampah	122
4.5.1.	Aspek Teknis	123
4.5.2.	Aspek Kelembagaan.....	130
4.5.3.	Aspek Pembiayaan	131
4.5.4.	Aspek Peran Serta Masyarakat.....	132
4.5.5.	Aspek Hukum.....	134
4.5.6.	Rangkuman Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	135
4.5	Analisis Komprehensif Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong	136
BAB V	PENUTUP.....	144
5.1	Kesimpulan.....	144
5.2	Rekomendasi.....	146
5.3	Usulan Tema Penelitian Lanjutan.....	148
	DAFTAR PUSTAKA.....	149
	LAMPIRAN.....	153
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	176

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Kebutuhan Data	15
Tabel I.2 : Jumlah populasi dan jumlah sampel	20
Tabel II.1 : Jenis Pewadahan	34
Tabel II.2 : Tipe Peralatan dan Tipe Pengumpulan Sampah.....	39
Tabel II.3 : Jenis dan Karakteristik Alat Pengangkut.....	41
Tabel II.4 : Bentuk Kelembagaan Pengelola Sampah	46
Tabel II. 5 : Rangkuman Kajian Literatur	59
Tabel II. 6 : Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah.....	62
Tabel II.7 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Sampah.....	62
Tabel III.1 : Penyebaran Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk.....	66
Tabel III.2 : Jumlah Pegawai dan Tenaga Kebersihan.....	67
Tabel III.3 : Tarif Retribusi Kebersihan	69
Tabel III.4 : Komposisi Sampah Kota Gombang	70
Tabel III.5 : Jumlah Timbulan Sampah.....	70
Tabel III.6 : Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.....	72
Tabel III.7 : Kepadatan Penduduk di Daerah Pelayanan.....	75
Tabel III.8 : Fasilitas Permukiman di Daerah Pelayanan.....	75
Tabel III.9 : Fasilitas Non Permukiman di Daerah Pelayanan	76
Tabel III.10 : Distribusi Frekuensi Usia.....	76
Tabel III.11 : Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan.....	77
Tabel III.12 : Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan.....	78
Tabel III.13 : Distribusi Frekuensi Penghasilan	78
Tabel III.14 : Distribusi Frekuensi Tingkat Pengeluaran.....	79
Tabel III.15 : Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Keluarga.....	79
Tabel IV.1 : Produksi Sampah Kota Gombang.....	82
Tabel IV.2 : Rangkuman Analisis Sarana Pewadahan.....	92

Tabel IV.3	: Rangkuman Analisis Sarana Prasarana Pengumpulan/ Pemindahan Sampah.....	95
Tabel IV.4	: Rangkuman Analisis Kendaraan Pengangkutan Sampah....	97
Tabel IV.5	: Jumlah Sampah Terangkut ke TPA.....	99
Tabel IV.6	: Tingkat Pelayanan Sampah.....	100
Tabel IV.7	: Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong.....	104
Tabel IV.8	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Kebersihan di Jalan Utama.....	106
Tabel IV.9	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Kebersihan Drainase.....	107
Tabel IV.10	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Kebersihan Lingkungan Pasar dan Kawasan Pertokoan.....	108
Tabel IV.11	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Kebersihan TPS atau Kontainer.....	109
Tabel IV.12	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi TPS dan Kontainer	110
Tabel IV.13	: Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah TPS atau Kontainer.	111
Tabel IV.14	: Persepsi Masyarakat Terhadap Penempatan TPS atau Kontainer.....	112
Tabel IV.15	: Persepsi Masyarakat Terhadap Waktu atau Frekuensi Pengumpulan Sampah.....	113
Tabel IV.16	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Alat Pengumpul Sampah.....	114
Tabel IV.17	: Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah Alat Pengumpulan Sampah.....	115
Tabel IV.18	: Persepsi Masyarakat Terhadap Frekuensi Pengangkutan Sampah.....	116
Tabel IV.19	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Alat Pengangkutan Sampah.....	117
Tabel IV.20	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kemampuan Petugas Kebersihan.....	118
Tabel IV.21	: Persepsi Masyarakat Terhadap Jumlah Petugas Kebersihan.	119
Tabel IV.22	: Persepsi Masyarakat Terhadap Tanggapan Keluhan Pelayanan Sampah	120
Tabel IV.23	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong.....	121
Tabel IV.24	: Analisis Jumlah Personil dan Peralatan Pengelolaan Sampah.....	125

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Wilayah Studi	9
Gambar 1.2 : Kerangka pemikiran kinerja penelitian kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong	13
Gambar 2.1 : Skema sistem pengelolaan sampah perkotaan.....	30
Gambar 2.2 : Teknik operasional pengelolaan sampah.....	31
Gambar 2.3 : Pola pengangkutan sistem transfer depo.....	41
Gambar 3.1 : Peta Administrasi Kota Gombong.....	64
Gambar 3.2 : Sistem Pewadahan Sampah.....	71
Gambar 3.3 : Sarana Prasarana Persampahan.....	73
Gambar 3.4 : Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Semali.....	74
Gambar 4.1 : Produksi Sampah di Kota Gombong.....	83
Gambar 4.2 : Peta Desa/Kelurahan yang Perlu Pelayanan Sampah.....	86
Gambar 4.3 : Peta Prosentase Pelayanan Sampah.....	102
Gambar 4.4 : Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong.....	122
Gambar 4.5 : Kondisi TPS dari Pasangan Batu Bata.....	126
Gambar 4.6 : Kondisi Kebersihan Landasan dan Kontainer.....	130
Gambar 4.7 : Pembuangan Sampah di Lahan Kosong dan tanggul Sungai	133
Gambar 4.8 : Diagram Pohon Masalah Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong.....	140
Gambar 4.9 : Diagram Alir Analisis Komprehensif Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong.....	143

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A : Kuesioner Kinerja Pengelolaan Sampah Berdasarkan Persepsi Masyarakat.....	153
LAMPIRAN B : Pertanyaan Untuk Bidang Kebersihan	158
LAMPIRAN C : Hasil Analisis Statistik SPSS.....	159

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, tempat tinggal penduduk, pusat pendidikan dan sebagainya, diharapkan dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan serta merangsang perkembangan wilayah pedesaan di sekitarnya (Nurmandi, 1999:143). Menurut Sinulingga (1999:5), suatu desa pada akhirnya karena pembangunannya secara bertahap dapat berubah menjadi kota. Peran kota sebagai pusat pertumbuhan serta perkembangan wilayah *hinterland*-nya dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk di kota-kota besar (Nurmandi, 1999:144).

Akibat dari perluasan wilayah kota yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk kota akan meningkatkan pula aktifitas masyarakat yang ada didalamnya sehingga membutuhkan pelayanan publik dan prasarana dasar seperti air bersih, air limbah, drainase, persampahan dan sebagainya. Menurut Nurmandi (1999:143), pertumbuhan kota yang tidak selaras dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat kota juga akan berdampak pada menurunnya optimasi pelayanan prasarana kota. Hal tersebut dikarenakan peningkatan aktifitas masyarakat di perkotaan akan berpengaruh pada kuantitas maupun kualitas limbah yang dihasilkan sehingga pada akhirnya apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup, di Indonesia sekitar 15-20 % dari limbah sampah dibuang secara baik dan tepat sisanya dibuang ke sungai sehingga menimbulkan masalah banjir. Diperkirakan 85 % dari kota-kota kecil dan lebih

dari 50 % kota berukuran menengah secara resmi membuang limbahnya ke tempat-tempat terbuka.

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan yang kurang baik. Sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit. Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi (Nuryani, 2003:56).

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan (Moersid, 2004:2). Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.

Pelayanan pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau *performance* yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan

efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah perkotaan menjadi tidak efektif akibat keterbatasan Pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun jumlah peralatan yang tersedia.

Dalam aspek pembiayaan, permasalahan yang umum terjadi terutama adalah masih rendahnya retribusi kebersihan yang tidak sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan. Dalam aspek kelembagaan, yang umum terjadi adalah jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan maupun pengetahuan personil terhadap sistem pengelolaan sampah masih rendah. Dalam hal penyediaan sarana persampahan adalah masih terbatasnya peralatan seperti kontainer, dan truk pengangkutan. Pola pengangkutan sampah yang tidak efektif juga akan mempengaruhi jangkauan layanan maupun biaya operasional pengangkutan. Karena keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut maka perlu didukung adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah baik peranserta aktif maupun pasif.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah perkotaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga terjadi di kota-kota kecil yang mempunyai kepadatan cukup tinggi dan adanya aktifitas perekonomian yang tinggi pula. Kota Gombong yang merupakan kategori kecil yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen saat ini juga mengalami dalam permasalahan pengelolaan sampah. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pembuangan sampah ke tanggul-tanggul sungai maupun saluran irigasi terutama dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir sungai atau saluran. Disamping itu pada daerah permukiman, banyak terjadi pembuangan sampah dan pembakaran sampah di

pekarangan kosong. Dari sisi jangkauan pelayanan pengelolaan sampah, sampai saat ini masih terbatas pada jalan-jalan utama, kawasan pertokoan dan pasar sedangkan pada daerah permukiman penduduk masih belum semuanya terjangkau. Permasalahan lain adalah berdasarkan wawancara dengan petugas kebersihan, jumlah timbulan sampah yang dapat terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir Desa Semali hanya 36 - 40 m³/hari

Kondisi saat ini, Kota Gombong mengalami perkembangan yang demikian pesat sebagai pusat pertumbuhan yang sejajar dengan Kota Kebumen serta meningkatnya sifat-sifat kekotaannya. Hal ini tentu diiringi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, aktifitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang dapat berdampak pada semakin meningkatkan jumlah timbulan sampah. Melihat perkembangan kota tersebut, maka Kota Gombong juga memerlukan prioritas pelayanan sampah yang sama dengan Kota Kebumen sebagai Ibukota Kabupaten, sehingga ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memberikan pelayanan pengelolaan sampah yang maksimal di Kota Gombong.

Berdasarkan pada permasalahan seperti tersebut di atas, ada indikasi pengelolaan sampah di Kota Gombong saat ini belum optimal. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelolaan sampah maka perlu dilakukan penelitian terhadap "Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen" dengan menetapkan berbagai kriteria untuk mengukur kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kimprasda Kabupaten Kebumen dan UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong. Dari hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat diketahui gambaran tentang kondisi

pengelolaan sampah di Kota Gombong serta pemecahan permasalahannya sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah dalam menentukan pelayanan pengelolaan sampah agar lebih efisien dan efektif.

1.2. Rumusan masalah

Seiring dengan perkembangan Kota Gombong menjadi salah satu pusat pertumbuhan di Kabupaten Kebumen, telah meningkatkan jumlah penduduk, aktifitas perekonomian dan sifat-sifat kekotaannya, maka berdampak pula pada meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan persampahan yang memadai. Pelaksanaan pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi komponen-komponen yang mendukung yaitu aspek teknis, kelembagaan, hukum atau peraturan, pembiayaan maupun peran serta masyarakat (Kodoatie, 2003:217)

Adapun beberapa permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Gombong adalah sebagai berikut:

1. Masih dijumpainya pola pembuangan sampah ke sungai, saluran irigasi maupun pembuangan dan pembakaran sampah di pekarangan atau lahan kosong.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, pembiayaan dan sarana prasarana pengelolaan sampah yang tidak sebanding dengan timbulan sampah yang dihasilkan dari aktifitas masyarakat di Kota Gombong.
3. Jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Kota Gombong yang ada di Desa Semali masih rendah dibandingkan total produksi sampah yang dihasilkan.

4. Jangkauan pelayanan pengelolaan sampah masih terbatas pada jalan-jalan utama, kawasan pertokoan dan pasar sedangkan pada daerah permukiman penduduk masih belum optimal.

Dari beberapa permasalahan di atas maka pertanyaan penelitian (*research question*) adalah "*Bagaimanakah kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong yang dilakukan oleh Pemerintah*".

1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis produksi sampah di kota Gombong.
2. Menganalisis kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
3. Mengkaji lingkup/jangkauan pelayanan sampah di Kota Gombong.
4. Mengkaji tingkat kinerja pengelolaan sampah di kota Gombong berdasarkan standar normatif.
5. Mengkaji kinerja pengelolaan sampah di kota Gombong berdasarkan persepsi masyarakat.

6. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong.
7. Menganalisis secara komprehensif kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong.
8. Menyusun rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah berdasarkan faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi.

1.3.3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengatasi permasalahan persampahan di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan masukan bagi peningkatan pelayanan sampah dan pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen.
3. Sebagai referensi atau sumbangan literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan sampah.

1.4. Ruang lingkup

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial

Ruang lingkup substansial penelitian ini adalah kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kimprasda Kabupaten Kebumen (Bidang Kebersihan dan Pertamanan maupun UPT Dinas

Kimprasda Wilayah Gombong). Penilaian kinerja tersebut berdasarkan pada standar-standar normatif dari kajian teori maupun penilaian kinerja berdasarkan persepsi masyarakat. Selain itu maka akan dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab kondisi kinerja pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah pada penelitian ini dibatasi mulai dari pewadahan sampai dengan pengangkutan sampah. Dalam penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah maka perlu pula dilakukan tinjauan terhadap produksi sampah, kondisi sarana dan prasarana persampahan dan jangkauan pelayanan sampah .

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup wilayah studi meliputi 2 lingkup spasial yaitu untuk wilayah yang sudah mendapatkan pelayanan sampah dan yang belum mendapatkan pelayanan. Untuk daerah yang sudah mendapatkan pelayanan sampah yaitu kawasan perkotaan Gombong yang meliputi 6 Desa/kelurahan yaitu: Kelurahan Gombong, Kelurahan Wonokriyo, Desa Wero, Desa Semanding, Desa Semanda Kecamatan Gombong dan Desa Selokerto Kecamatan Sempor. Wilayah yang sudah mendapatkan pelayanan tersebut dipergunakan untuk penentuan sampel responden dalam menilai kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat. Sedangkan untuk mengkaji pelayanan sampah maka lingkup spasial berdasarkan wilayah pengembangan Kota Gombong berdasarkan RUTRK Kota Gombong yang terdiri dari 29 Desa/Kelurahan, Adapun untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1.1. Peta wilayah studi.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian atau studi tentang sampah telah banyak dilakukan dengan fokus kajian sistem pengelolaan sampah, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan lain-lain. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irman, 2004, dengan judul “Evaluasi Peran Serta Masyarakat Dalam Aspek Teknik Operasional Pengelolaan Sampah di Kota Padang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran serta masyarakat dalam teknis operasional pengelolaan sampah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatonah, 2005, melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Pengelolaan Sampah Domestik di Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang”. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan sampah domestik yang dilakukan oleh masyarakat, pihak Kelurahan maupun Dinas Kebersihan.
3. Haryono, 2002, dengan judul penelitian “Kinerja Pelayanan Persampahan di Kota Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan sampah dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.
4. Nur Khoiri, 2005, dengan judul penelitian “Studi Upaya Pemenuhan Fasilitas Persampahan pada Perumahan di Kecamatan Pedurungan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan fasilitas persampahan di daerah perumahan di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, belum ada penelitian yang mengkhususkan untuk mengkaji kinerja pengelolaan sampah untuk kota kecil

terutama di Kota Gombong Kabupaten Kebumen dengan penilaian kinerja berdasarkan standar-standar normatif dan persepsi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu maka ide dari penelitian ini dapat dijamin keasliannya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Pemikiran penelitian tentang “Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen” didasarkan pada perkembangan Kota Gombong yang semakin pesat dengan berbagai aktifitasnya penduduknya, serta perannya sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Kebumen yang berakibat pula pada meningkatnya timbulan sampah. Dari hasil pengamatan di lapangan terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah yang diindikasikan dengan adanya pembuangan sampah ke sungai, saluran maupun pekarangan yang dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Hal ini menyebabkan rendahnya jumlah sampah yang dapat terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Semali.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka ada indikasi kinerja pengelolaan sampah di kota Gombong kurang optimal. Hal ini yang mendasari untuk perlunya mengkaji kinerja pengelolaan sampah yang ada di Kota Gombong serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah maka perlu dilakukan tinjauan terhadap kondisi pengelolaan sampah berdasarkan standar normatif serta penilaian kinerja berdasarkan persepsi masyarakat. Disamping itu maka akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab kondisi kinerja pengelolaan sampah.

Dari Research Question “Bagaimana kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong yang dilakukan Pemerintah”, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian deskripsi dengan menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Penilaian kinerja berdasarkan persepsi masyarakat dilakukan menggunakan “Skala Likert” dengan penskalaan berdasarkan hasil kuesioner, sedangkan untuk mengetahui tingkat kinerja berdasarkan standar normatif digunakan analisis kuantitatif. Dari hasil analisis kinerja pengelolaan sampah berdasarkan standar normatif maupun persepsi masyarakat, maka perlu dilakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah yang meliputi aspek-aspek sistem pengelolaan sampah.

Hasil dari analisis di atas, kemudian dilakukan analisis secara komprehensif untuk selanjutnya disusun kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam peningkatan kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong.

Alur pemikiran penelitian seperti diuraikan dalam penjelasan di atas, dapat dilihat pada gambar 1.2. Kerangka pemikiran kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen.

1.6. Metodologi Penelitian

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Menurut Gulo (2002:19), penelitian yang didasarkan pada pertanyaan dasar *Bagaimana* merupakan tipe penelitian deskriptif. Sesuai dengan perumasan masalah yang diawali *Research Question* “Bagaimanakah kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong yang dilakukan oleh Pemerintah”, maka penelitian

ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data untuk dianalisis dan diinterpretasikan (Narbuko, 2004:44).

Menurut Moleong (1993), dalam melakukan penelitian ada dua jenis metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan metode kualitatif digunakan untuk memberikan predikat kepada variabel-variabel persepsi yang dihasilkan dari data deskriptif guna menarik suatu kesimpulan. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan menganalisis pengukuran secara kuantitas terhadap variabel yang dikaji atau dianalisis.

1.7.2. Metode Penelitian

1.7.2.1. Kebutuhan Data

Dalam mendukung pelaksanaan penelitian maka diperlukan berbagai jenis data yang baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Data primer yaitu diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dengan kuesioner yang telah dipersiapkan baik dengan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kimprasda Kabupaten Kebumen atau UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong maupun dengan masyarakat. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan sampah melalui observasi , wawancara, maupun melalui angket dan kuisioner. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Dinas Kimprasada Kabupaten Kebumen, Badan Pusat Statistik, Kantor Kecamatan, maupun Kantor Kelurahan/Desa. Menurut jenisnya ada 2 jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah mengkaji kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

TABEL I. 1
KEBUTUHAN DATA

NO	KEBUTUHAN DATA	JENIS DATA				SUMBER DATA
		Primer			Sek	
		K	W	O	S	
1	2	3				4
1.	Gambaran Umum Wilayah Studi					
	a. Luas wilayah, lahan terbangun.				v	Bappeda/BPS
	b. Jumlah penduduk ,				v	Bappeda/BPS
	c. Peta Administrasi				v	Bappeda/BPS
	d. Kepadatan penduduk					
2.	Karakteristik masyarakat					
	a. Tingkat pendidikan	v				
	b. Usia	v				
	c. Status tinggal	v				
	d. Jumlah pendapatan	v				
	e. Pengeluaran masyarakat	v				
	f. Penghuni tiap rumah	V				
	g. Luas tanah	V				
3.	Sistem Pengelolaan Sampah					
	<i>Teknis Operasional</i>					Dinas Kimprasda
	a. Timbulan sampah per orang per hari		v	v		
	b. Jangkauan pelayanan					
	c. Sistem pewadahan					
	d. Alat pengumpulan		v	v	v	
	e. Sistem Pemindahan (TPS)		v	v	v	
	f. Alat pengangkutan		v	v	v	
	g. Waktu pengangkutan .		v	v		
	h. Pembuangan Sampah		v	v		

1	2	3				4
	<i>Sistem kelembagaan</i>					Dinas Kimprasda
	a. Struktur Organisasi				v	
	b. Jumlah Personil				v	
	<i>Pembiayaan</i>					Dinas Kimprasda
	a. Biaya O & M				v	
	b. Jumlah retribusi				v	
	<i>Hukum dan Peraturan</i>					Dinas Kimprasda
	a. Perda tentang kebersihan				v	
	<i>Peranserta masyarakat</i>					
	Membayar retribusi	v				
	Pola pembuangan sampah	V				
4.	Persepsi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan sampah	v				

Keterangan:

K : Kuesioner

W : wawancara

O : Observasi lapangan

S : Sekunder

Sumber: Hasil Analisis

1.7.2.2. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Dalam penelitian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen, teknik pengumpulan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berkaitan dengan kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong. Dalam hal ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- Observasi**, yakni pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terkait dengan penelitian kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong serta kondisi masyarakat yang meliputi kondisi sosial,

ekonomi, dan spasial untuk membuktikan/*cross chek* situasi nyata dengan data sekunder yang diperoleh.

- b. **Wawancara**, merupakan cara memperoleh data atau informasi secara langsung dengan tatap muka melalui komunikasi verbal. Teknik ini dipakai secara simultan dan sebagai cara utama memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperdalam penghayatan peneliti terhadap proses persepsi responden.
- c. **Kuesioner** yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup dengan pengertian bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan, dan kuesioner terbuka dalam arti jawaban belum tersedia.

2. **Teknik pengumpulan data sekunder.** Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mencari data dari instansi terkait dengan kegiatan Dinas Kimprasda Kabupaten Kebumen dan UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong dan Kantor Badan Pusat Statistik.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya perlu diikuti dengan kegiatan pengolahan data (*data processing*). Pengolahan data mencakup kegiatan mengedit (*editing*) data dan mengkode (*coding*). Mengedit adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan kesempurnaan data. Mengkodekan data berarti memberikan kode-kode kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variabel yang

dikumpulkan datanya (Faisal, 2005:33). Data primer yang diperoleh dari responden melalui Kuesioner yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan analisa **distribusi frekuensi** yaitu membagi ke dalam beberapa kelas.

1.7.2.3. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data bertujuan untuk memudahkan pembacaan data dengan memvisualisasikan data sehingga data menjadi dapat dipahami secara mudah. Untuk menunjang kegiatan penelitian, data akan ditampilkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Deskriptif, berupa penjelasan secara uraian kalimat yang bisa menjelaskan topik yang dibahas.
2. Tabulasi, data-data yang terkumpul ditampilkan dalam bentuk tabel.
3. Gambar, data-data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk foto, diagram, grafik serta peta.

1.7.2.4. Teknik Sampling

Sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi. Sebagai bagian dari suatu populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi (Gulo, 2002). Dalam penelitian ini sampel dibutuhkan untuk penyebaran kuesioner kepada responden yang dianggap mewakili populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan di duga (Singarimbuan,1995:152). Populasi merupakan keseluruhan penduduk atau individu yang dimaksudkan untuk diselidiki. Pendapat lain mengatakan bahwa

populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat inferensi. Dalam hal ini populasi berkenaan dengan data bukan pada orangnya atau bendanya (Nasir,1999:327).

Pengambilan populasi sampel terhadap penelitian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen dapat dikelompokkan berdasarkan sumber penghasil sampah yaitu kawasan permukiman dan kawasan non permukiman yang meliputi 6 Desa/Kelurahan. Secara umum, jumlah ukuran sampel yang dibutuhkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin* (Sevilla dalam Umar Husein 2003 : 109) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = derajat kecermatan (*level of significant*) ditentukan 10 %

Agar pemilihan responden dapat mewakili seluruh sampel yang ditetapkan, maka teknik yang digunakan untuk memilih responden adalah teknik *Stratified Random Sampling* (pengambilan sampel acak terstratifikasi).

Teknik *Stratified Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen yang disebut strata. Strata dalam penelitian ini didasarkan pengelompokan sasaran permukiman dan non permukiman dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut. Agar pengelompokan ini lebih representatif, maka penentuan jumlah sampel dari setiap strata ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah masing-masing strata.

Jumlah populasi yang didasarkan kepada kelompok sumber penghasil sampah di Kota Gombong adalah (N) = 6.583 unit (permukiman dan non permukiman). Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah responden dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{6.583}{6.583 \cdot (0,1)^2 + 1} = 98,503 = 99 \text{ sampel}$$

Dengan berdasarkan rumus tersebut dari sejumlah 6.583 populasi yang ada, didapatkan 99 responden. Jumlah responden untuk rumah permanen $4.665/6.583 \times 99 = 70,15$ dibulatkan menjadi 70 sampel. Demikian selanjutnya untuk strata-strata penghasil timbulan sampah yang lain bisa dilihat pada tabel I.2. Jumlah populasi dan jumlah sampel.

TABEL. I. 2
JUMLAH POPULASI DAN JUMLAH SAMPEL

NO	Kelompok Penghasil Sampah	Jumlah Populasi	Jumlah sampel
I	Permukiman		
	Rumah permanen	4,665	70
	Rumah semi permanen	649	10
	Rumah non permanen	676	10
II	Non Permukiman		
	Pendidikan dan kesehatan	57	1
	Perekonomian	536	8
	JUMLAH	6,583	99

Sumber: Hasil Analisis

1.7.2.5. Teknis Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis produksi sampah dan jangkauan pelayanan sampah.

Teknik analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi produksi atau timbulan sampah adalah menggunakan Standar Nasional Indonesia dimana laju timbulan untuk kota kecil sebesar 2,5 – 2,75 liter/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari. Berdasarkan laju timbulan sampah per orang per hari maka dapat diketahui jumlah timbulan sampah di Kota Gombong. Besarnya timbulan sampah sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan ruang yang ada di Kota Gombong. Selain itu dapat pula diketahui berdasarkan jumlah populasi penduduk mengacu pada jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan rencana pengembangan kota sesuai dengan RUTRK Kota Gombong.

Untuk mengkaji jangkauan pelayanan sampah di Kota Gombong, dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penentuan jangkauan pelayanan berdasarkan daerah kepadatan minimal 50 jiwa/ha.

2. Mengkaji sarana prasarana pengelolaan sampah.

Untuk mengkaji kondisi sarana prasarana pengelolaan sampah yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan membandingkan dengan Standar normatif maupun teori.

3. Mengkaji tingkat kinerja pengelolaan sampah.

Dalam menganalisis tingkat kinerja pengelolaan sampah secara kuantitatif dapat dilihat dengan menganalisis timbulan sampah yang terangkut, jumlah penduduk terlayani dan luas daerah terlayani.

Analisis tingkat keterangkutan sampah merupakan perbandingan antara total timbulan sampah yang terangkut dengan total timbulan sampah kota yang berasal daerah permukiman atau non permukiman. Untuk menghitung timbulan sampah sampah ditentukan dengan melihat kepadatan penduduk di tiap Desa atau Kelurahan. Permukiman dengan kepadatan > 150 jiwa/ha memerlukan tingkat layanan 100 %, daerah dengan kepadatan 100 – 150 memerlukan tingkat layanan 75 % dan kepadatan 50–100 % memerlukan tingkat pelayanan 50 %, daerah komersial memerlukan tingkat pelayanan 80 %, jalan protokol dan taman memiliki tingkat layanan 100 % dan pasar harus memiliki pelayanan 100 %.

Analisis jumlah penduduk terlayani berpedoman pada jumlah penduduk pada wilayah terbangun. Analisis luas daerah terlayani didasarkan luas daerah terbangun.

Dari beberapa analisis tersebut dapat diketahui prosentase tingkat efektifitas pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dan analisis kualitatif untuk memberikan gambaran terhadap suatu kondisi secara obyektif dengan membandingkan dengan standar normatif maupun kondisi ideal.

4. Mengkaji kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong berdasarkan persepsi masyarakat.

Dalam mengkaji kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Melalui teknik ini diharapkan dapat mengetahui kinerja pengelolaan sampah yang

dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan persepsi masyarakat. Penilaian kinerja dilakukan menggunakan “Skala Likert” dengan penskalaan dan skoring. Dalam upaya menyusun data yang cukup banyak dari pengisian kuisioner menjadi kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berisi frekuensi data tersebut maka digunakan **distribusi frekuensi**.

Skala yang digunakan dalam penelitian menggunakan interval 1 sampai 4 atau tidak baik (1), kurang baik (2), cukup baik (3) dan baik (4). Menurut Simamora (2004:130-131) untuk menghadapi bilangan pecahan digunakan skala numerik linier dengan cara mencari rentang skala (RS) dengan rumus sebagai berikut:

$$RS = \frac{m - n}{b}$$

Dimana,

m = angka tertinggi dalam pengukuran.

n = angka terendah dalam pengukuran

b = banyaknya kelas yang dibentuk.

sehingga dengan rumus tersebut, maka

$$RS = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Dengan rentang 0,75, maka skala numeriknya adalah sebagai berikut:

Tidak baik/buruk	: 1 s/d 1 + 0,75	= 1 < x ≤ 1,75
Kurang baik	: di atas 1,75 s/d 1,75 + 0,75	= 1,75 < x ≤ 2,5
Cukup baik	: di atas 2,5 s/d 2,5 + 0,75	= 2,5 < x ≤ 3,25
Baik	: di atas 3,25 s/d 4	= 3,25 < x ≤ 4

5. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, maka perlu dilakukan analisis terhadap sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis, pembiayaan, kelembagaan, peran serta masyarakat dan hukum. Metode yang digunakan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan berdasarkan hasil wawancara, observasi maupun kuesioner baik kepada masyarakat maupun pemerintah serta perbandingan dengan standar normatif.

6. Menganalisis secara komprehensif kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong.

Analisis komprehensif kinerja pengelolaan sampah merupakan penjelasan secara keseluruhan rangkaian hasil analisis di kaitkan dengan teori. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

1.8. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan Tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB. I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian; rumusan masalah, tujuan, sasaran dan manfaat penelitian; ruang lingkup penelitian; kerangka pemikiran, posisi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan Tesis.

BAB. II : TINJAUAN PUSTAKA KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

Pada bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan pertanyaan

penelitian ”*Bagaimanakah kinerja pengelolaan sampah di kota Gombong yang dilakukan oleh Pemerintah*”, yaitu konsep dasar sampah, sistem pengelolaan sampah, kinerja pengelolaan sampah, persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan rangkuman kajian literatur.

BAB. III : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GOMBONG

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kota Gombong, keadaan geografis dan kependudukan, gambaran umum pengelolaan sampah di Kota Gombong dan karakteristik responden kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong.

BAB. IV : ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GOMBONG

Pada bab ini berisi tentang analisis produksi sampah dan jangkauan pelayanan, analisis kondisi sarana prasarana persampahan, analisis kinerja pengelolaan sampah berdasarkan standar normatif , analisis kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja serta analisis komprehensif kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong.

BAB. V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi serta usulan tema penelitian lebih lanjut.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

Pada bab ini berisi kajian pustaka yang dilakukan mengenai konsep dasar sampah, sistem pengelolaan sampah, kinerja pengelolaan sampah dan persepsi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ditutup dengan rangkuman kajian teori. Berdasarkan pada ruang lingkup yaitu mengkaji kinerja pengelolaan sampah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka kajian literatur ini lebih menekankan pada literatur-literatur dalam pembatasan studi.

2.1. Konsep Dasar Sampah

2.1.1. Pengertian Sampah

Menurut Azwar (1990:53), Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Kodoatie (2003:312) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup. Menurut SK SNI T-13-1990 F, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik

yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi bangunan. Sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota dan tidak termasuk sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hadiwiyoto (1983:12), mendefinisikan sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kelestarian.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang sampah seperti di atas maka dapat didefinisikan sampah adalah sisa bahan, limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

2.1.2. Klasifikasi Sampah

Menurut Hadiwiyoto (1983:25), klasifikasi sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 macam yaitu :

1. Sampah organik, yaitu sampah yang terdiri dari daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur dan buah. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Bahan-bahan ini mudah di degradasi oleh mikrobial.
2. Sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari kaleng, plastik, besi dan logam-logam lainnya, gelas, mika atau bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa-senyawa organik. Sampah ini tidak dapat terdegradasi oleh mikrobial.

Menurut Hadiwiyoto (1983:24), berdasarkan lokasinya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Sampah kota (urban) yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar.
2. Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman dan di pantai.

2.1.3. Jenis dan Sumber Sampah

Jenis dan sumber sampah menurut Widyatmoko (2002:2), dapat dikelompokkan menjadi :

1. Sampah rumah tangga, terdiri dari:
 - a. Sampah basah yaitu sampah yang terdiri bahan-bahan organik yang mudah membusuk yang sebagian besar adalah sisa makanan, potongan hewan, sayuran dan lain-lain.
 - b. Sampah kering yaitu sampah yang terdiri dari logam seperti besi, kaleng bekas dan sampah kering yang non logam misalnya kertas, kayu, kaca, keramik, batu-batuan dan sisa kain.
 - c. Sampah lembut, misalnya sampah debu yang berasal dari penyapuan lantai, penggergajian kayu dan abu dari sisa pembakaran kayu.
 - d. Sampah besar yaitu sampah yang terdiri dari buangan rumah tangga yang besar-besar seperti meja, kursi dan lain-lain.
2. Sampah komersial, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan komersial seperti pasar, pertokoan, rumah makan, tempat hiburan, penginapan dan lain-lain.

3. Sampah bangunan, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan termasuk pemugaran dan pembongkaran suatu bangunan seperti semen, kayu, batubata dan sebagainya.
4. Sampah Fasilitas umum, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan pembersihan dan penyapuan jalan, trotoar, taman, lapangan, tempat rekreasi dan fasilitas umum lainnya.

2.2. Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah ialah usaha mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan sampai pengolahan dan pembuangan akhir (Cipta Karya, 1993). Pengelolaan sampah terdiri dari 2 jenis yaitu pengelolaan setempat (individu) dan pengelolaan terpusat untuk lingkungan atau perkotaan.

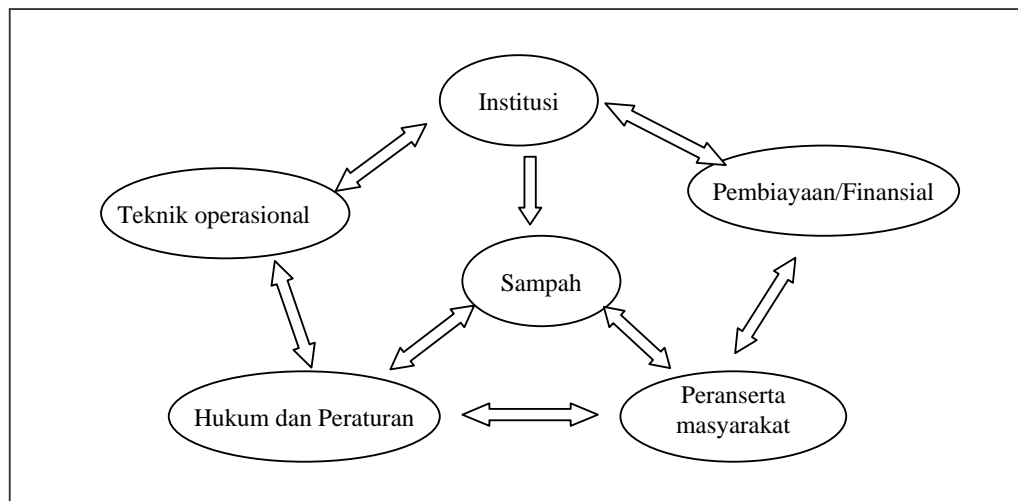
Menurut Kodoatie (2003:217), Sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Komponen tersebut adalah:

- Aspek teknik operasional (teknik)
- Aspek kelembagaan (institusi).
- Aspek pembiayaan (finansial);
- Aspek hukum dan pengaturan (hukum).
- Aspek peran serta masyarakat.

Karena sistem pengelolaan limbah padat perkotaan harus utuh dan tidak terpotong rantai ekosistemnya maka diperlukan tindakan terkoordinatif,

sinkronisasi dan simplikasi. Untuk peningkatan penanganan persampahan banyak hal yang harus ditinjau diantaranya operasional pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir serta peralatan yang digunakan. Disamping itu yang sangat berperan adalah aspek organisasi dan manajemen di dalam pengelolaannya.

Menurut SK SNI T-13-1990-F, pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain, seperti gambar 2.1 Skema Sistem Pengelolaan Sampah.



Sumber : SK-SNI T-13-1990-F

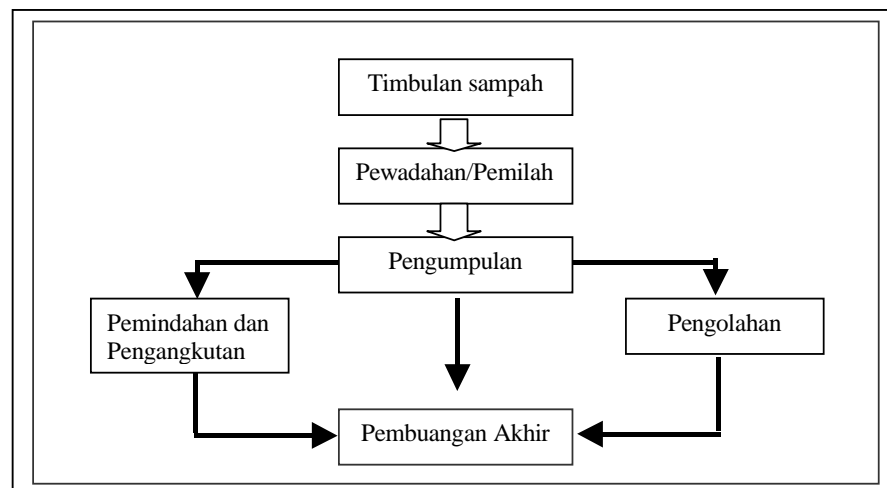
GAMBAR 2.1
SKEMA SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN

2.2.1. Aspek Teknik Operasional

Teknik operasional persampahan, menurut SK SNI T-13-1990 F terdiri dari 6 komponen yaitu perwadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan,

pengolahan, pembuangan akhir, sebagaimana skema pada gambar 2.2. diagram deknik operasional sampah

Pengelolaan limbah padat (sampah) terdapat 6 (enam) fungsi elemen yaitu (1) timbulan sampah, (2) penanganan pada sumber, (3) pengumpulan sampah dari sumbernya (4) pemisahan dan proses pengolahan (5) pemindahan dan pengangkutan, (6) Pembuangan (*Tchobagnolous: 1993*)



Sumber : SK-SNI T-13-1990-F

GAMBAR 2.2.
DIAGRAM TEKNIK OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH

2.2.1.1. Pelayanan Sampah

Strategi pelayanan sistem pengelolaan sampah mendahulukan pencapaian keseimbangan pelayanan dilihat dari segi kepentingan sanitasi dan ekonomis, kualitas pelayanan dan kuantitas pelayanan. Dalam menentukan skala kepentingan daerah pelayanan dapat dibagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut :

1. Wilayah dengan pelayanan intensif adalah daerah jalan protokol, pusat kota, kawasan permukiman tidak teratur dan daerah komersial;

2. Wilayah dengan pelayanan menengah adalah kawasan permukiman teratur.
3. Wilayah dengan daerah pelayanan rendah adalah daerah pinggiran.

Untuk menentukan kualitas operasional pelayanan didasarkan pada kriteria penggunaan jenis peralatan, sampah terisolasi dari lingkungan, frekuensi pelayanan, frekuensi penyapuan lebih sering, estetika, tipe kota, variasi daerah layanan, pendapatan dari retribusi, timbulan sampah musiman. (SK SNI T-13-1990 F)

Menurut P3KT dalam Waluyo (2003:24), kriteria untuk menentukan pelayanan sampah adalah sebagai berikut :

1. Daerah permukiman
 - Daerah dengan tingkat kepadatan > 150 jiwa/ha memerlukan tingkat layanan 100 %.
 - Daerah dengan kepadatan penduduk 100 – 150 jiwa/ha memerlukan tingkat layanan 75 %.
 - Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk 50-100 ha/jiwa memerlukan tingkat layanan 50 %.
2. Daerah komersial pada umumnya sampah dengan tingkat layanan 80 %.
3. Jalan protokol dan taman memiliki tingkat layanan 100 %.
4. Pasar harus memiliki tingkat pelayanan 100 %.

Menurut SK-SNI T-13-1990-F, tolok ukur menentukan skala prioritas pelayanan pengelolaan sampah harus mempertimbangkan kerawanan sanitasi dan potensi ekonominya. Sebagai contoh untuk lingkungan kumuh, perumahan tidak teratur ataupun permukiman pinggiran sungai yang memiliki kerawanan sanitasi tinggi harus mendapat prioritas pelayanan.

2.2.1.2. **Timbulan Sampah**

Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Besaran timbulan sampah ditentukan berdasarkan klasifikasi kota yaitu untuk kota sedang volume sampah yang dihasilkan berkisar antara 2,75–3,25 l/org/hari dengan berat 0,70-0,8 kg/org/hari. Untuk kota kecil volume sampah yang dihasilkan berkisar 2,5– 2,75 l/ org/hari dengan berat 0,625-0,70 kg/org/hari (SNI S-04-1993-03). Menurut Hartono (1993), jumlah dan komposisi sampah yang dihasilkan suatu kota ditentukan oleh beberapa faktor yaitu jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya, tingkat pendapatan dan pola konsumen, pola penyediaan kebutuhan hidup penduduknya dan iklim dan musim yang terkait.

Menurut penelitian Puslitbang Permukiman (Ditjen Cipta Karya,1991:7) didapatkan angka-angka laju timbulan sampah sebagai berikut:

1. Kota Kecil

- Laju timbulan sampah permukiman 2,0 liter/orang/hari
- Prosentase total sampah permukiman 75 % – 80 %
- Prosentase sampah non permukiman 20 % - 25 %

2. Kota Sedang

- Laju timbulan sampah permukiman 2,25 liter/orang/hari.
- Prosentase total sampah permukiman 65 % – 75 %.
- Prosentase sampah non permukiman 25 % - 35 %.

2.2.1.3. Pewadahan

Menurut SK SNI T-13-1990-F, pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara di masing-masing sumbernya. Adapun jenis pewadahan dapat dilihat pada tabel II.1 berikut :

TABEL II. 1
JENIS PEWADAHAN

No	Jenis Wadah	Kapasitas (liter)	Pelayanan	Umur	Ket.
1	Kantong	10-40	1 KK	2-3 hari	Komunal Komunal
2	Bin	40	1 KK	2-3 tahun	
3	Bin	120	2-3 KK	2-3 tahun	
4	Bin	240	4-6 KK	2-3 tahun	
5	Kontainer	1000	80 KK	2-3 tahun	
6	Kontainer	500	40 KK	2-3 tahun	
7	Bin	30-40	pejalan kaki taman	2-3 tahun	

Sumber : SK SNI-T-13-1990-F

Untuk mencegah sampah berserakan yang akan memberikan kesan kotor serta mempermudah proses kegiatan pengumpulan maka dari sampah yang dihasilkan perlu disediakan tempat untuk penyimpanan/penampungan sambil menunggu kegiatan pengumpulan sampah. Namun pendekatan untuk perwadahan sampah harus mendukung dan sesuai dengan persyaratan sistem pengelolaan sampah di sumbernya, dan sesuai dengan persyaratan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah kota yang direncanakan.

Dalam rangka mendukung program pemilahan disumbernya, lembaga pengelola sampah kota perlu memberikan arahan penggunaan sistem wadah yang memisahkan antara sampah basah dengan sampah kering yang banyak mengandung material yang dapat di daur ulang. Yang paling penting dalam membina pewadahan adalah mendorong masyarakat untuk tertib membuang sampah pada tempatnya serta tertib memilah sampah. (Cipta Karya, 1993).

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan pewadahan atau penampungan sampah (*Tchobanoglous*, 1993) adalah:

1. Jenis sarana pewadahan yang digunakan.
2. Lokasi penempatan sarana pewadahan.
3. Kesehatan dan keindahan lingkungan.
4. Metode pengumpulan yang digunakan.

Menurut SK SNI T-13-1990-F, persyaratan bahan untuk pewadahan sampah adalah sebagai berikut:

1. Tidak mudah rusak dan kedap air kecuali kantong plastik atau kertas.
2. Mudah untuk diperbaiki.
3. Ekonomis, mudah diperoleh/dibuat oleh masyarakat.
4. Mudah dan cepat dikosongkan.

Sedangkan penentuan ukuran volume ditentukan berdasarkan :

1. Jumlah penghuni tiap rumah.
2. Tingkat hidup masyarakat.
3. Frekuensi pengambilan/pengumpulan sampah.
4. Cara pengambilan sampah.
5. Sistem pelayanan (individual atau komunal).

2.2.1.4. **Pengumpulan**

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara atau langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. TPS yang digunakan biasanya kontainer kapasitas 10 m³,

6 m³, 1 m³, transfer depo, bak pasangan batu bata, drum bekas volume 200 liter, dan lain-lain. TPS-TPS tersebut penempatannya disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada (SK SNI T-13-1990-F).

Pola pengumpulan sampah terdiri dari :

1. *Pola Individual Langsung*, adalah cara pengumpulan sampah dari rumah-rumah/sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Pola individual langsung dengan persyaratan sebagai berikut:

- Kondisi topografi bergelombang (rata-rata > 5%) sehingga alat pengumpul non mesin sulit beroperasi.
- Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak mengganggu pemakai jalan lainnya.
- Kondisi dan jumlah alat memadai.
- Jumlah timbulan sampah > 0,3 m³/hari

2. *Pola Individual Tak Langsung*, adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut :

- Bagi daerah yang partisipasi masyarakatnya rendah.
- Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia.
- Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung.
- Kondisi topografi relatif datar (rata-rata < 5%).
- Kondisi lebar jalan dapat dilalui alat pengumpul.
- Organisasi pengelola harus siap dengan sistem pengendalian.

3. *Pola Komunal Langsung*, adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut:

- Bila alat angkut terbatas.
- Bila kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah.
- Alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah.
- Peran serta masyarakat tinggi.
- Wadah komunal mudah dijangkau alat pengangkut.
- Untuk permukiman tidak teratur.

4. *Pola Komunal Tak Langsung*, adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dengan persyaratan sebagai berikut :

- Peran serta masyarakat tinggi.
- Penempatan wadah komunal mudah dicapai alat pengumpul.
- Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia.
- Kondisi topografi relatif datar ($< 5\%$).
- Lebar jalan/gang dapat dilalui alat pengumpul.
- Organisasi pengelola harus ada.

Tata cara operasional pengumpulan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ritasi 1-4 rit/hari.
2. Periodisasi 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari tergantung kondisi komposisi sampah (semakin besar prosentase sampah organik maka periodisasi

pelayanan maksimal sehari), kapasitas kerja, desain peralatan dan kualitas pelayanan.

3. Mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap.
4. Mempunyai petugas pelaksana yang tetap.
5. Pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tmpuh dan kondisi daerah.

Pelaksanaan pengumpulan sampah dapat dilaksanakan oleh petugas kebersihan atau swadaya masyarakat (pribadi, Institusi, Badan Swasta atau RT/RW).

2.3.1.3. **Pemindahan**

Pemindahan sampah adalah tahap memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkut untuk di bawa ke tempat pembuangan akhir (SK SNI T-13-1990-F). Operasi pemindahan dan pengangkutan menjadi diperlukan apabila jarak angkut ke pusat pemrosesan/TPA sangat jauh sehingga pengangkutan langsung dari sumber ke TPA dinilai tidak ekonomis. Hal tersebut juga menjadi penting bila tempat pemrosesan berada di tempat yang jauh dan tidak dapat dijangkau langsung.

Tempat penampungan/pembuangan sementara (TPS) merupakan istilah yang lebih populer bagi sarana pemindahan dibandingkan dengan istilah transfer depo. Persyaratan TPS/transfer Depo yang ramah lingkungan adalah :

- Bentuk fisiknya tertutup dan terawat.
- TPS dapat berupa pool gerobak atau pool container.
- Sampah tidak berserakan dan bertumpuk diluar TPS/kontainer.

Untuk menjamin terkontrolnya kebersihan lingkungan di sekitar TPS, hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah :

- Peran masyarakat tinggi.
- TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah bagi sarana pengumpul dan pengangkutan untuk masuk dan keluar, tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya.
- Pengangkutan sampah terjadwal, sehingga waktu kedatangan gerobak dengan waktu kedatangan truk dapat disesuaikan.
- Periodisasi pengangkutan 1 hari, 2 hari atau maksimal 3 hari sekali.
- Semua sampah terangkut pada proses pengangkutan.

Berikut ini adalah standar mengenai tipe peralatan pengumpul sampah dan tipe pengumpul, sebagaimana tabel II.2 berikut :

TABEL II. 2
TIPE PERALATAN DAN TIPE PENGUMPUL SAMPAH

Sifat	Bahan	Kebaikan	Kekurangan	Keterangan
Tetap	Batu bata (bak sampah)	Tahan lama, volume 1 – 8 m ³	Tidak estetik, operasi sulit	Tidak digunakan lagi
Semi tetap	Besi, seng (tong sampah dengan tutup)	Tahan lama volume 1 – 2 m ³	Operasi sulit, perawatan mahal	Lebih baik tidak dianjurkan.
Tidak tetap	Besi, baja, aluminium (container) volume 6-10 m ³	Operasi mudah, murah dan fleksibel	Relatif lebih mahal	Dianjurkan
Tidak tetap	Kayu (container) volume 6 – 10 m ³	Operasi mudah, murah dan fleksibel	Tidak tahan lama, estetik kurang	Tidak dianjurkan lagi

Sumber: Hartono (2000)

.Menurut SK SNI T-13-1990-F, tipe pemindahan sampah menggunakan tranfer depo antara lain menggunakan Tranfer tipe I dengan luas lebih dari 200 m² yang merupakan tempat peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum pemindahan serta sebagai kantor dan bengkel sederhana , tranfer tipe II dengan

luas 60-200 m² yang merupakan tempat pertemuan peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum tempat pemindahan dan merupakan tempat parkir gerobak atau becak sampah. Tranfer tipe III dengan luas 10-20 m² yang merupakan tempat pertemuan gerobak dan kontainer (6-10 m³) serta merupakan lokasi penempatan kontainer komunal (1-10 m³).

2.3.1.4. **Pengangkutan**

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir (SK SNI T-13-1990-F) . Untuk mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis *Dump Truck*, *Arm Roll Truck*, dan jenis *Compactor Truck*. Frekuensi pengangkutan dapat bervariasi yaitu untuk daerah-daerah menengah ke atas lebih sering dibandingkan dengan daerah lainnya, misalnya 2 kali sehari, sedangkan untuk kawasan lainnya 1 kali sehari . Namun demikian hendaknya perlu dipahami apabila kurang dari 1 kali sehari menjadi tidak baik karena sampah yang tinggal lebih dari 1 hari dapat mengalami proses pembusukan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

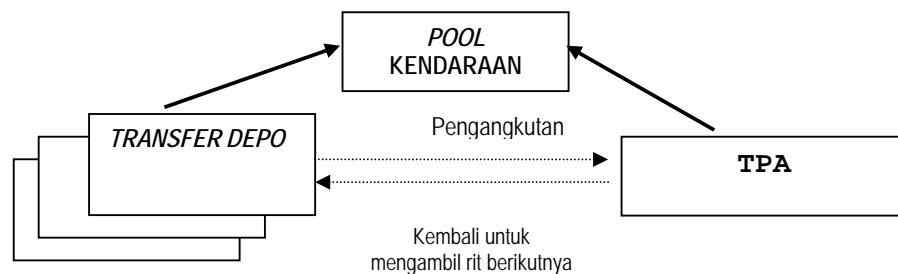
TABEL II.3
JENIS DAN KARAKTERISTIK ALAT PENGANGKUT

Jenis Kendaraan	Kapasitas	Kekurangan	Kebaikan	Catatan
Truk bak terbuka (kayu)	8 m ³ 10 m ³ 12 m ³	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja banyak - Perlu penutup bak - Operasinya lambat 	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya O&M rendah - Cocok sistem door to door - Umur produksi 5 tahun - 2 – 3 rit/hari 	Tidak dianjurkan
Dump Truck	6 m ³ 8 m ³ 10 m ³	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kerja banyak - Perlu penutup bak - Biaya O&M relatif tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Cocok untuk pasar - Bisa door to door - Mobilitas tinggi, 2-3 rit/hari - Umur 5 – 7 tahun - Cepat operasi pembongkaran 	Kurang dianjurkan
Armroll truck Container	5 m ³ 7 m ³ 8 m ³	<ul style="list-style-type: none"> - Mahal - Butuh container - Biaya O&M tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilitas tinggi - Cocok untuk permukiman dan pasar - Tenaga kerja sedikit - Umur 5 tahun - 4-5 rit/hari 	Cocok untuk lokasi sampah yang banyak. Dianjurkan.

Sumber : SK SNI-T-13-1990-F

Pola pengangkutan berdasarkan sistem pengumpulan sampah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pengumpulan sampah yang dilakukan berdasarkan sistim pemindahan (*Transfer depo*).



Sumber : SK SNI T-13-1990-F

GAMBAR 2.3
POLA PENGANGKUTAN SISTIM *TRANSFER DEPO*

- a. Kendaraan angkutan keluar dari *pool* langsung menuju ke lokasi pemindahan untuk mengangkut sampah langsung ke TPA.

- b. Dari TPA kendaraan tersebut kembali ke *Transfer Depo* untuk pengambilan rit berikutnya.
2. Pengumpulan sampah sistim kontainer dilakukan untuk pembuangan sementara tidak tetap atau dapat dipindahkan, dengan pola pengangkutannya :
 - a. Sistem Pengosongan Kontainer Cara I
 - Kendaraan dari pool membawa kontainer kosong menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA.
 - Kontainer kosong dikembalikan ke tempat semula .
 - Menuju kontainer isi berikutnya untuk diangkut ke TPA, demikian seterusnya hingga rit terakhir.
 - b. Sistem Pengosongan Kontainer Cara II
 - Kendaraan dari *pool* menuju kontainer isi pertama untuk mengangkut sampah ke TPA.
 - Dari TPA kendaraan tersebut dengan kontainer kosong menuju ke lokasi kedua untuk menurunkan kontainer kosong dan membawa kontainer isi untuk diangkut ke TPA, demikian seterusnya.
 - Pada rit terakhir kontainer kosong dari TPA menuju ke lokasi kontainer pertama.
 - c. Sistem Pengosongan Kontainer Cara III
 - Kendaraan dari pool membawa kontainer kosong menuju kontainer isi untuk mengganti/mengambil dan langsung dibuang ke TPA.
 - Kendaraan dengan membawa kontainer kosong dari TPA menuju ke lokasi kontainer berikutnya, demikian seterusnya hingga rit berakhir.

d. Sistem Kontainer Tetap, biasanya untuk container kecil serta alat angkut berupa truk kompaktor dengan proses sebagai berikut:

- Kendaraan dari pool menuju kontainer pertama, sampah dituangkan ke dalam truk kompaktor dan meletakkannya container yang kosong.;
- Kendaraan menuju kontainer berikutnya sehingga truk penuh, untuk kemudian langsung ke TPA.
- Demikian seterusnya hingga rit terakhir.

Frekuensi pengangkutan perlu ditetapkan dengan teratur, disamping untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan, juga untuk menetapkan jumlah kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya operasi dapat diperkirakan. Frekuensi pelayanan yang teratur akan memudahkan bagi para petugas untuk melaksanakan kegiatannya. Frekuensi pelayanan dapat dilakukan 3 hari sekali atau maksimal 2 kali seminggu. Meskipun pelayanan yang lebih sering dilakukan adalah baik, namun biaya operasional akan menjadi lebih tinggi sehingga frekuensi pelayanan harus diambil yang optimum dengan memperhatikan kemampuan memberikan pelayanan, jumlah volume sampah, dan komposisi sampah (Irman, 2002:36).

Perencanaan frekuensi pengangkutan sampah dapat bervariasi tergantung kebutuhan misalnya satu sampai dua hari sekali dan maksimal tiga hari sekali, tergantung dari komposisi sampah yang dihasilkan dimana semakin besar prosentase sampah organik semakin kecil periodisasi pengangkutan. Hal ini dikarenakan sampah organik lebih cepat membusuk sehingga dapat menimbulkan gangguan lingkungan di sekitar TPS. Makin sering frekuensi pengangkutan maka

semakin baik, namun biasanya biaya operasinya akan lebih mahal. Penentuan frekuensi pengangkutan juga akan bergantung dari jumlah timbulan sampah dengan kapasitas truk pengangkut yang melayani (*Tchobanoglous, 1993:25*)

Menurut SK SNI T-12-1991-03, setiap 2.000 rumah dibutuhkan alat pengumpul yang berupa gerobak sampah atau becak sampah sebanyak 16 buah, 1 truck sampah atau arm roll truck dengan 3 kontainer sebanyak 1 unit, kebutuhan transfer depo sebanyak 1 unit.

2.3.1.5. **Pengolahan**

Menurut SK SNI T-133-1990-F, pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir. Teknik-teknik pengolahan sampah dapat berupa pengomposan, pembakaran, daur ulang dan pemadatan.

2.3.1.6. **Pembuangan Akhir Sampah**

Pembuangan akhir sampah adalah tempat untuk mengkarantina (menyingkirkan) sampah kota sehingga aman. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan terminal terakhir dari proses pewadahan, pengumpulan, pengangkutan yang diproses lebih lanjut dengan pemusnahan. Dalam pemusnahan dikenal berbagai metode antara lain adalah *landfill*. *Landfill* merupakan fasilitas fisik yang digunakan untuk residu buangan padat di permukaan tanah, cara pengolahan sampah sistem *landfill* tersebut diantaranya :

1. Lahan urugan terbuka atau *open dumping* (tidak dianjurkan) merupakan sistem yang tertua yang dikenal manusia dalam sistem pembuangan sampah, dimana sampah hanya dibuang atau ditimbun di suatu tempat tanpa dilakukan penutupan dengan tanah sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan seperti perkembangan vektor penyakit, bau, pencemaran air permukaan dan air tanah, dan rentan terhadap bahaya kebakaran.
2. Lahan urugan terkendali atau *Controlled Landfill* yaitu lahan urug terbuka sementara dengan selalu dikompaksi tiap tebal lapisan sampah setebal 60 cm dan diurug dengan lapisan tanah kedap air (10-20 cm) dalam tiap periode 7 hari atau setelah mencapai tahap tertentu.
3. Lahan urugan penyehatan atau *Sanitary Landfill* yaitu caranya hampir sama dengan di atas, hanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengendalian drainase, dan pengolahan *leachate* (air luruhan sampah) serta proses pemilahan sampah yang tidak bisa diolah dengan sistem *controlled landfill* seperti plastik dan sejenisnya. Disamping itu perlu juga dilengkapi sarana pengendalian pembuangan gas yang ditimbulkan oleh fermentasi dari sampah (Irman, 2003:40).

2.2.2. Aspek Kelembagaan

Bentuk kelembagaan yang dianjurkan untuk berbagai kategori kota di Indonesia adalah sebagaimana tabel II.4 berikut ini:

TABEL II. 4.
BENTUK KELEMBAGAAN PENGELOLA PERSAMPAHAN

No	Kategori Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Bentuk Kelembagaan
1.	Kota Raya (metropolitan) Kota Besar	>1.000.000 500.000-1.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Daerah atau • Dinas Tersendiri
2.	Kota Sedang I	250.000-500.000	Dinas Sendiri
3.	Kota Sedang II	100.000-250.0	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas / Suku Dinas • UPTD / Seksi / PU
4.	Kota Kecil	20.000-100.000	<ul style="list-style-type: none"> • UPTD / PU • Seksi / PU

Sumber : SK SNI T-13-1990 F

Jumlah personil pengelolaan persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1000 penduduk yang dilayani sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1000 penduduk. Bentuk pendekatan perhitungan tenaga staf berbeda dengan perhitungan tenaga pelaksana. Perhitungan jumlah tenaga staf memperhatikan struktur organisasi dan beban tugas. Perhitungan jumlah tenaga operasional memperhatikan disain pengendalian, disain dan jumlah peralatan, disain operasional, keperluan tenaga penunjang dan pembantu, dan beban penugasan.

Menurut SK SNI T-12-1991-03, untuk setiap 2.000 rumah dibutuhkan tenaga pengumpul sampah sebanyak 16 orang dan tenaga pengangkutan, pembuangan akhir dan administrasi sebanyak 8 orang.

2.2.3. Aspek Pembiayaan

Biaya pengelolaan sampah dihitung berdasarkan biaya operasional dan pemeliharaan serta pergantian peralatan. Perbandingan biaya pengelolaan dari

biaya total pengelolaan sampah sebagai berikut: biaya pengumpulan 20% - 40%, biaya pengangkutan 40% - 60%, biaya pembuangan akhir 10% - 30% (SNI –T-12-1991-03).

Besarnya retribusi yang layak ditarik dari masyarakat setiap rumah tangga besarnya $\pm 0,5\%$ dan maksimal 1% dari penghasilan per rumah tangga per bulannya (Cipta Karya, 1993). Hal ini dapat dikatakan mampu mencapai “*Self Financing*” (mampu membiayai sendiri) jika perhitungan besar retribusi dilakukan dengan cara klasifikasi dan prinsip subsidi silang.

Menurut Syafrudin (2006), pelaksanaan penarikan retribusi diatur dalam suatu dasar hukum yang memenuhi prinsip antara lain:

1. Disusun sistem pengendalian yang efektif antara lain bersama-sama rekening listrik,
2. Dibagi dalam wilayah penagihan,
3. Didasarkan pada peta target,
4. Penagihan dilaksanakan setelah pelayanan berjalan dan struktur tarif perlu dipublikasikan kepada masyarakat.

Sumber dana merupakan salah satu sumber daya sistem pengelolaan persampahan, dana tersebut meliputi :

1. Retribusi, yaitu sumber dana yang digali dari masyarakat.
2. Iuran sampah yaitu sumber dana masyarakat dilaksanakan oleh organisasi masyarakat tanpa peraturan formal.
3. Subsidi yaitu sumber dana pemerintah daerah karena dana masyarakat tidak mencukupi untuk menekan tarif retribusi.

4. Subsidi silang yaitu strategi pendanaan yang kuat membantu yang lemah.
(Ciptakarya, 1993).

2.2.4. Aspek Peraturan

Untuk pengelolaan persampahan diperlukan dasar hukum pengelolaan persampahan yang mencakup (Syafudin: 2006):

- a. Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang berlaku.
- b. Peraturan daerah tentang pembentukan badan pengelolaan kebersihan.
- c. Peraturan daerah yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Pengelolaan sampah di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan, retribusi, keterlibatan masyarakat dan sebagainya. Aspek pengaturan memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah, hal ini mengingat kesadaran masyarakat dan pola hidup masyarakat dalam memperlakukan sampah belum baik.

2.2.5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Menurut *Louise et.al* dalam Irman (2004:51), peran serta masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam tindak-tindak administrator yang mempunyai pengaruh langsung terhadap mereka. Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam

pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah baik langsung maupun tidak langsung .

Dari uraian di atas, pengertian peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah keterlibatan masyarakat atau kelompok masyarakat baik pasif maupun aktif untuk mewujudkan kebersihan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Permasalahan sampah perkotaan sudah menjadi masalah/beban seluruh pengelola kota, sehingga penanganan sampah di kota-kota tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan, tetapi juga merupakan menjadi tanggung jawab masyarakat.

Menurut Syafrudin (2006), tanpa ada partisipasi masyarakat, semua program pengelolaan limbah padat sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program tersebut, seperti bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan limbah padat (sampah) yang tertib, lancar dan merata, faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat maupun kebiasaan dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan yang sering dijumpai di Indonesia adalah tingkat pendidikan penduduk yang tidak merata sehingga tingkat pemahaman terhadap program pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat kurang efektif, masih belum melembaganya keinginan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-

masing, belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya, banyak pengelola kebersihan yang belum mencantumkan program penyuluhan sebagai salah satu aktifitasnya .

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi peran serta pasif dan peran serta aktif yaitu :

1. Peran serta pasif

- Sadar akan kebersihan terhadap lingkungan seperti tidak membuang sampah di sembarang tempat dan penempatan sampah pada wadah yang tertutup.
- Sadar akan kewajiban membayar retribusi. Masyarakat menyadari bahwa pengelolaan sampah memerlukan pembiayaan yang besar dan diantaranya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi.

2. Peran serta aktif

- Pengumpulan sampah dengan pola komunal, merupakan tindakan nyata dalam membantu pekerjaan institusi pengelola kebersihan
- Kontrol sosial, dengan saling mengingatkan sesama anggota masyarakat seperti menegur rekan yang membuang sampah disembarang tempat.
- Ikut dalam kegiatan gotong royong untuk kebersihan lingkungan
- Ikut serta dalam penyediaan sarana kebersihan seperti sarana TPS.

(Irman, 2004:52)

2.3. Kinerja

2.3.1. Pengertian Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai perilaku berkarya, berpenampilan atau berkarya. Kinerja merupakan bentuk bangunan organisasi yang bermutu dimensional, sehingga cara mengukurnya bervariasi tergantung pada banyak faktor (*Bates dan Holton* dalam Mulyadi, 2006:111). Pengertian kinerja organisasi menurut Mulyadi (2006:111), adalah hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat tempat organisasi.

Indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan. Untuk mengetahui kinerja pelayanan dapat dilihat dari seberapa besar output, semakin besar volume output berarti semakin tinggi pula tingkat kinerjanya. Indikator kinerja berguna untuk menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan (Mulyadi 2006:111). Baik buruknya penilaian kinerja sangat terkait dan dapat diukur melalui penilaian tingkat efisiensi dan efektifitas. (Prawirosentono; 1999:29)

Menurut Nurmandi (1999:193), efisiensi menunjukkan pada rasio minimal antara input dan output. Input yang kecil dan diikuti dengan output yang besar merupakan kondisi yang diharapkan. Sedangkan efektifitas (*effectiveness*) memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan. Salah satu ukuran efektifitas adalah derajat kepuasan masyarakat. Ukuran ini tidak mempertimbangkan berapa biaya,

tenaga dan waktu yang digunakan dalam memberikan pelayanan tetapi lebih menitik beratkan pada tercapainya tujuan organisasi pelayanan publik.

Menurut Mulyadi (2006:118), beberapa pengukuran kinerja antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Membandingkan kinerja nyata dengan hasil (sasaran) yang diharapkan.
3. Membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4. Membandingkan kinerja satu instansi dengan kinerja instansi lain atau dengan swasta yang unggul dibidang tugas yang sama dengan kegiatan yang sedang diukur.
5. Membandingkan kinerja nyata dengan standar kinerja.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitasnya dapat dicapai individu atau organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diemban yang terkait dengan tingkat efisiensi dan efektifitas, maupun dengan melihat dari seberapa besar output sehingga dapat dilihat apabila semakin besar volume output berarti semakin tinggi pula tingkat kinerjanya.

2.3.2. Kinerja Pengelolaan Sampah

Berdasarkan beberapa pengertian seperti di atas, kinerja pengelolaan sampah dapat diukur dengan membandingkan kinerja nyata dengan hasil atau sasaran yang diharapkan, disamping itu kinerja juga sangat terkait dengan tingkat efisiensi dan efektifitas. Kinerja pengelolaan sampah merupakan perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan

sampah yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Untuk melakukan penilaian kinerja dalam pengelolaan sampah sangat terkait dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat.

Dalam kaitan dengan kondisi yang diharapkan dalam pengelolaan sampah, indikator kinerja pengelolaan sampah pada dasarnya adalah kondisi ideal pengelolaan sampah yang didapatkan dari kajian literatur mengenai sistem pengelolaan sampah maupun sesuai dengan Standar yang ada seperti SNI T-13-1990-F tentang Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan maupun SNI T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Permukiman. Disamping itu penilaian kinerja dapat didasarkan pada pendapat atau persepsi masyarakat selaku pelanggan pelayanan sampah.

Menurut Haryono (2004:41), untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran pengelolaan sampah dapat diukur dengan menghitung melalui :

1. Perbandingan antara keterangkutan sampah dengan jumlah timbulan yang dihasilkan oleh suatu kota berdasarkan kondisi wilayah dan kepadatan penduduk.
2. Perbandingan antara daerah yang dilayani dengan luas daerah yang seharusnya dilayani.
3. Jumlah penduduk yang dilayani harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana, personil dan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah.

Menurut Ismaria (1992), salah satu faktor penentu baik buruknya operasi pengelolaan sampah adalah metode operasional yang dipengaruhi oleh

karakteristik komponen operasinya seperti seperti kendaraan, tenaga operasional serta faktor eksternal lainnya seperti kondisi fisik wilayah operasi. Secara kuantitatif, efektifitas dan efisiensi operasi pengelolaan sampah dapat diukur berdasarkan volume yang di tangani.

Menurut Muyadi (2006:138), untuk membuat hasil evaluasi kinerja digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan skala pengukuran kinerja antara lain dengan cara pengukuran ordinal, misalnya:

86- 100	=	Baik		Sangat Baik		Sangat berhasil
70 – 84	=	Sedang		Baik		Berhasil
55 – 69	=	Kurang	atau	Sedang	Atau	Cukup berhasil
< 54	=	Sangat Kurang		Kurang Baik		Tidak berhasil

Dari uraian-uraian diatas, maka penilaian kinerja pengelolaan sampah dapat dilihat dari 2 sudut pandang yaitu:

1. Berdasarkan perbandingan dengan standar normatif (Standar Nasional Indonesia tentang persampahan) atau kajian literatur yang sesuai.
2. Berdasarkan persepsi masyarakat yang sudah mendapat jangkauan pelayanan sampah.

2.4. Persepsi

2.4.1. Konsep Dasar Persepsi

Menurut Wojowasito dalam Dewanto (2003:28), persepsi merupakan istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris *perceive* yang artinya melihat atau mengamati. Dalam kamus besar bahasa Indonesia persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses

seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai suatu proses kognitif dari seseorang terhadap lingkungannya yang digunakan untuk menafsirkan lingkungan sekitarnya. (*Gibson* dalam Hartiningtyas, 2005:27). Proses kognitif tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor situasi, kebutuhan, keinginan dan juga kesediaan sehingga setiap orang akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap obyek yang dirasakan.

Persepsi mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. Persepsi diartikan sebagai fungsi psikologis yang memungkinkan individu untuk mengamati rangsangan inderawi dan mengubahnya menjadi perjalanan yang berkaitan secara tertata. (Daldjoeni, 1997). Pengertian lain, persepsi merupakan proses yang lebih rumit daripada sekedar penglihatan dan penilaian, dimana melalui persepsi orang dapat memilih, mengatur dan mengartikan rangsangan-rangsangan inderawi ke dalam gambaran dunia yang penuh air dan bertalian secara logis (*Laurie* dalam Hartiningtyas, 2005:27).

Menurut Boedoyo dalam Hartiningtyas (2005:28), persepsi merupakan proses pengamatan yang secara langsung dikaitkan dengan suatu makna dilandasi dari adanya informasi dan lingkungan. Persepsi juga diartikan sebagai fungsi psikologis yang memungkinkan individu untuk mengamati rangsangan inderawi dan mengubahnya menjadi perjalanan yang berkaitan secara tertata (Daldjoeni, 1997).

Menurut Sarlito dalam Hartiningtyas (2005:30), hal-hal yang dapat mempengaruhi perbedaan persepsi antara lain perbedaan set (harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul), fokus perhatian, kebutuhan, sistem nilai, ciri

kepribadian serta gangguan jiwa. Persepsi terbentuk melalui proses seleksi serta interpretasi atau pembulatan terhadap proses informasi yang sampai, kemudian diterjemahkan ke dalam tingkah laku dari suatu keinginan atau pilihan sebagai reaksi. (*Atkinson* dalam *Hatiningtyas*, 2005:30). Seleksi merupakan penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar atau obyek yang sedang diamati. Interpretasi merupakan proses pengorganisasian informasi agar berguna bagi seseorang. Dari proses seleksi dan interpretasi tersebut membentuk suatu penilaian tertentu, sebagai reaksinya atas tindakan dan keinginan akan kebutuhan dan pilihan dari subyek yang diamati.

Dari beberapa pengertian tentang persepsi seperti di atas, maka dapat diartikan persepsi adalah tanggapan atau penilaian dari proses pengamatan yang secara langsung dari suatu makna yang dipengaruhi oleh beberapa faktor situasi, kebutuhan, keinginan dan juga kesediaan sehingga setiap orang akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap obyek yang dirasakan.

2.4.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah.

Menurut *Horton and Chaster* dalam *Hartiningtyas* (2005:31), persepsi masyarakat terbentuk karena adanya persepsi individu dimana proses informasi akan memiliki perbedaan antara seseorang dengan individu lainnya, begitu pula dengan persepsi terhadap tindakan dari berbagai keinginan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu dalam menciptakan persepsi masyarakat:

1. Obyek yang diamati akan berbeda pada setiap orang berdasarkan rangsangan indera terhadap obyek tersebut.

2. Kedalaman pengamatan terhadap obyek yang diamati berdasarkan wujud obyeknya.
3. Faktor pribadi seperti pengalaman, tingkat kecerdasan, kemampuan mengingat dan sebagainya.

Menurut Rahmat (1996:55), persepsi dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu :

1. Faktor yang terkandung dalam rangsang fisik dan proses neurofisiologis akan sangat tergantung pada stimuli yang diterima.
2. Faktor yang terdapat dalam diri si pengamat seperti kebutuhan (*need*) dan suasana hati (*moods*) pengalaman individu dan sifat individu lainnya.

Persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor pribadi individu yang tercermin dari status sosial ekonomi masyarakat. Persepsi antara satu individu dengan individu lainnya dalam masyarakat juga akan mempunyai perbedaan sesuai dengan status sosial ekonominya (Boedjo, 1986:5).

Dari beberapa definisi tentang persepsi dan kinerja maupun pengelolaan sampah maka dapat disimpulkan, persepsi terhadap kinerja pengelolaan sampah adalah pendapat dari seseorang atau masyarakat terhadap hasil atau sasaran yang diharapkan dari aspek-aspek pengelolaan sampah. Perbedaan persepsi masing-masing individu sangat dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi, pengetahuan serta kemampuan individu dalam fokus perhatian, kebutuhan, sistem nilai, ciri kepribadian. Dari persepsi masing-masing individu terhadap kinerja pengelolaan sampah tersebut akan membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan sampah. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan sampah dari sisi masyarakat, diperlukan variabel dan indikator kinerja pengelolaan sampah.

2.5. Rangkuman Kajian Literatur

Berdasarkan hasil kajian teori di atas, maka dapat ditarik rangkuman kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang ditujukan untuk memperoleh variabel-variabel dan indikator yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja pengelolaan persampahan di Kota Gombong. Adapun rangkuman kajian literatur dimaksud disajikan dalam tabel II. 7 berikut ini..

TABEL. II. 5
RANGKUMAN KAJIAN LITERATUR

NO	KOMPONEN	SUMBER	SINTESIS TEORI	VARIABEL
1	2	3	4	5
I.	Konsep Dasar Sampah	Hadiwiyoto, 1983 Kodoatie, 2003 Azwar, 1990	Sisa bahan, limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan	Jenis, klasifikasi dan sumber sampah
II.	Sistem Pengelolaan Sampah			
A.	Aspek Teknis			
1.	Pelayanan Sampah	SK SNI 13-1994 F Tchobanoglous, 1993	Kualitas operasional didasarkan pada kriteria penggunaan jenis sampah, frekuensi pelayanan, penyapuan, type kota, variasi daerah layanan, pendapatandari retribusi, timbulan sampah.	Jangkauan pelayanan Kualitas pelayanan
2.	Timbulan sampah	SK SNI 13-1994 F	Sampah yang dihasilkan dari sumber sampah.	Jumlah timbulan 2,5 –2,75 liter/per orang/hari
3.	Pewadahan	SK SNI 13-1994 F Tchobanoglous, 1993	Upaya yang dilakukan untuk menampung sementara dimasing-masing sumbernya.	Teknik pewadahan, Jenis dan sifat alat, Lokasi pewadahan
4.	Pengumpulan sampah	SK SNI 13-1994 F Tchobanoglous, 1993	Penanganan sampah dengan cara mengumpulkan sampah dari sumbernya	Jumlah dan kapasitas peralatan, jenis dan sifat bahan, frekuensi pengumpulan, Pola pengumpulan, jenis & sifat bahan peralatan.
5.	Pemindahan	SK SNI 13-1994 F Hartono, 2000	Proses memindahkan sampah dari sarana pengumpulan ke alat pengangkutan.	lokasi penempatan TPS.

1	2	3	4	5
6.	Pengangkutan sampah ke TPA	SK SNI 13-1994 F Tchobanoglous, 1993	Tahap atau proses membawa sampah akan di buang atau diolah di TPA	Jumlah dan kapasitas peralatan, frekuensi pengangkutan, waktu pengangkutan, rute pengangkutan, jenis peralatan pengangkutan.
B.	Apek Kelembagaan			
1.	Tata laksana kerja teknis	1. Syafrudin, 2006 2. Cipta karya, 1993 3. Kodoatie, 2003	Bentuk kelembagaan dan personil yang memadai dengan bidang tugasnya.	Jumlah personil, kualitas personil
C.	Aspek Pembiayaan			
1.	Sumber dana	1. Cipta Karya 1993 2. Syafrudin, 2006 3. Kodoatie, 2003	Sumber pembiayaan yang digunakan untuk pengelolaan sampah	Besarnya retribusi kebersihan, kemampuan membayar
D.	Peran serta masyarakat	1. Syafrudin, 2006 2. Cipta karya, 1993 3. Kodoatie, 2003	Keikutsertaan masyarakat baik aktif maupun pasif dalam pengelolaan sampah	Kesadaran membayar retribusi, penyediaan wadah, kebersihan lingkungan.
E.	Hukum & Perundangan	1. Syafrudin, 2006 2. Cipta karya	Aspek peraturan memegang peranan penting dalam karena merupakan dasar hukum dalam pengelolaan sampah.	Peraturan tentang kebersihan. Perda Badan Pengelola.
III.	Kinerja Dalam Pengelolaan.	Mulyadi, 2006 Nurmandi, 1999	<i>Performance</i> atau hasil yang diharapkan dari kegiatan pengelolaan sampah. Dapat diukur dengan kualitas atau tingkat capaian pelayanan sampah.	Tingkat kinerja, jangkauan pelayanan, sampah terangkut, sarana prasarana, jumlah personil, luas daerah layanan, penduduk terlayani.

1	2	3	4	5
IV.	Persepsi terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah	Wojowasito, 1982 Boedjo, 1986 Daldjoeni, 1997 Rahmat, 1996	Pendapat, penilaian atau tanggapan masyarakat terhadap hasil yang diharapkan atau kinerja pengelolaan sampah dan terkait kualitas pelayanan sampah.	Persepsi terhadap kondisi kebersihan, peralatan, personil, kepuasan pelayanan.

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan rangkuman kajian teori di atas, maka variabel dan indikator kinerja pengelolaan sampah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagaimana tabel II.6 Indikator kinerja pengelolaan sampah dan tabel II.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah, berikut ini :

TABEL II.6
INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

NO	Sasaran	Variabel	Indikator
1.	Penilaian kinerja pengelolaan sampah berdasarkan Standar normatif	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah sampah terangkut ▪ Penduduk terlayani ▪ Luas daerah terlayani
2	Penilaian kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat	Kualitas Pengelolaan Sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi kebersihan jalan 2. Kondisi kebersihan drainase 3. Kondisi kebersihan pasar. 4. Kondisi kebersihan TPS 5. Kondisi fisik TPS 6. Jumlah TPS/Kontainer 7. Penempatan TPS/Kontainer 8. Waktu pengumpulan sampah 9. Kondisi alat pengumpulan sampah 10. Jumlah alat pengumpulan 11. Waktu pengangkutan sampah 12. Kondisi alat pengangkutan 13. Kualitas petugas kebersihan 14. Jumlah petugas kebersihan 15. Keluhan pelanggan

Sumber: Hasil Analisis

TABEL II.7
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH

SASARAN	VARIABEL
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Teknis 2. Aspek Kelembagaan 3. Aspek Pembiayaan 4. Aspek Peran Serta Masyarakat 5. Aspek Hukum

Sumber: Hasil Analisis

BAB. III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN DAN KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH

3.1. Gambaran Umum Kota Gombong

Kota Gombong secara administrasi termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen, dan terletak cukup strategis pada jalur utama lintas selatan Jakarta-Yogyakarta pada jarak 21 km di sebelah barat Kota Kebumen. Berdasarkan pada sistem perkotaan daerah Kebumen, terlihat bahwa fungsi dan peranan Kota Gombong adalah sebagai pusat dari wilayah pembangunan yaitu Sub Wilayah II (SWP II), yang merupakan wilayah pengembangan efektif yang tidak mencakup kawasan yang direncanakan sebagai kawasan lindung dan Pusat SWP adalah kota yang mempunyai hirarki yang tinggi dan tingkat aksibilitas yang tinggi.

Secara admistrasi, batas wilayah Kota Gombong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Sempor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Karanganyar dan Karanggayam.
- Sebelah Barat : Kecamatan Rowokele.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Buayan, Adimulyo dan Kuwarasan.

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Gombong Tahun 1996/1997-2016/2017 sebagaimana gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Gombong, wilayah Kota Gombong terdiri atas 2 Kelurahan dan 27 Desa dengan luas wilayah 5.345,83 ha yang secara administrasi wilayah Kota Gombong terdiri dari Kecamatan Gombong dan sebagian wilayah 5 Kecamatan dengan desanya yaitu :

Peta Administrasi

I. KECAMATAN GOMBONG

1. Kelurahan Gombang
2. Kelurahan Wonokriyo
3. Desa Kalitengah
4. Desa Kemukus
5. Desa Semanding
6. Desa Sedayu
7. Desa Banjarsari
8. Desa Kedungpuji
9. Desa Wero
10. Desa Patemon
11. Desa Panjangsari
12. Desa Klopogodo
13. Desa Wonosigro
14. Desa Semono

II. KECAMATAN SEMPOR

15. Desa Selokerto
16. Desa Sidoharum

17. Desa Jatinegoro
18. Desa Bejiruyung
19. Desa Pekuncen

III. KECAMATAN KUWARASAN

20. Desa Wonoyoso
21. Desa Gunungmujil

V. KECAMATAN ROWOKELE

22. Desa Sukomulyo

IV. KECAMATAN BUAYAN

23. Desa Purbowangi
24. Desa Semampir
25. Desa Jatiroto
26. Desa Ngoraji
27. Desa Mergosono

VI. KECAMATAN KARANGANYAR

28. Desa Sidomulyo
29. Desa Grenggeng

3.2. Keadaan Geografis dan Kependudukan

Secara Geografis, Kota Gombang terletak di antara 7°36'00' LS dan 109°30'12' BT, serta terletak pada ketinggian \pm 10 m sampai dengan 18 m di atas permukaan laut, mempunyai kemiringan relatif datar antara 2 – 5 % dan temperatur rata-rata 24°C. Beberapa sungai yang melintasi Kota Gombang yaitu sungai Kruwed, sungai Gombang dan sungai Salam yang akhirnya bermuara ke Samudera Indonesia.

Jumlah penduduk Kota Gombang pada tahun 2005 adalah sebesar 107.590 jiwa, tersebar di wilayah kota dengan kepadatan bervariasi tiap desa/kelurahan. Adapun penyebaran penduduk dan kepadatan masing-masing desa/kelurahan dapat di lihat pada tabel III.1 berikut:

TABEL III. 1
PENYEBARAN JUMLAH PENDUDUK DAN
KEPADATAN PENDUDUK

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Ha)	Luas Terbangun (Ha)	Kepadatan Kotor (Jiwa/ha)	Kepadatan Bersih (Jiwa/ha)
A.	KEC. GOMBONG					
1	Kelurahan Gombang	6,053	125.00	41.75	48	145
2	Kelurahan Wonokriyo	6,740	121.00	52.75	56	128
3	Desa Kalitengah	5,226	165.80	56.19	32	93
4	Desa Kemukus	3,590	197.00	36.67	18	98
5	Desa Semanding	5,260	171.00	63.00	31	83
6	Desa Sedayu	2,572	76.06	40.34	34	64
7	Desa Banjarsari	1,783	162.00	44.10	11	40
8	Desa Kedungpuji	3,054	131.47	51.03	23	60
9	Desa Wero	3,579	132.08	64.28	27	56
10	Desa Patemon	2,677	127.00	47.53	21	56
11	Desa Panjangsari	2,050	166.62	46.13	12	44
12	Desa Klopogodo	3,151	125.00	33.03	25	95
13	Desa Wonosigro	2,338	126.04	32.60	19	72
14	Desa Semondo	3,373	123.00	30.75	27	110
B.	KEC. SEMPOR					
15	Desa Selokerto	5,078	146.00	48.00	35	106
16	Desa Sidoharum	4,130	210.00	67.00	20	62
17	Desa Jatinegoro	4,586	244.00	95.95	19	48
18	Desa Bejiruyung	2,992	226.00	80.00	13	37
19	Desa Pekuncen	2,694	130.00	39.96	21	67
C.	KEC. KUWARASAN					
20	Desa Wonoyoso	2,514	128.00	66.18	20	38
21	Desa Gunungmujil	3,640	186.10	49.35	20	74
D.	KEC. ROWOKELE					
22	Desa Sukomulyo	5,939	496.00	290.00	12	20
E.	KEC. BUAYAN					
23	Desa Purbowangi	5,770	214.00	76.00	27	76
24	Desa Semampir	1,209	82.00	35.00	15	35
25	Desa Jatiroto	3,523	182.00	108.00	19	33
26	Desa Ngoraji	4,373	382.00	128.50	11	34
27	Desa Mergosono	2,677	176.00	56.79	15	47
F.	KEC. KARANGANYAR					
28	Desa Sidomulyo	1,501	144.66	69.96	10	21
29	Desa Grenggeng	5,518	450.00	153.40	12	36
		107,590	5,345.83	2,004.24		

Sumber: Kantor Pusat Statistik, 2005 di olah

3.3. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah Di Kota Gombang

3.3.1. Aspek Kelembagaan

Instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Kota Gombang adalah Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah (Dinas Kimprasda) Kabupaten Kebumen. Sedangkan untuk operasionalnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kimprasda Wilayah Gombang. Salah satu tugas pokoknya adalah dalam kebersihan, pertamanan dan keindahan kota.

Secara formal penentuan tugas dan fungsi lembaga tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen. Apabila dipandang dari sudut pandang kewenangan sebenarnya lembaga pengelola persampahan tersebut telah mengalami penurunan wewenang. Hal ini disebabkan sebelum tahun 2001, pengelolaan sampah di Kabupaten Kebumen dikelola oleh Dinas tersendiri yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Jumlah personil/tenaga kebersihan yang melayani kebersihan di Kota Gombang sebagaimana tabel III. 2 berikut ini :

TABEL III.2
JUMLAH PEGAWAI DAN TENAGA KEBERSIHAN

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH ORANG
1.	Kepala UPT	1
2.	Koordinator	1
3.	Administrasi	5
4.	Mandor	2
5.	Petugas retribusi	3
6.	Petugas penyapuan	4
7.	Sopir dump truck	2
8.	Sopir Amroll truck	1

Lanjutan:

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH ORANG
9.	Tenaga awak truck/pengumpul	10
10.	Penjaga transfer	1
11.	Petugas di TPA	1
	JUMLAH	31

Sumber : UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong

3.3.2. Aspek Hukum

Untuk menyelenggarakan tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bidang kebersihan maka telah diterbitkan beberapa Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 19 Tahun 1993 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 30 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen.

3.3.3. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan pengelolaan sampah sampai saat ini sebagian besar masih dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Bidang Kebersihan dan Pertamanan maupun UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong, besarnya biaya operasional persampahan pada saat ini mencapai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah) per bulan, sedangkan pendapatan dari Retribusi pada tahun tersebut rata-rata sebesar Rp.1.450.000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Besarnya retribusi menurut Perda Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan, adalah sebagaimana Tabel III.3 sebagai berikut:

TABEL III.3
TARIF RETRIBUSI KEBERSIHAN

NO	Jenis Obyek	Besaran Retribusi (Rp)
A.	Rumah Tinggal	
	Tipe R.1	300
	Tipe R.2	750
B.	Tempat Usaha	
	Tipe U.1	10.000
	Tipe U.2	5.000
	Tipe U.3	3.000
	Tipe U.4	2.000
	Tipe U.5	1.000
C.	Tempat Umum	
	Tipe TU 1	5.000
	Tipe TU 2	3.000
	Tipe TU 3	2.000
	Tipe TU 4	100
	Tipe TU 5	50
D.	Pedagang Pasar dan Kaki Lima	
	Golongan A	50
	Golongan B	100
	Golongan C	150

Sumber : Perda Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 1996

3.3.4. Aspek Teknik Operasional

3.3.4.1 Komposisi dan Timbulan Sampah

Berdasarkan komposisinya, bagian terbesar sampah Kota Gombang berupa sampah organik. Jenis sampah organik ini mendominasi terhadap sampah keseluruhan maupun sampah yang berasal dari berbagai sumber (rumah tangga,

jalan, pasar). Adapun komposisi sampah Kota Gombong dapat dilihat pada tabel III.4 sebagai berikut.

TABEL III.4
KOMPOSISI SAMPAH KOTA GOMBONG

NO	JENIS SAMPAH	PROSENTASE
1.	Sampah organik	55,61
2.	Plastik	14,01
3.	Gelas/kaca	1,13
4.	Logam	0,65
5.	Kayu/Bambu	1,39
6.	Kertas	23,54
7.	Kain/Tekstil	0,84
8.	Karet	0,20
9.	Lain-lain	2,63

Sumber: Studi Lokasi TPA Kota Gombong, 1997

Dalam pengelolaan sampah, besar timbulan sampah dapat digunakan untuk memprediksi sampah yang dihasilkan dimasa mendatang, sehingga dapat digunakan untuk merencanakan besar volume sampah yang akan dilayani. Besar timbulan sampah di Kota Gombong dapat disajikan dalam tabel III.5 berikut ini.

TABEL III . 5
JUMLAH TIMBULAN SAMPAH

NO	Jenis Sampah	Timbulan Sampah
		L/org/hr
1.	Permukiman	1,8542
2.	Kantor	0,0033
3.	Toko/kios/warung	0,736
4.	Sarana pendidikan	0,0148
5.	Jalan	0,1453
6.	Pasar	0,2529
7.	Industri	0,1127
8.	Rumah makan	0,0028
9.	Warung makan	0,0023
10.	Sarana kesehatan	0,0128
11.	Tempat hiburan	0,0008
12.	Losmen	0,0022
	Jumlah	2,4780

Sumber: Studi Analisis TPA Kota Gombong 1997.

3.3.4.2 Sistem Pewadahan, Pengumpulan dan Pengangkutan

Alat pewadahan yang digunakan untuk menampung sampah di Kota Gombong belum mempunyai jenis dan bentuk yang seragam, masih bervariasi baik untuk daerah permukiman, komersial, maupun tempat umum lainnya. Sistem pewadahan pada sumber sampah antara lain berupa tong/bin besi, tong plastik, kantong plastik, keranjang, pasangan bata dan lubang tanah/penimbunan. Untuk daerah pertokoan dan ruko pada umumnya menggunakan kantong plastik yang langsung ikut dibuang serta menggunakan keranjang bekas. Sistem pewadahan sampah di Kota Gombong dapat di lihat pada Gambar 3.2. Secara umum penempatan wadah sampah telah memenuhi persyaratan operasional yang memudahkan petugas untuk mengumpulkan ke dalam alat pengumpul (becak/gerobag sampah).

Sarana yang digunakan untuk pengumpulan sampah adalah menggunakan becak sampah kapasitas rata-rata 1 m³. Sedangkan kondisi wadah sampah sebagian besar masih terbuka dan belum ada pemisahan antara sampah basah dan sampah kering.



Sumber : Foto September, 2006

GAMBAR 3.2
SISTEM PEWADAHAN SAMPAH

Metode pengumpulan yang diterapkan di Kota Gombong saat ini ada dua macam yaitu :

1. Pengumpulan tak langsung, dimana sampah dikumpulkan dari sumber sampah menggunakan becak sampah selanjutnya diangkut ke TPS. Cara ini berlaku pada penyapuan jalan, daerah permukiman, pasar dan sebagian perkantoran.
2. Pengumpulan langsung, dimana sampah dari setiap sumber sampah langsung diangkut ke TPA dengan truk pengangkut sampah (*dump truck*) tanpa melalui pemindahan ke TPS. Cara ini berlaku pada kawasan pertokoan.

Sistem pengangkutan yang diterapkan pada pengelolaan sampah di Kota Gombong adalah dengan menggunakan *Arm roll truck* dengan kontainer yang dapat berpindah-pindah dan sistem yang menggunakan *Dump Truck* yang melayani pengangkutan sampah dari transfer depo yang ada di pasar Wonokriyo, bak sampah atau TPS pasangan batu bata yang ada di wilayah kota.

Peralatan yang digunakan dalam pengelolaan sampah di Kota Gombong sangat berpengaruh pada kualitas pengelolaan sampah. Adapun kondisi peralatan yang ada di Kota Gombong sebagaimana tabel III.6

TABEL III . 6
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH

NO	Sarana Prasara	Jumlah	Kapasitas	Kondisi
1.	Amrol truk	1	-	Baik
2.	Dump Truk	2	7 m ³	Baik
3.	Becak Sampah	7	1 m ³	Baik
4.	TPS Batu Bata	51	1 – 6 m ³	Baik
5.	Kontainer	4	6 m ³	Baik
6	Transfer depo	1	200m ²	Baik

Sumber: UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong

Adapun kondisi sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah yang meliputi *dump truck*, TPS, kontainer dan transfer depo adalah sebagaimana gambar 3.3 berikut.



Sumber : Foto September 2006

GAMBAR 3.3
SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN

3.3.4.3 Tempat Pembuangan Akhir

Tempat pembuangan akhir sampah Kota Gombong adalah di Desa Semali Kecamatan Sempor dengan luas 30.200 m² terletak \pm 10 km sebelah utara kota Gombong, sedangkan operasional pemakaian TPA dimulai tahun 1999. Menurut rencana diperkirakan operasional TPA mampu menampung timbunan sampah Kota Gombong sampai dengan tahun 2007 apabila sistem yang digunakan menggunakan sanitasi landfill.

Dari sistem pengolahan sampah yang direncanakan dengan menggunakan sistem sanitary landfill namun saat ini digunakan sistem pembuangan terbuka atau *open dumping* dimana sampah ditempatkan disuatu lahan terbuka kemudian ditimbun begitu saja tanpa ada pengolahan lebih lanjut sehingga menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Gombong saat ini dapat dilihat pada gambar 3.4 seperti dibawah ini.



Sumber : Foto September 2006

GAMBAR 3.4
TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SEMALI

3.3.4.4 Jangkauan Pelayanan Sampah

Sampah terangkut adalah volume sampah yang diangkut oleh kendaraan pengangkut sampah ke TPA. Karena semua sampah yang dibuang ke TPA melalui kendaraan pengangkut baik *dump truck* maupun *arm roll truck*. Sampah-sampah tersebut berasal dari dari bermacam-macam sumber penghasil sampah yaitu permukiman, perkantoran, toko/kios/warung, sarana pendidikan, penyapuan jalan pasar, rumah makan, warung makan, industri, sarana kesehatan dan tempat hiburan. Sedangkan lingkup wilayah pelayanan sampah saat ini meliputi 6 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Wonokriyo, Kelurahan Gombong, Desa Wero, Desa Semanding, Desa Semondo Kecamatan Gombong dan Desa Selokerto Kecamatan Sempor.

3.3.5. Luas Wilayah, Kependudukan dan Fasilitas Umum Wilayah di Daerah Pelayanan

Luas Wilayah Daerah yang sudah mendapat pelayanan sampah dapat disajikan dalam tabel III.7. berikut ini:

TABEL III. 3.7
KEPADATAN PENDUDUK DI DAERAH PELAYANAN

NO	DESA/KEL	LUAS WIL ADM (Ha)	LUAS DAERAH TERBANGUN	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN BERSIH (JIWA/Ha)
1	GOMBONG	125	41.75	6,053	145
2	WONOKRIYO	121	52.75	6,740	128
3	WERO	132.08	64.28	3,579	56
4	SEMANDING	171	63	5,260	83
5	SEMONDO	123	30.75	3,373	110
6	SELOKERTO	146	48	5,078	106
	6 DESA / KEL.	818	300.53	30,083.00	100

Sumber : Kecamatan Gombong dan Kecamatan Sempor dalam Angka 2005, dianalisis

Sedangkan jumlah fasilitas permukiman di daerah pelayanan sampah di Kota Gombong dapat disajikan dalam tabel III.8 Fasilitas permukiman di daerah pelayanan, sebagai berikut.

TABEL III. 8
FASILITAS PEMUKIMAN DI DAERAH PELAYANAN

NO	DESA/KEL	Jenis Rumah			Jumlah
		Permanen	Semi Permanen	Tidak Perm	
1	GOMBONG	844	219	111	1,174
2	WONOKRIYO	712	125	62	899
3	WERO	588	97	18	703
4	SEMANDING	1125	21	32	1,178
5	SEMONDO	520	87	200	807
6	SELOKERTO	876	100	253	1,229
	6 DESA / KEL.	4,665	649.00	676.00	5,990

Sumber : Kecamatan Gombong dan Kecamatan Sempor dalam Angka 2005, dianalisis

Adapun fasilitas non permukiman di daerah pelayanan meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian seperti disajikan dalam tabel III.9 Fasilitas non permukiman, sebagai berikut ini:

TABEL III. 9
FASILITAS NON PEMUKIMAN DI DAERAH PELAYANAN

NO	DESA/KEL	SARANA PERKOTAAN			
		Pendidikan	Kesehatan	Perekonomian	Jumlah
1	GOMBONG	16	2	216	234
2	WONOKRIYO	7	2	186	195
3	WERO	9	1	29	39
4	SEMANDING	8	0	31	39
5	SEMONDO	5	2	14	21
6	SELOKERTO	5	0	60	65
	6 DESA / KEL.	50	7.00	536.00	593

Sumber: Kecamatan Gombong dan Kecamatan Sempor Dalam Angka 2005

3.4. Karakteristik Responden Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota

Gombong

3.4.1. Karakteristik Usia Responden

Karakteristik usia responden dari masyarakat kota Gombong baik dari kawasan permukiman maupun non permukiman berkisar adalah sebagaimana tabel III.10 berikut.

TABEL III. 10
DISTRIBUSI FREKUENSI USIA

TINGKAT USIA	FREKUENSI	PROSENTASE	PROSENTASE KUMULATIF
20 s/d 30 tahun	19	19,2	19,2
Lebih dari 30 – 40 tahun	41	41,4	60,6
Lebih dari 40 – 50 tahun	15	15,2	75,8
Lebih dari 50 tahun	24	24,2	100
Total	99	100	

Sumber: Hasil analisis data primer

Dari tabel di atas, prosentase usia paling besar adalah usia 30 sampai dengan 40 tahun yaitu 51,4 %, sedangkan untuk usia 20 sampai dengan lebih dari 50 tahun prosentase tidak jauh berbeda.

3.4.2. Karakteristik Tingkat Pendidikan

Dari data penelitian menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di kota Gombong meliputi tamat Sekolah Dasar sampai dengan Sarjana, sebagaimana tabel III.11 distribusi frekuensi berikut:

TABEL III. 11
DISTRIBUSI FREKUENSI TINGKAT PENDIDIKAN

TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUENSI	PROSENTASE	PROSENTASE KUMULATIF
Tamat SD	4	4	4
Tamat SMP	8	8,1	12,1
Tamat SLTA	50	50,5	62,6
Tamat D3/Sarjana Muda	13	13,1	75,8
Sarjana	24	24,2	100
Total	99	100	

Sumber: Hasil analisis data primer

Dari tabel distribusi frekuensi di atas didapatkan mayoritas masyarakat berpendidikan Tamat SLTA sebanyak 50,5 %, untuk tamat D3 atau Sarjana muda sebanyak 13,1 % dan untuk sarjana mencapai 24,2 %. Sedangkan untuk tamat SD dan SLTP mencaai 12,1 %. Dari prosentase tersebut, mayoritas tingkat pendidikan masyarakat adalah menengah ke atas sehingga dengan pengetahuannya diharapkan dapat melakukan penilaian kinerja secara obyektif.

3.4.3. Karakteristik Pekerjaan

Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat selaku responden dapat diperoleh karakteristik jenis pekerjaan masyarakat sebagaimana tabel III.12

TABEL III. 12
DISTRIBUSI FREKUENSI JENIS PEKERJAAN

PEKERJAAN	FREKUENSI	PROSENTASE	PROSENTASE KUMULATIF
PNS/TNI /POLRI	7	7,1	7,1
Karyawan Swasta	27	27,3	34,3
Pensiunan	12	12,1	46,5
Buruh	14	14,1	60,6
Pedagang	6	6,1	66,7
Wiraswasta	29	29,3	96
Petani	4	4	100
Total	99	100	

Sumber: Hasil analisis

Dari tabel di atas mayoritas responden mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta dan wiraswasta yaitu 56,6 % sedangkan untuk PNS/TNI/POLRI dan Pensiunan mencapai 19,2 % sedangkan sisanya didominasi oleh buruh, pedagang dan petani. Dari prosentase di atas, jenis pekerjaan yang banyak didominasi oleh karyawan swasta, wiraswasta dan Pegawai Negeri diharapkan dapat memberikan penilaian pengelolaan sampah secara lebih obyektif.

3.4.4. Karakteristik Tingkat Penghasilan dan Pengeluaran

Tingkat penghasilan masyarakat akan mempengaruhi tingkat konsumsi yang akan berpengaruh pula terhadap produksi sampah. Berdasarkan hasil penelitian maka penghasilan masyarakat sebagaimana tabel III.13 berikut ini.

TABEL III. 13
DISTRIBUSI FREKUENSI TINGKAT PENGHASILAN

TINGKAT PENGHASILAN	FREKUENSI	PROSENTASE	PROSENTASE KUMULATIF
Kurang dari Rp. 500.000.	23	23,5	23,5
Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	38	38,8	62,2
Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	30	30,6	92,9
Lebih dari Rp. 2.000.000	7	7,1	100
Total	98	100	

Sumber: Hasil analisis

Dari tabel di atas mayoritas masyarakat berpenghasilan antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000,-

Tingkat biaya pengeluaran masyarakat akan mencerminkan tingkat konsumsi yang akan berpengaruh pula terhadap produksi sampah. Berdasarkan hasil penelitian maka tingkat pengeluaran masyarakat sebagaimana tabel III.14 berikut ini.

TABEL III. 14
DISTRIBUSI FREKUENSI TINGKAT PENGELUARAN

PENGELUARAN	FREKUENSI	PROSENTASE	PROSENTASE KUMULATIF
Kurang dari Rp. 500.000,-	27	27,6	27,6
Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000	45	45,9	73,5
Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	21	21,4	94,9
Lebih dari Rp. 2.000.000	5	5,1	100
Total	98	100	

Sumber: Hasil analisis

Dari tabel di atas menunjukkan biaya pengeluaran mayoritas masyarakat Kota Gombong antara Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000,-.

3.4.5. Karakteristik Jumlah Anggota Keluarga

Karakteristik jumlah keluarga di Kota Gombong dapat dilihat pada tabel III.15 sebagai berikut:

TABEL III. 15
DISTRIBUSI FREKUENSI JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
(PENGHUNI RUMAH)

JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	FREKUENSI	PROSENTASE	PROSENTASE KUMULATIF
3	23	25,5	25,5
4	36	36,7	62,2
5	24	24,5	86,7
6	8	8,2	94,9
7	4	4,1	99
8	1	1	100
Total	98	100	

Sumber: Hasil analisis data primer

Dari tabel III.15 menunjukkan mayoritas penghuni rumah antara 4 sampai 5 jiwa atau 70,2 %.

BAB. IV

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini mengkaji produksi sampah, kondisi sarana dan prasarana persampahan, kinerja pengelolaan sampah berdasarkan standar normatif, kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah. Disamping itu, dilakukan pula analisis komprehensif kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong.

4.1. Analisis Produksi Sampah dan Jangkauan Pelayanan Sampah di Kota Gombong

Analisis produksi sampah di Kota Gombong bertujuan untuk mengetahui besarnya produksi sampah yang dihasilkan, baik dari kegiatan permukiman maupun non permukiman. Disamping itu, juga untuk mengetahui penyebaran produksi sampah yang ada di Gombong. Analisis jangkauan pelayanan sampah, bertujuan untuk mengetahui atau mengkaji Desa/Kelurahan yang membutuhkan pelayanan sampah berdasarkan pada produksi sampah yang dihasilkan serta kepadatan penduduk.

4.1.1. Analisis Produksi Sampah

Besarnya produksi sampah di Kota Gombong dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan besarnya timbulan sampah rata-rata per orang setiap hari. Adapun timbulan sampah rata-rata per orang per hari menurut SK SNI

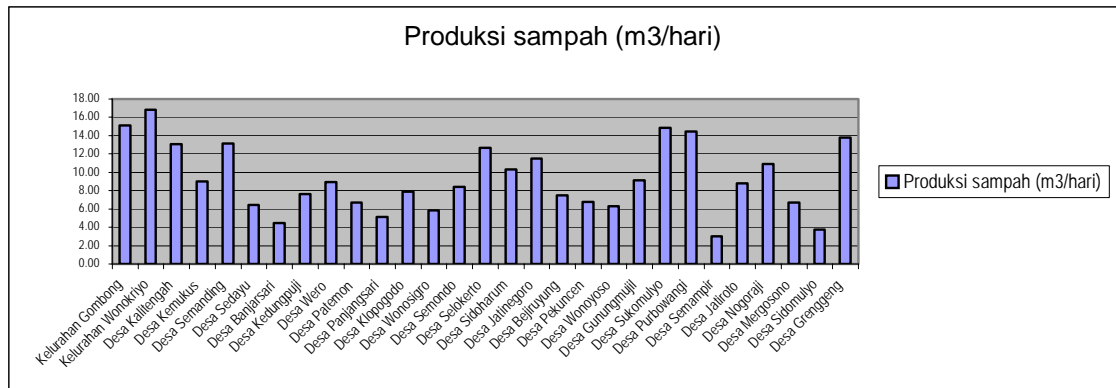
S-04-1993-03 tentang timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia adalah sebesar 2,5–2,75 liter/orang/hari.

Berdasarkan pengolahan data, jumlah penduduk Kota Gombong saat ini adalah sebesar 107.590 jiwa, sehingga dengan asumsi timbulan sampah sebesar 2,5 liter/orang/hari maka produksi sampah di Kota Gombong yang bersumber dari permukiman mencapai 268,98 m³/hari. Besarnya produksi sampah yang dirinci setiap Desa/Kelurahan di Kota Gombong dapat dilihat pada tabel IV.1 dan gambar 4.1 berikut ini.

TABEL IV.1
PRODUKSI SAMPAH KOTA GOMBONG

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Ha)	Luas Terbangun (Ha)	Kepadatan bersih	Produksi Sampah m3/hari
A.	KEC. GOMBONG					
1	Kelurahan Gombong	6,053	125.00	41.75	145	15.13
2	Kelurahan Wonokriyo	6,740	121.00	52.75	128	16.85
3	Desa Kalitengah	5,226	165.80	56.19	93	13.07
4	Desa Kemukus	3,590	197.00	36.67	98	8.98
5	Desa Semanding	5,260	171.00	63.00	83	13.15
6	Desa Sedayu	2,572	76.06	40.34	64	6.43
7	Desa Banjarsari	1,783	162.00	44.10	40	4.46
8	Desa Kedungpuji	3,054	131.47	51.03	60	7.64
9	Desa Wero	3,579	132.08	64.28	56	8.95
10	Desa Patemon	2,677	127.00	47.53	56	6.69
11	Desa Panjangsari	2,050	166.62	46.13	44	5.13
12	Desa Klopogodo	3,151	125.00	33.03	95	7.88
13	Desa Wonosigro	2,338	126.04	32.60	72	5.85
14	Desa Semono	3,373	123.00	30.75	110	8.43
B.	KEC. SEMPOR					
15	Desa Selokerto	5,078	146.00	48.00	106	12.70
16	Desa Sidoharum	4,130	210.00	67.00	62	10.33
17	Desa Jatinegoro	4,586	244.00	95.95	48	11.47
18	Desa Bejiruyung	2,992	226.00	80.00	37	7.48
19	Desa Pekuncen	2,694	130.00	39.96	67	6.74
C.	KEC. KUWARASAN					
20	Desa Wonoyoso	2,514	128.00	66.18	38	6.29
21	Desa Gunungmujil	3,640	186.10	49.35	74	9.10
D.	KEC. ROWOKELE					
22	Desa Sukomulyo	5,939	496.00	290.00	20	14.85
E.	KEC. BUAYAN					
23	Desa Purbowangi	5,770	214.00	76.00	76	14.43
24	Desa Semampir	1,209	82.00	35.00	35	3.02
25	Desa Jatiroto	3,523	182.00	108.00	33	8.81
26	Desa Ngoraji	4,373	382.00	128.50	34	10.93
27	Desa Mergosono	2,677	176.00	56.79	47	6.69
F.	KEC. KARANGANYAR					
28	Desa Sidomulyo	1,501	144.66	69.96	21	3.75
29	Desa Grenggeng	5,518	450.00	153.40	36	13.80
		107,590	5,345.83	2,004.24		268.98

Sumber: Kantor Pusat Statistik, 2005 dan hasil analisis



Sumber : Hasil Analisis

GAMBAR 4.1 PRODUKSI SAMPAH DI KOTA GOMBONG

Dari tabel maupun grafik di atas, maka dapat diketahui produksi sampah tertinggi yang bersumber dari permukiman adalah di Kelurahan Wonokriyo sebesar 16,850 m³/hari dan yang terendah adalah di Desa Semampir sebesar 3,02 m³/hari. Selain Kelurahan Wonokriyo, produksi sampah yang cukup tinggi adalah di Kelurahan Gombong, Desa Semanding dan Desa Selokerto. Hal ini karena Desa/Kelurahan tersebut berada di pusat kota serta mempunyai penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong maupun hasil pengamatan lapangan, diperkirakan produksi sampah dari kegiatan non permukiman mencapai ± 10 m³/hari. Produksi sampah non permukiman ini bersumber dari warung, pasar, pertokoan, dan fasilitas kesehatan. Penyebaran produksi sampah non permukiman tersebut, sebagian besar berada di wilayah Kelurahan Wonokriyo dan Gombong. Hal ini karena fasilitas kota Gombong terpusat di 2 Kelurahan tersebut. Dengan demikian produksi sampah di Kelurahan Wonokriyo dan Gombong lebih besar jumlahnya dibanding dengan Desa-desa yang lain.

4.1.2. Analisis Lingkup Pelayanan Sampah

Prioritas pelayanan sampah adalah daerah yang mempunyai kepadatan minimal 50 jiwa/ha (P3KT, dalam Waluyo, 2003). Dengan demikian tidak semua Desa/Kelurahan yang mempunyai produksi sampah tinggi perlu mendapatkan pelayanan sampah. Daerah dengan kepadatan bersih di bawah 50 jiwa/ha, masyarakat dapat mengelola sampahnya sendiri, karena mempunyai lahan yang cukup luas. Disamping itu, daerah yang memiliki kepadatan dibawah 50 jiwa/ha di Kota Gombong pada umumnya adalah daerah yang jauh dari pusat kota.

Selain berdasarkan kepadatan penduduk, penentuan daerah pelayanan juga harus memperhatikan kondisi daerah seperti daerah komersial, jalan protokol dan pasar yang harus mendapatkan prioritas pelayanan 80 % - 100 % (P3KT). Jadi meskipun daerah tersebut kepadatannya kurang dari 50 jiwa/hektar, tetap harus mendapatkan pelayanan sampah.

Jangkauan pelayanan sampah yang ada saat ini di Kota Gombong meliputi 6 Kelurahan/Desa yaitu Kelurahan Wonokriyo, Kelurahan Gombong, Desa Wero, Desa Semanding dan Desa Semanda Kecamatan Gombong serta Desa Selokerto Kecamatan Sempor. Penentuan daerah pelayanan sampah saat ini sebenarnya sudah tepat, yang ditunjukan dengan kondisi Desa/Kelurahan tersebut mempunyai kepadatan bersih lebih dari 50 jiwa/ha. Selain itu, karena Desa/Kelurahan tersebut merupakan pusat kota dan mempunyai fasilitas non permukiman seperti pasar, pertokoan dan lain-lain maka harus mendapatkan pelayanan yang intensif.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk Kota Gombong seperti pada tabel IV.1, Desa/Kelurahan yang mempunyai kepadatan bersih di atas 50 jiwa/ha meliputi 17 Desa/Kelurahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan untuk

jangkauan pelayanan sampah yang ideal seharusnya mencapai 17 Desa/Kelurahan, yaitu:

KECAMATAN GOMBONG

1. Kelurahan Gombang
2. Kelurahan Wonokriyo
3. Desa Kalitengah
4. Desa Kemukus
5. Desa Semanding
6. Desa Sedayu
7. Desa Kedungpuji
8. Desa Wero
9. Desa Patemon
10. Desa Klopogodo
11. Desa Wonosigro
12. Desa Semondo

KECAMATAN SEMPOR

13. Desa Selokerto
14. Desa Sidoharum
15. Desa Pekuncen

KECAMATAN KUWARASAN

16. Desa Gunungmujil

KECAMATAN BUAYAN

17. Desa Purbowangi

Adapun letak Desa/Kelurahan yang perlu mendapatkan prioritas pelayanan sampah dapat dilihat pada gambar 4.2 Peta Desa/Kelurahan yang perlu pelayanan sampah.

Oleh karena itu, dengan jangkauan pelayanan sampah saat ini yang hanya mencakup 6 Desa/Kelurahan sebenarnya masih kurang mencukupi sehingga perlu menambah daerah pelayanan menjadi 17 Desa/Kelurahan.

4.1.3. Rangkuman Analisis Produksi Sampah dan Jangkauan Pelayanan Sampah

Rangkuman hasil analisis produksi sampah maupun jangkauan pelayanan sampah di Kota Gombang adalah sebagai berikut:

1. Produksi sampah di Kota Gombang, yaitu:
 - a. Produksi sampah di kota Gombang yang sebagian besar dari daerah permukiman mencapai 268,98 m³/hari atau dibulatkan 269 m³/hari,

sedangkan yang bersumber dari daerah non permukiman mencapai $10 \text{ m}^3/\text{hari}$, sehingga total produksi sampah adalah sebesar $279 \text{ m}^3/\text{hari}$.

- b. Penyebaran produksi sampah tertinggi di Kota Gombong adalah di Kelurahan Wonokriyo yang mencapai $16,85 \text{ m}^3/\text{hari}$ dan yang terendah di Desa Sumampir yaitu $3,02 \text{ m}^3/\text{hari}$, sedangkan sampah yang berasal dari non permukiman banyak terpusat di Kelurahan Gombong dan Wonokriyo sebesar $\pm 10 \text{ m}^3/\text{hari}$.

2. Jangkauan pelayanan sampah, yaitu:

- a. Daerah pelayanan sampah saat ini sebanyak 6 Desa/Kelurahan sudah cukup tepat karena mempunyai kepadatan yang cukup tinggi di atas 50 jiwa/hektar.
- b. Berdasarkan kriteria daerah pelayanan sampah adalah minimal memiliki kepadatan 50 jiwa/Ha, maka secara keseluruhan Desa/Kelurahan yang prioritas mendapatkan pelayanan sampah meliputi 17 Desa/Kelurahan, sehingga dengan cakupan pelayanan sampah saat ini yang hanya 6 Desa/Kelurahan masih sangat kurang.

4.2. Analisis Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Kondisi sarana prasarana pengelolaan sampah di Kota Gombong yang dianalisis meliputi sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan.

4.2.1. Pewadahan

Jenis wadah yang digunakan untuk menampung sampah, baik di daerah permukiman maupun non permukiman di Kota Gombong sebagian besar

disediakan oleh masyarakat sendiri, kecuali untuk wadah sampah di jalan protokol dan fasilitas umum, sebagian besar disediakan oleh Pemerintah. Jenis wadah sampah yang digunakan yaitu keranjang bambu, tong (bin), bak pasangan batu bata, kantong plastik dan lubang sampah atau penimbunan. Khusus untuk lubang sampah sekaligus berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah.

Menurut Thobanoglous (1993), sistem pewadahan harus memperhatikan jenis sarana pewadahan yang digunakan, lokasi penempatan sarana pewadahan, keindahan dan kesehatan lingkungan. Menurut SK SNI T-13-1990-F, persyaratan sarana pewadahan adalah tidak mudah rusak dan kedap air kecuali kantong plastik atau kertas, mudah diperbaiki, ekonomis/mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat, serta mudah dan cepat dikosongkan.

Adapun analisis terhadap masing-masing jenis pewadahan yang ada di Kota Gombong adalah sebagai berikut:

1. Keranjang Bambu

Penggunaan wadah sampah dari keranjang bambu di Kota Gombong sebagian besar digunakan di kawasan pertokoan yang terletak di jalan protokol. Namun sebagian ada juga yang digunakan pada daerah permukiman.

Wadah sampah dari keranjang bambu mempunyai kelebihan yaitu dari sisi harga sangat ekonomis. Disamping itu, wadah ini mudah untuk dikosongkan, sehingga mempercepat operasional pada sistem pengumpulan yang dilakukan oleh petugas.

Namun demikian, wadah dari keranjang bambu mempunyai kekurangan yaitu kurang memenuhi aspek kesehatan dan keindahan. Hal ini karena wadah

sampah jenis ini mudah rusak ataupun terkoyak serta tidak kedap air. Selain itu dengan menggunakan wadah dari keranjang bambu, sampah juga menjadi mudah berserakan karena tidak dilengkapi dengan penutup.

Dari hal tersebut maka penggunaan keranjang bambu kurang dianjurkan pada frekuensi pengumpulan sampah lebih dari 1 hari karena apabila lebih sampah akan cepat membusuk terutama pada sampah organik.

2. Tong (Bin)

Penggunaan wadah dari tong besi ataupun plastik, juga digunakan dalam pewadahan sampah di Kota Gombong. Wadah ini masuk kategori cukup baik, terutama yang terbuat dari plastik. Hal ini karena tong ini mempunyai kelebihan yaitu tidak mudah rusak serta kedap air, harganya ekonomis serta mudah diperoleh. Karena biasanya tong ini menggunakan penutup, maka sampah yang ada tidak akan menjadi media penyebaran penyakit sehingga dapat memenuhi aspek kesehatan dan dari sisi estetika dapat memenuhi sisi keindahan lingkungan. Penggunaan tong sampah juga memudahkan operasional pengumpulan sampah oleh petugas karena mudah di kosongkan. Tong sampah yang terbuat dari besi juga mempunyai kekurangan yaitu mudah berkarat yang menyebabkan kerusakan dan sulit atau bahkan tidak dapat diperbaiki.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, wadah dari tong sampah terutama yang terbuat dari plastik sangat dianjurkan.

3. Bak Terbuka (Pasangan Batu Bata)

Salah satu wadah sampah yang sering digunakan oleh masyarakat di Kota Gombong adalah menggunakan bak sampah dari pasangan batu bata, yang pada

umumnya digunakan pada daerah permukiman. Disamping sebagai wadah individual, beberapa bak sampah juga merupakan wadah komunal sebelum sampah diangkut ke TPS atau kontainer.

Penggunaan bak pasangan batu bata sebenarnya mempunyai kelebihan karena sudah memenuhi aspek kesehatan dan keindahan lingkungan. Hal ini karena sampah tidak mudah berserakan dan tidak menjadi sarang penyakit. Disamping itu bak pasangan batu bata mempunyai keuntungan tidak mudah rusak dan kedap air.

Namun demikian, wadah jenis ini mempunyai kekurangan yaitu sulit dioperasikan serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam operasional pengumpulan sampah. Selain itu, seringkali bak sampah ini disamping untuk menampung sampah juga digunakan untuk membakar sampah oleh masyarakat. Hal ini karena waktu pengambilan sampah oleh petugas terlalu lama sehingga sampah menjadi menumpuk. Dari sisi harga bak jenis ini sebenarnya juga kurang ekonomis. Dari beberapa kelebihan dan kekurangan sistem ini, maka penggunaan bak batu bata kurang dianjurkan.

4. Kantong plastik

Bagi masyarakat yang tidak mempunyai wadah/tempat sampah yang permanen biasanya menggunakan kantong plastik sebagai wadah sampah untuk diambil langsung oleh petugas pengumpul sampah. Penggunaan kantong plastik di Kota Gombong, biasanya digunakan pada daerah permukiman maupun non permukiman.

Kantong plastik mempunyai keunggulan yaitu dari sisi ekonomis, karena harganya murah serta mudah diperoleh. Disamping itu mudah dalam operasional pengumpulan/pengambilan sampah oleh petugas. Namun dari sisi kesehatan dan keindahan, wadah ini kurang memenuhi karena mudah terkoyak sehingga menyebabkan sampah mudah berserakan.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya maka penggunaan kantong plastik ini kurang dianjurkan.

5. Lubang tanah/penimbunan

Selain menggunakan wadah seperti di atas, masyarakat di Kota Gombong yang tidak mempunyai wadah sampah tetapi mempunyai lahan yang cukup luas, membuat lubang di tanah sebagai sarana pembuangan sampah. Penggunaan lubang tanah maupun penimbunan ini, merupakan sarana pengelolaan sampah secara langsung (*on site*) oleh masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan sampah. Biasanya lubang sampah ini juga digunakan sebagai sarana pembakaran sampah.

Penggunaan sistem ini baik apabila digunakan pada daerah yang memiliki kepadatan kurang dari 50 jiwa per hektar. Hal ini karena daerah tersebut memiliki daya dukung lingkungan yang masih cukup tinggi, namun apabila digunakan pada daerah yang cukup padat dapat mencemari lingkungan.

6. Rangkuman hasil analisis sarana pewadahan

Berdasarkan perbandingan di atas, maka untuk lebih jelasnya hasil rangkuman analisis sarana pewadahan yang ada di Kota Gombong dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut :

TABEL IV.2
RANGKUMAN ANALISIS SARANA PEWADAHAN

NO	PEWADAHAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1.	Keranjang bambu	Mudah rusak, tidak kedap air, sampah mudah berserakan sehingga kurang memenuhi aspek kesehatan dan estetika	Ekonomis, Mudah di kosongkan/ operisonalnya
2.	Tong(Bin)	Tong dari besi mudah berkarat dan rusak	Tidak mudah rusak (untuk tong plastik), harga ekonomis, mudah diperoleh, memenuhi aspek kesehatan, mudah dioperasikan
3.	Bak terbuka	Sulit dikosongkan, harga kurang ekonomis	Memenuhi aspek kesehatan,
4.	Kantong plastik	Mudah terkoyak, kurang memenuhi aspek kesehatan dan keindahan	Harga murah, mudah diperoleh, mudah untuk operasional pengumpulan.
5.	Penimbunan	Membutuhkan lahan tersendiri	Cocok pada daerah kepadatan rendah.

Sumber: Hasil analisis

Jadi berdasarkan karakteristik penggunaan sarana pewadahan yang ada di Kota Gombong tersebut, maka dapat disimpulkan penggunaan wadah dari tong plastik atau besi lebih banyak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan jenis wadah yang lain. Oleh karena itu, penggunaannya cukup tepat untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Gombong.

4.2.2. Pengumpulan dan Pemindahan

Dalam analisis sarana dan prasarana pengumpulan sampah ini, meliputi peralatan pengumpulan dan sarana Tempat Penampungan Sementara/TPS. Dari hasil pengamatan lapangan, peralatan/kendaraan pengumpulan sampah yang ada di Kota Gombong terdiri dari becak sampah dan gerobak sampah. Pola yang digunakan dalam pengumpulan sampah menggunakan gerobak sampah dan becak sampah tersebut, adalah pola pengumpulan tak langsung. Dengan pola ini, sampah

dikumpulkan dengan menggunakan gerobak atau becak sampah untuk ditampung sementara ke dalam TPS terdekat atau transfer depo sebelum di bawa ke TPA.

1. Peralatan Pengumpulan Sampah

Peralatan pengumpulan sampah yang digunakan untuk operasional pengumpulan sampah adalah becak sampah dan gerobak sampah. Becak sampah yang ada saat ini adalah milik pemerintah yang kondisinya cukup baik dengan volume 1 m³ sehingga tidak terlalu berat dan mudah dioperasikan. Meskipun harganya lebih mahal dibandingkan dengan gerobak sampah, penggunaan becak sampah ini memiliki jangkauan pelayanan yang luas sehingga sangat baik digunakan sebagai peralatan pengumpulan karena lebih efisien.

Gerobak sampah yang biasa digunakan sebagai peralatan pengumpulan sampah yang ada di Kota Gombong adalah hasil swadaya masyarakat terutama di sebagian Kelurahan Wonokriyo, Desa Semanding dan Desa Selokerto. Namun demikian, penggunaan gerobak ini mempunyai jangkauan pelayanan yang rendah karena kurang cepat dalam operasionalnya. Hal ini menyebabkan penggunaan gerobak sampah kurang efisien baik dari segi waktu maupun tenaga.

2. Sarana Pemindahan/Tempat Penampungan Sementara

Sarana pemindahan atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang ada di Kota Gombong terdiri dari 2 jenis yaitu TPS pasangan batu bata dan kontainer. Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar TPS yang ada di Kota Gombong adalah TPS pasangan batu bata yang berukuran 1-9 m³. Penempatan TPS batu bata antara lain di Jalan Puring, Jalan Karang Bolong, Jalan Sempor dan banyak terdapat di jalan lain.

Dari observasi lapangan, TPS jenis ini sering dijadikan sebagai tempat pembakaran sampah oleh masyarakat. Hal ini karena frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang cukup lama sekitar 3 hari sekali. Selain itu dengan frekuensi pengangkutan yang cukup lama maka sampah menjadi menumpuk dan mudah berserakan.

TPS batu bata juga mempunyai kekurangan, yaitu sulit dalam operasional pengangkutan sampah dengan menggunakan *dump truck* untuk di bawa ke TPA Semali. Hal ini karena untuk memindahkan sampah dari TPS ke dalam truk memerlukan tenaga yang banyak serta membutuhkan waktu yang lama sehingga menjadi kurang efisien. Namun demikian, TPS dari bak terbuka ini mempunyai harga yang ekonomis dan tahan lama. Menurut Hartono (1995), penggunaan TPS pasangan jenis batu bata sudah tidak dianjurkan lagi.

TPS yang berupa kontainer yang ada di Kota Gombong hanya ada 4 buah yaitu di Jalan Kartini, Pasar Wonokriyo, Jalan Yos Sudarso Timur dan di Komplek TNI. TPS dari kontainer mempunyai kelebihan yaitu mudah dioperasikan dan tidak membutuhkan jumlah tenaga yang banyak, karena untuk mengangkat kontainer cukup menggunakan alat mekanik. Penggunaan kontainer ini sangat dianjurkan karena di samping mudah dipindahkan, dari bentuknya yang memiliki penutup maka memenuhi syarat kesehatan.

Dari pengamatan di lapangan, penggunaan kontainer ini menjadi kurang efisien, karena banyak sampah yang berserakan diluar kontainer yang diakibatkan perilaku pembuangan sampah oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan pada saat pengambilan kontainer, petugas tetap harus membersihkan dan mengumpulkan sampah yang berserakan diluar kontainer sehingga menjadi tidak efisien.

3. Rangkuman analisis sarana pengumpulan dan pemindahan

Adapun rangkuman analisis sarana prasarana pengumpulan dan pemindahan sampah di Kota Gombong adalah sebagaimana tabel IV.3 berikut ini:

TABEL IV.3
RANGKUMAN ANALISIS SARANA PRASARANA PENGUMPULAN
DAN PEMINDAHAN

NO	PENGUMPULAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1.	Gerobak sampah	Tidak mempunyai jangkauan pelayanan luas, kurang efisien	Mudah dioperasikan
2.	Becak sampah	Harga lebih mahal.	Mempunyai jangkauan pelayanan yang luas. Mudah dioperasikan dan lebih efisien di banding gerobak sampah
3.	TPS Batu Bata	Sulit dioperasikan dan membutuhkan tenaga pengangkutan yang banyak	Tahan lama
4.	TPS Kontainer	harga mahal	Memenuhi aspek kesehatan, Mudah dioperasikan, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, mudah dipindahkan.

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan beberapa analisis sarana prasarana pengumpulan dan pemindahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan becak sampah lebih mempunyai banyak keuntungan dan lebih efisien dibandingkan dengan gerobak sampah, sehingga penggunaan becak sampah yang ada di Kota Gombong sudah tepat.

Dari penggunaan TPS yang ada saat ini, sistem kontainer mempunyai banyak kelebihan dibanding TPS batu bata, sehingga dapat disimpulkan penggunaan kontainer sudah tepat untuk Kota Gombong.

4.2.3. Pengangkutan

Pola pengangkutan sampah yang diterapkan di Kota Gombong saat ini menggunakan dua sistem yaitu sistem pengangkutan sampah menggunakan *dump*

truck dan sistem pengangkutan sampah dari kontainer menggunakan *arm roll truck*. Kendaraan pengangkutan sampah yang digunakan dalam mendukung pengelolaan sampah di Gombong terdiri dari 2 buah *dump truck* dan 1 buah *arm roll truck*.

Kendaraan *dump truck* saat ini digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di transfer depo (tempat pemindahan dari gerobag sampah ke *dump truck*) maupun dari TPS batu bata serta sistem *door to door* dari daerah pertokoan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, untuk setiap *dump truck* diperlukan tenaga pengangkutan sebanyak 4-5 orang yang bertugas memindahkan sampah dari TPS ke dalam truk.

Menurut SK SNI T-13-1990-F, *dump truck* mempunyai kelebihan yaitu hanya cocok untuk menangani sampah yang ada di pasar, bisa *door to door*, dapat melakukan ritasi 2-3 rit/hari serta cepat dalam operasi pembongkaran. Dengan demikian dapat disimpulkan penggunaan *dump truck* yang melayani pengangkutan sampah pada daerah pasar dan pertokoan dengan sistem *door to door* di Kota Gombong saat ini sudah cukup tepat.

Selain kelebihan di atas, kendaraan *dump truck* juga mempunyai kekurangan yaitu dalam operasionalnya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 4 orang. Hal ini karena untuk memindahkan sampah dari TPS ke *dump truck* diperlukan personil yang banyak. Disamping itu, untuk menghindari sampah yang beterbangan saat diangkut dengan *dump truck* ke TPA maka masih diperlukan penutup bak.

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan tersebut, penggunaan *dump truck* saat ini kurang dianjurkan terutama untuk daerah permukiman yang mempunyai jalan yang sempit.

Kendaraan *arm roll truck* merupakan truk yang digunakan untuk mengangkut kontainer sampah. Jumlah *arm roll truck* yang ada di Kota Gombong saat ini hanya 1 buah dan digunakan untuk melayani 4 buah kontainer. Kendaraan jenis ini memiliki banyak kelebihan yaitu mempunyai mobilitas yang tinggi dan tenaga kerja yang sedikit (2 orang) serta mampu melakukan 3-4 ritasi perhari. Kendaraan *arm roll truck* yang merupakan satu rangkaian dengan kontainer, cocok untuk melayani daerah permukiman maupun non permukiman sehingga penggunaannya sangat dianjurkan. Dibandingkan dengan *dump truck*, *arm roll truck* lebih efisien dalam operasionalnya.

Adapun rangkuman hasil analisis kendaraan pengangkutan dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut ini:

TABEL IV.4
RANGKUMAN ANALISIS KENDARAAN PENGANGKUTAN SAMPAH

NO	SISTEM PENGANGKUTAN	KEKURANGAN	KELEBIHAN
1.	Dump truck	Membutuhkan tenaga operasional banyak Biaya operasional tinggi	Tepat untuk pasar dan pertokoan
2.	Arm roll truck	Biaya operasional tinggi.	Mudah dioperasikan dan lebih efisien. Dapat digunakan untuk daerah permukiman dan non permukiman Mempunyai jangkauan pelayanan yang luas dan mobilitas tinggi. Tidak membutuhkan tenaga yang banyak

Sumber: Hasil analisis

Dari hasil analisis di atas, penggunaan *arm roll truck* yang ada saat ini untuk mengangkut sampah mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan

dump truck, terutama untuk melayani daerah permukiman, sehingga penggunaan *arm roll truck* ini sudah tepat.

4.3. Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah berdasarkan Standar Normatif

Kinerja pengelolaan sampah secara kuantitatif dapat diukur berdasarkan tingkat pelayanan sampah. Untuk mengetahui tingkat pelayanan sampah, dapat diperhitungkan berdasarkan jumlah sampah yang terangkut, luas daerah terlayani dan jumlah penduduk terlayani.

Besarnya sampah yang terangkut di Kota Gombong, dapat diperoleh melalui pengamatan di lapangan terhadap operasional kendaraan pengangkut sampah yang menuju Tempat Pembuangan Akhir. Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan petugas kebersihan, saat ini untuk menangani sampah yang ada di Kota Gombong dilayani oleh 2 buah *dump truck* volume 8 m^3 dan 1 *arm roll truck*. Kendaraan *dump truck* yang ada di kota Gombong hanya beroperasi masing-masing 1 ritasi setiap hari, sedangkan pada hari minggu hanya 1 *dump truck* yang beroperasi dengan 1 ritasi.

Kendaraan *arm roll truck* beroperasi 1 ritasi per hari untuk mengambil kontainer sampah yang ada di Transfer depo (Pasar Wonokriyo), sedangkan untuk 3 kontainer lainnya yang ada di jalan Kartini, jalan Yos Sudarso Timur dan komplek TNI waktu pengangkutannya rata-rata 3 hari sekali.

Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisis jumlah sampah yang dapat terangkut ke TPA rata-rata setiap hari adalah 40 m^3 . Data perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut.

TABEL IV.5
JUMLAH SAMPAH TERANGKUT KE TPA

NO	Kendaraan Pengangkut	Ritasi/hari	Volume m ³	Hari kerja per bulan	Volume sampah terangkut (m ³)	Keterangan
1	Dump truck (AA 9552 D)	1	8	25	200	minggu libur
2	Dump truck (AA 9540 D)	1	8	30	240	
3	Amrrol truck (AA 949 D)	1	6	30	180	Kontainer di pasar
		3 hari sekali	6	10	60	Kontainer di Jl. Kartini
		3 hari sekali	6	10	60	Kontainer di Jl. Yos Sudarso Timur
		3 hari sekali	6	10	60	Komplek TNI
Sampah terangkut setiap bulan					800	
Sampah terangkut setiap hari					26.67	
Total sampah terangkut dengan asumsi faktor kompaksi (1,5)					40.00	

Sumber: hasil analisis

Jumlah sampah yang terangkut sebagaimana tabel di atas, merupakan sampah yang berasal dari daerah pelayanan saat ini, yang terdiri dari daerah permukiman dan non permukiman di 6 Desa/Kelurahan. Adapun Desa/Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Gombong, Kelurahan Wonokriyo, Desa Wero, Desa Semanding, Desa Semanda dan Desa Selokerto. Berdasarkan jumlah sampah yang terangkut di atas, maka dapat diketahui tingkat pelayanan sampah yang dilakukan oleh UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong.

Parameter atau tolok ukur yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan pengelolaan sampah, ditentukan berdasarkan standar prioritas pelayanan sampah yaitu tingkat kepadatan penduduk dan skala kepentingan pelayanan. Menurut P3KT, kriteria untuk menentukan pelayanan sampah adalah sebagai berikut :

1. Daerah permukiman

- Daerah dengan kepadatan >150 jiwa/ha memerlukan tingkat layanan 100 %.
- Daerah dengan kepadatan penduduk 100 – 150 jiwa/ha memerlukan tingkat layanan 75 %.

- Daerah dengan kepadatan penduduk 50-100 ha/jiwa memerlukan tingkat layanan 50 %.
2. Daerah komersial pada umumnya sampah dengan tingkat layanan 80 %, jalan protokol dan taman memiliki tingkat layanan 100 % dan pasar harus memiliki tingkat pelayanan 100 %.

Berdasarkan standar di atas, maka Desa/Kelurahan yang mendapatkan pelayanan sampah meliputi 17 Desa/Kelurahan sebagaimana telah diuraikan pada tabel IV.1, sedangkan pada tabel IV.6, diuraikan secara rinci tingkat layanan sampah yang ideal sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan standar normatif.

TABEL IV.6
TINGKAT PELAYANAN SAMPAH IDEAL

NO	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Terbangun (Ha)	Kepadatan Penduduk	Tingkat pelayanan (%)	Penduduk Terlayani jiwa	Volume Layanan m3/hari
1	Kelurahan Gombong	6,053	41.75	145	75	4,540	11.35
2	Kelurahan Wonokriyo	6,740	52.75	128	75	5,055	12.64
3	Desa Kalitengah	5,226	56.19	93	50	2,613	6.53
4	Desa Kemukus	3,590	36.67	98	50	1,795	4.49
5	Desa Semanding	5,260	63.00	83	50	2,630	6.58
6	Desa Sedayu	2,572	40.34	64	50	1,286	3.22
7	Desa Kedungpuji	3,054	51.03	60	50	1,527	3.82
8	Desa Wero	3,579	64.28	56	50	1,790	4.47
9	Desa Patemon	2,677	47.53	56	50	1,339	3.35
10	Desa Klopogodo	3,151	33.03	95	50	1,576	3.94
11	Desa Wonosigro	2,338	32.60	72	50	1,169	2.92
12	Desa Semondo	3,373	30.75	110	75	2,530	6.32
13	Desa Selokerto	5,078	48.00	106	75	3,809	9.52
14	Desa Sidoharum	4,130	67.00	62	50	2,065	5.16
15	Desa Pekuncen	2,694	39.96	67	50	1,347	3.37
16	Desa Gunungmujil	3,640	49.35	74	50	1,820	4.55
17	Desa Purbowangi	5,770	76.00	76	50	2,885	7.21
		68,925	830.23		55.88	39,774	99.43

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel IV.6 di atas, dapat disimpulkan daerah yang perlu mendapatkan pelayanan 75 % sebanyak 4 Desa/Kelurahan, yaitu Kelurahan

Wonokriyo, Kelurahan Gombong, Desa Semono dan Desa Selokerto, sedangkan 14 Desa yang lain cukup mendapatkan pelayanan sampah 50 %. Adapun daerah pelayanan sampah dapat dilihat pada gambar 4.3 Peta prosentase pelayanan sampah.

Dari tabel di atas, dapat diketahui pula tingkat pelayanan rata-rata untuk sampah permukiman yang seharusnya dapat terangkut adalah sebesar 55,88 % atau sekitar 99,43 m³/hari. Selain sampah permukiman, jumlah sampah non permukiman yang harus terangkut adalah sebesar 10 m³/hari. Hal ini karena sebagian besar sampah non permukiman adalah sampah dari jalan protokol, pasar dan daerah komersial sehingga harus mendapat pelayanan 100 %.

Dari jumlah sampah permukiman dan non permukiman di atas, maka total produksi sampah yang seharusnya dapat terangkut ke TPA adalah sebesar 109,43 m³/hari. Apabila dibandingkan dengan timbulan sampah yang dapat terangkut ke TPA saat ini sebesar 40 m³/hari, maka dapat diketahui tingkat pelayanan sampah di Kota Gombong sebesar $40/109,43 \times 100 \% = 36,5 \%$. Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan sampah secara kuantitatif di Kota Gombong berdasarkan sampah terangkut mencapai 36,5 %. Dengan tingkat pelayanan sampah yang masih rendah tersebut, dapat disimpulkan daerah yang belum mendapat pelayanan, umumnya melakukan penimbunan, pembakaran maupun pembuangan sampah ke sungai atau saluran.

Luas daerah terlayani di Kota Gombong, dianalisis berdasarkan luas daerah terbangun yang mendapatkan pelayanan sampah dibandingkan dengan luas daerah terbangun di Kota Gombong yang prioritas mendapatkan pelayanan sampah.

Dari tabel IV.1 di atas, luas daerah terbangun di Kota Gombong seluas 2.004.24 ha, sedangkan berdasarkan prioritas pelayanan sampah seperti pada tabel IV.6, daerah prioritas pelayanan sampah yang meliputi 17 Kelurahan/Desa mempunyai luas daerah terbangun 830.23 ha. Analisis luas daerah terlayani adalah daerah yang sudah mendapatkan pelayanan sampah dengan luas daerah terbangun seluas 300.53 ha, dibandingkan dengan luas daerah prioritas pelayanan sampah. Dari data tersebut maka prosentase daerah terlayani adalah $300,53/830,23 \times 100 \% = 36.20 \%$.

Analisis jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk di daerah yang sudah mendapatkan pelayanan sampah, dibandingkan jumlah penduduk pada daerah-daerah yang seharusnya mendapatkan pelayanan sampah di 17 Desa/Kelurahan, yaitu sebesar 39.775 jiwa. Jumlah penduduk terlayani dapat diketahui dari besarnya sampah permukiman yang terangkut. Dari 40 m³/hari sampah yang terangkut, diketahui 10 m³/hari berasal dari daerah non permukiman, sehingga jumlah sampah permukiman sebesar 30 m³/hari. Dengan asumsi timbunan sampah per orang per hari adalah 2,5 liter, maka dapat disimpulkan sampah terangkut sebesar 30 m³/hari diproduksi oleh 12.000 orang. Dari data tersebut maka prosentase jumlah penduduk terlayani adalah $12.000/39.775 \times 100 \% = 30,17 \%$. Dari data perhitungan tersebut, maka jumlah penduduk terlayani di Kota Gombong saat ini mencapai 30,17 %.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan hasil kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong seperti pada tabel IV.7 berikut ini.

TABEL IV.7
KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GOMBONG

NO	PARAMETER	IDEAL (HASIL ANALISIS)	EKSISTING	PROSENTASE PENCAPAIAN
1.	Sampah Terangkut	109,43 m ³ /hari	40 m ³ /hari	36,5 %
2.	Luas Daerah Terlayani	830,23 ha	300,53 ha	36,20 %
3.	Jumlah Penduduk Terlayani	39.774 jiwa	12.000 jiwa	30,17 %

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil analisis sebagaimana Tabel IV.7 di atas maka dapat disimpulkan untuk kinerja pelayanan sampah di Kota Gombong masih di bawah 50 % atau masih rendah.

4.4. Analisis Kinerja Pengelolaan Sampah Berdasarkan Persepsi Masyarakat

Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong berdasarkan persepsi masyarakat. Adapun beberapa aspek yang akan dianalisis dalam penelitian kinerja ini meliputi kondisi kebersihan, sarana prasarana, personil dan keluhan pelanggan.

Analisis persepsi masyarakat terhadap kinerja pengelolaan sampah adalah berdasarkan pada perhitungan skor/nilai rata-rata yang diperoleh dari masing-masing variabel. Menurut Simamora, (2004:130-131), untuk menghadapi bilangan pecahan digunakan skala numerik linier dengan cara mencari rentang skala (RS) dengan rumus sebagai berikut:

$$RS = \frac{m - n}{b}$$

Dimana,

m = angka tertinggi dalam pengukuran.

n = angka terendah dalam pengukuran

b = banyaknya kelas yang dibentuk.

Dengan rumus tersebut, maka

$$RS = \frac{4 - 1}{4} = 0,75$$

Dengan rentang 0,75, maka skala numeriknya adalah sebagai berikut:

Tidak baik/buruk	: 1 s/d 1 + 0,75	= $1 < x \leq 1,75$
Kurang baik	: di atas 1,75 s/d 1,75 + 0,75	= $1,75 < x \leq 2,5$
Cukup baik	: di atas 2,5 s/d 2,5 + 0,75	= $2,5 < x \leq 3,25$
Baik	: di atas 3,25 s/d 4	= $3,25 < x \leq 4$

4.4.1. Kondisi Kebersihan

Kondisi kebersihan merupakan indikator kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh petugas penyapuan maupun petugas pengumpulan dan pengangkutan sampah, yang meliputi kondisi kebersihan di jalan-jalan utama, kondisi kebersihan saluran atau drainase, kondisi kebersihan lingkungan pasar dan pertokoan serta kondisi kebersihan Tempat Pembuangan Sementara atau Kontainer. Adapun kondisi kebersihan menurut persepsi masyarakat untuk masing-masing variabel secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kebersihan di Jalan-jalan Utama

Kondisi kebersihan di jalan-jalan utama di Kota Gombong menurut persepsi masyarakat adalah mayoritas atau 49,5 % responden menyatakan cukup bersih, sebanyak 10,1 % responden menyatakan bersih, sebanyak 34,3 % responden menyatakan kurang bersih dan hanya 6,1 % responden menyatakan kotor. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi di lapangan masih hanya sebagian kecil saja sampah yang berserakan di pinggir-pinggir jalan.

Adapun kondisi kebersihan di jalan-jalan utama, ditunjukkan pada tabel IV.8 berikut:

TABEL IV.8
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI KEBERSIHAN
DI JALAN UTAMA

KONDISI KEBERSIHAN JALAN	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Kotor	6	6,1	6,1
Kurang bersih	34	34,3	40,4
Cukup bersih	49	49,5	89,9
Bersih	10	10,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi kebersihan jalan-jalan utama maka diperoleh skor rata-rata 2,64 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Dari hasil wawancara dengan petugas kebersihan, untuk jalan-jalan utama seperti jalan Yos Sudarso merupakan kawasan pertokoan yang mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah setiap hari.

Disamping itu, untuk jalan-jalan utama tersebut juga mendapatkan pelayanan penyapuan jalan setiap hari. Sehingga kondisi kebersihan di jalan utama ini cukup bersih. Dari hasil tersebut, menunjukkan kinerja petugas penyapuan yang hanya 4 orang cukup baik.

2. Kondisi Kebersihan Saluran atau Drainase

Persepsi masyarakat terhadap kondisi kebersihan saluran atau drainase adalah sebagian besar atau 44,4 % responden menyatakan kurang bersih, sebanyak 29,3 % responden menyatakan cukup bersih, sebanyak 20,2 % responden menyatakan kotor dan hanya 6,1 % responden yang menyatakan bersih.

Adapun kondisi kebersihan saluran atau drainase, ditunjukkan pada tabel IV.9 berikut:

TABEL IV.9
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI KEBERSIHAN
DRAINASE

KONDISI KEBERSIHAN DRAINASE	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Kotor	20	20,2	20,2
Kurang bersih	44	44,4	64,6
Cukup bersih	29	29,3	93,9
Bersih	6	6,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi kebersihan saluran atau drainase, maka diperoleh skor rata-rata 2,21 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Dari pengamatan di lapangan, kondisi drainase atau saluran di Kota Gombong banyak yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sehingga nampak kondisi drainase kurang bersih. Selain itu untuk tenaga kebersihan yang khusus bertugas membersihkan saluran drainase belum ada.

3. Kondisi Kebersihan Lingkungan Pasar dan Kawasan Pertokoan

Kawasan non permukiman terutama pasar dan pertokoan untuk Kota Gombong saat ini menjadi satu kawasan. Kewajiban pengelolaan kebersihan di Pasar dan pertokoan di lingkungan pasar adalah kewajiban Dinas Pengelola Pasar. Kondisi kebersihan di lingkungan pasar dan kawasan pertokoan tersebut, dari hasil penelitian dapat disimpulkan, sebagian besar (41,4 %) responden menyatakan kurang bersih, sedangkan 34,3 % responden menyatakan cukup

bersih, sebanyak 18,2 % responden menyatakan kotor dan hanya 6,1 % responden yang menyatakan bersih.

Kondisi kebersihan di lingkungan pasar dan kawasan pertokoan dapat dilihat pada tabel IV.10 berikut:

TABEL IV.10
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN PASAR DAN PERTOKOAN

KONDISI KEBERSIHAN LINGKUNGAN PASAR DAN PERTOKOAN	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Kotor	18	18,2	18,2
Kurang bersih	41	41,4	59,6
Cukup bersih	34	34,3	93,9
Bersih	6	6,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi kebersihan lingkungan pasar dan pertokoan, maka diperoleh skor rata-rata 2,28 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Dari hasil pengamatan, di sekitar pasar masih banyak terdapat sampah yang menumpuk dan berserakan. Dengan kondisi demikian dapat disimpulkan kinerja pengelolaan sampah pasar masih belum optimal yang ditunjukkan dengan kondisi kebersihan lingkungan pasar dan pertokoan.

4. Kondisi Kebersihan TPS atau Kontainer

Tempat pembuangan/penampungan sementara (TPS) di Kota Gombong meliputi TPS pasangan batu bata ukuran 1 – 9 m³, maupun dengan menggunakan kontainer berukuran 6 m³. Kondisi kebersihan di TPS batu bata maupun kontainer dipengaruhi oleh pola pembuangan sampah oleh masyarakat, maupun waktu atau frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir.

Persepsi masyarakat terhadap kondisi kebersihan di Tempat Pembuangan Sementara atau Kontainer di Kota Gombong, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebanyak 19,2 % responden menyatakan kotor, sebanyak 35,4 % responden menyatakan kurang bersih, sebanyak 36,4 % responden menyatakan cukup bersih dan hanya 9,1 % responden yang menyatakan bersih. Adapun kondisi kebersihan di lingkungan pasar dan kawasan pertokoan dapat ditunjukkan pada tabel IV.11 berikut ini :

TABEL IV.11
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI KEBERSIHAN
DI TPS DAN KONTAINER

KONDISI KEBERSIHAN TPS DAN KONTAINER	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Kotor	19	19,2	19,2
Kurang bersih	35	35,4	54,5
Cukup bersih	36	36,4	90,9
Bersih	9	9,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas maupun perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi kebersihan di TPS atau kontainer maka diperoleh skor rata-rata 2,35 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Dari hasil observasi lapangan, masih sering dijumpai sampah yang berserakan di luar TPS.

4.4.2. Kondisi Sarana Prasarana

Penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah dari kondisi sarana prasarana persampahan, meliputi jumlah TPS atau Kontainer, penempatan TPS atau Kontainer, waktu pengumpulan sampah, kondisi alat pengumpul sampah,

jumlah alat pengumpul sampah dan frekuensi pengangkutan sampah. Adapun secara rinci analisis terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Kontainer

Kondisi Tempat Pembuangan/Penampungan Sementara atau Kontainer sampah yang ada di Kota Gombong menurut persepsi masyarakat, dapat disimpulkan sebanyak 10,1 % responden menyatakan tidak terawat, mayoritas atau 46,5 % responden menyatakan kurang terawat, sebanyak 35,4 % responden menyatakan cukup terawat dan hanya 8,1 % responden yang menyatakan terawat. Adapun persepsi masyarakat terhadap kondisi TPS atau Kontainer sampah, ditunjukkan pada tabel IV.12 berikut:

TABEL IV.12
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI TPS
DAN KONTAINER

KONDISI TPS DAN KONTAINER	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Tidak terawat	10	10,1	10,1
Kurang terawat	46	46,5	56,6
Cukup terawat	35	35,4	91,9
Terawat	8	8,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi TPS dan Kontainer, maka diperoleh skor rata-rata 2,41 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Dari observasi lapangan, banyak dijumpai TPS yang kondisinya sudah rusak dan kurang terawat.

2. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah atau Kontainer

Persepsi masyarakat terhadap jumlah tempat pembuangan sementara atau Kontainer yang ada di Kota Gombong, sebanyak 18,2 % responden menyatakan

tidak memadai, mayoritas atau 45,5 % responden menyatakan kurang memadai, sebanyak 25,3 % responden menyatakan cukup memadai dan hanya 11,1 % responden menyatakan jumlah TPS atau kontainer sudah memadai. Adapun persepsi masyarakat terhadap penyediaan jumlah TPS atau Kontainer, ditunjukkan pada tabel IV.13 berikut:

TABEL IV.13
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUMLAH TPS
ATAU KONTAINER

JUMLAH TPS DAN KONTAINER	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Tidak memadai	18	18,2	18,2
Kurang memadai	45	45,5	63,6
Cukup memadai	25	25,3	88,9
Memadai	11	11,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap jumlah TPS atau Kontainer, maka diperoleh skor rata-rata 2,29 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini juga didukung dari hasil pengamatan lapangan, penyebaran TPS yang ada masih belum merata sehingga masyarakat belum sepenuhnya dapat memanfaatkan TPS yang ada.

3. Penempatan Tempat Pembuangan Sementara atau Kontainer

Sebagian besar letak TPS yang ada di Kota Gombong adalah di tepi jalan seperti di pertigaan Jalan Kartini, Jalan Yos Sudarso, Jalan Puring dan Jalan Sempor. Persepsi masyarakat terhadap penempatan Tempat Pembuangan Sementara atau Kontainer tersebut adalah sebanyak 5,1 % responden menyatakan tidak tepat, sebanyak 43,4 % responden menyatakan kurang tepat, sebanyak

39,4 % responden menyatakan cukup tepat dan 12,1 % responden menyatakan sudah tepat.

Adapun persepsi masyarakat terhadap kinerja dalam penempatan Tempat Pembuangan Sementara atau kontainer, ditunjukkan pada tabel IV.14 berikut:

TABEL IV.14
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENEMPATAN TPS
ATAU KONTAINER

PENEMPATAN TPS ATAU KONTAINER	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Tidak tepat	5	5,1	5,1
Kurang tepat	43	43,4	48,5
Cukup tepat	39	39,4	87,9
Tepat	12	12,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap penempatan TPS dan Kontainer, maka diperoleh skor rata-rata 2,59 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat karena penempatan TPS tidak berdekatan permukiman penduduk sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

4. Waktu/Frekuensi Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah di Kota Gombong dilakukan dengan menggunakan becak atau gerobak sampah. Persepsi masyarakat terhadap waktu atau frekuensi pengumpulan sampah adalah sebanyak 12,1 % responden menyatakan tidak memadai, sebanyak 38,4 % responden menyatakan kurang memadai, sebanyak 42,4 % responden menyatakan cukup memadai dan hanya 7,1 % responden yang menyatakan sudah memadai.

Adapun persepsi masyarakat terhadap kinerja dalam frekuensi pengumpulan sampah dapat ditunjukkan pada tabel IV.15 berikut:

TABEL IV.15
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WAKTU ATAU FREKUENSI
PENGUMPULAN SAMPAH

WAKTU ATAU FREKUENSI PENGUMPULAN SAMPAH	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Tidak memadai	12	12,1	12,1
Kurang memadai	38	38,4	50,5
Cukup memadai	42	42,4	92,9
Memadai	7	7,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap waktu atau frekuensi pengumpulan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,44 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Dari pengamatan di lapangan waktu pengumpulan sampah dilakukan 3-4 hari sekali, kecuali untuk daerah pertokoan dilakukan setiap hari. Disamping itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan sampah secara teratur waktu pengambilannya.

5. Kondisi Alat Pengumpulan Sampah

Alat pengumpul sampah yang ada di Kota Gombong saat ini menggunakan becak sampah dan gerobak sampah. Persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengumpulan sampah adalah sebagian besar responden (50,5 %) menyatakan cukup baik, sebanyak 10,1 % responden menyatakan buruk, sebanyak 26,3 % responden menyatakan kurang baik dan hanya 13,1 % responden yang menyatakan baik. Persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengumpulan sampah yang ada di Kota Gombong, ditunjukkan pada tabel IV.16 berikut:

TABEL IV.16
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI ALAT
PENGUMPUL SAMPAH

KONDISI ALAT PENGUMPUL SAMPAH	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Buruk	10	10,1	10,1
Kurang baik	26	26,3	36,4
Cukup baik	50	50,5	86,9
Baik	13	13,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengumpulan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,67 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Dari kondisi eksisting, kondisi becak sampah masih cukup baik dan belum mengalami kerusakan yang dapat mengganggu aktifitas pengumpulan sampah.

6. Jumlah Alat Pengumpulan Sampah

Jumlah alat pengumpul sampah yang tersedia akan mempengaruhi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sampah di perkotaan. Persepsi masyarakat terhadap jumlah alat pengumpul sampah (becak sampah) terutama di wilayah tempat tinggal responden adalah sebagian besar (47,5 %) menyatakan kurang memadai, sebanyak 9,1 % responden menyatakan tidak memadai, sebanyak 31,3 % responden menyatakan cukup memadai dan sebanyak 12,1 % responden menyatakan sudah memadai. Persepsi masyarakat terhadap kinerja dalam penyediaan jumlah alat pengumpulan sampah dapat ditunjukkan pada tabel IV.17 berikut:

TABEL IV.17
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUMLAH ALAT
PENGUMPULAN SAMPAH

JUMLAH ALAT PENGUMPULAN SAMPAH	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Tidak memadai	9	9,1	9,1
Kurang memadai	47	47,5	56,6
Cukup memadai	31	31,3	87,9
Memadai	12	12,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap penyediaan jumlah alat pengumpulan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,46 sehingga masuk dalam kategori kurang baik.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan masyarakat, banyak wilayah (RW) yang belum mendapatkan pelayanan sampah secara merata. Disamping itu banyak masyarakat yang sebenarnya sudah membutuhkan pelayanan sampah namun belum dapat terlayani karena keterbatasan peralatan.

7. Waktu atau Frekuensi Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah di kota Gombong meliputi 2 macam pola pengangkutan, yaitu pengangkutan sampah dari TPS yang diangkut menggunakan *dump truck* dan dari Kontainer sampah yang diangkut menggunakan *armroll truck*. Waktu atau frekuensi pengangkutan akan mempengaruhi hasil pengelolaan sampah perkotaan. Persepsi masyarakat terhadap frekuensi pengangkutan sampah adalah sebanyak 12,1 % responden menyatakan tidak memadai, sebanyak 44,4 % responden menyatakan kurang memadai, responden yang menyatakan cukup

memadai sebanyak 32,3 % dan hanya 11,1 % responden menyatakan sudah memadai.

Adapun persepsi masyarakat terhadap frekuensi pengangkutan sampah, dapat ditunjukkan pada tabel IV.18 berikut ini :

TABEL IV.18
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FREKUENSI
PENGANGKUTAN SAMPAH

FREKUENSI PENGANGKUTAN	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Tidak memadai	12	12,1	12,1
Kurang memadai	44	44,4	56,6
Cukup memadai	32	32,3	88,9
Memadai	11	11,1	100
Total	99		

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap frekuensi pengangkutan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,42 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya sampah yang masih menumpuk dan berserakan di TPS maupun kontainer, yang disebabkan frekuensi pengangkutan yang kurang optimal.

8. Kondisi Alat Pengangkutan Sampah

Peralatan pengangkutan sampah di kota Gombong saat ini menggunakan *dump truck* dan *Arm roll truck*. Kondisi sarana pengangkutan tersebut dapat mempengaruhi baik buruknya kinerja pengelolaan sampah. Kondisi sarana pengangkutan sampah di Kota Gombong menurut persepsi masyarakat sebenarnya sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu sebagian besar atau (54,5 %) responden menyatakan sudah cukup baik, sebanyak 5,1 % responden

menyatakan buruk baik, sebanyak 25,3 responden menyatakan kurang baik dan sebanyak 15,2 % responden menyatakan baik.

Adapun persepsi masyarakat terhadap kondisi sarana pengangkutan sampah, dapat ditunjukkan pada tabel IV.19 berikut ini :

TABEL IV.19
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONDISI ALAT
PENGANGKUTAN SAMPAH

KONDISI ALAT PENGANGKUTAN SAMPAH	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Buruk	5	5,1	5,1
Kurang baik	25	25,3	30,3
Cukup baik	54	54,5	84,8
Baik	15	15,2	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kondisi alat pengangkutan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,80 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini karena pada umumnya alat pengangkutan sampah baik *dump truck* maupun *arm roll truck* masih berumur kurang dari 5 tahun dan telah dilakukan perbaikan oleh Dinas Kimprasda.

4.4.3. Personil

Dalam pengelolaan sampah harus ada keseimbangan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan jumlah personil atau petugas kebersihan. Disamping itu, juga perlu didukung dengan kemampuan personil dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Dalam penilaian ini maka indikatornya meliputi kualitas petugas kebersihan maupun jumlah petugas

kebersihan yang ada. Adapun penilaian kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Kemampuan Petugas Kebersihan

Persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas kebersihan atau pengelolaan sampah di Kota Gombong dari hasil penelitian adalah sebagian besar atau 59,6 % responden menyatakan cukup terampil, sebanyak 7,1 % responden menyatakan petugas kebersihan tidak terampil, sebanyak 21,2 % menyatakan kurang terampil, dan sebanyak 12,1 % menyatakan terampil. Adapun persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas kebersihan, ditunjukkan pada tabel IV.20 berikut:

TABEL IV.20
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEMAMPUAN PETUGAS
KEBERSIHAN

KEMAMPUAN PETUGAS KEBERSIHAN	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Tidak terampil	7	7,1	7,1
Kurang terampil	21	21,2	28,3
Cukup terampil	59	59,6	87,9
Terampil	12	12,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap kemampuan petugas kebersihan, maka diperoleh skor rata-rata 2,77 sehingga masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini sesuai dengan kondisi tenaga kebersihan yang sebagian besar sudah bekerja antara 5 – 15 tahun sehingga mempunyai pengalaman yang cukup.

2. Jumlah Petugas Kebersihan

Keterbatasan jumlah petugas kebersihan akan menyebabkan tidak meratanya jangkauan pelayanan sampah. Persepsi masyarakat terhadap jumlah petugas kebersihan di Kota Gombong dari hasil penelitian ini, sebanyak 15,2 % responden menyatakan jumlah petugas kebersihan tidak memadai, sebagian besar 42,4 % responden menyatakan kurang memadai, sebanyak 31,3 % responden menyatakan cukup memadai dan sebanyak 11,1 % responden menyatakan sudah memadai. Adapun persepsi masyarakat terhadap jumlah petugas kebersihan yang ada, ditunjukkan pada tabel IV.21 berikut:

TABEL IV.21
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUMLAH
PETUGAS KEBERSIHAN

JUMLAH PETUGAS KEBERSIHAN	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Tidak memadai	15	15,2	15,2
Kurang memadai	42	42,4	57,6
Cukup memadai	31	31,3	88,9
Memadai	11	11,1	100
Total	99	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap jumlah petugas kebersihan, maka diperoleh skor rata-rata 2,38 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Kondisi ini disebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan secara optimal karena petugas pengumpulan masih sangat terbatas.

4.4.4. Keluhan Pelanggan

Pelayanan terhadap keluhan atau pengaduan pelanggan merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja

pengelolaan sampah. Sehingga untuk melayani secara maksimal, perlu daya tanggap dari pemerintah dalam melayani keluhan tersebut. Dari 99 responden yang ada, hanya 89 responden yang pernah mengajukan komplain baik kepada UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong maupun langsung kepada petugas kebersihan di lapangan.

Persepsi masyarakat terhadap tanggapan keluhan atau komplain yang diajukan oleh masyarakat adalah sebanyak 25,8 % responden menyatakan lambat atau tidak ada tanggapan, sebanyak 40,4 % responden menyatakan kurang cepat, sebanyak 29,2 % responden menyatakan cukup cepat, dan sebanyak 4,5 % responden menyatakan cepat. Adapun persepsi masyarakat terhadap tanggapan pengaduan pelayanan sampah, ditunjukkan pada tabel IV.22 berikut:

TABEL IV.22
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TANGGAPAN KELUHAN
PELAYANAN SAMPAH

TANGGAPAN KELUHAN PELAYANAN SAMPAH	FREKUENSI	PROSENTASE	KUMULATIF
Lambat	23	25,8	25,8
Kurang cepat	36	40,4	66,3
Cukup cepat	26	29,2	95,5
Cepat	4	4,5	100
Total	89	100	

Sumber: hasil analisis

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut dan perhitungan skor dari persepsi masyarakat terhadap tanggapan pelayanan pengaduan sampah, maka diperoleh skor rata-rata 2,12 sehingga masuk dalam kategori kurang baik. Hal ini dikarenakan tidak semua keluhan yang disampaikan kepada petugas kebersihan segera ditanggapi dengan cepat.

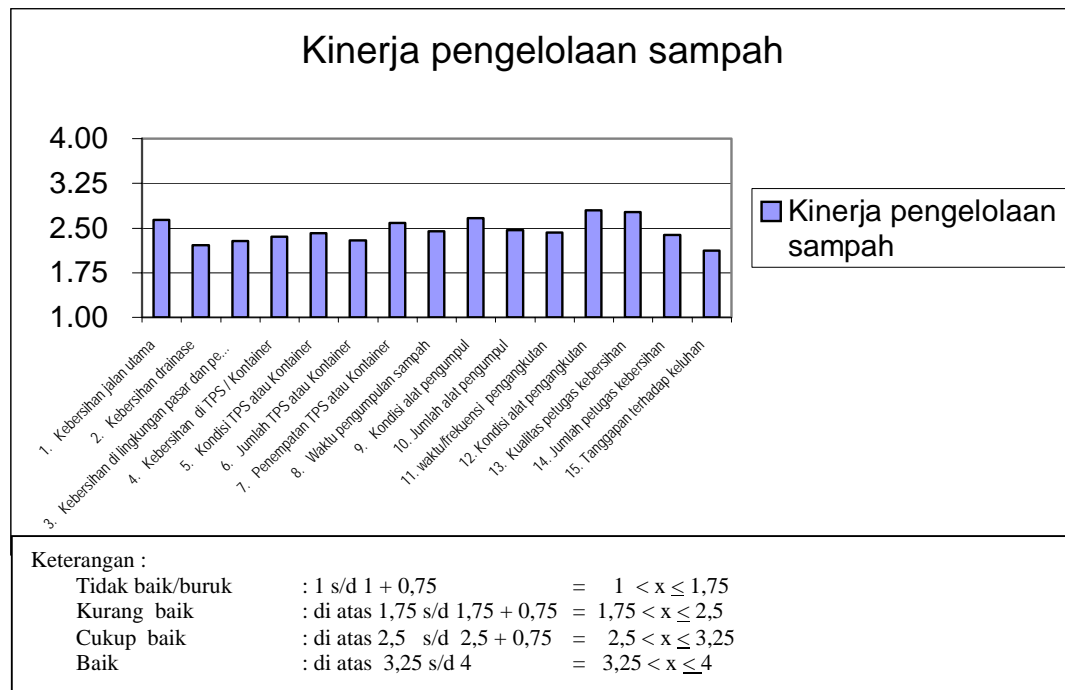
4.4.5. Rangkuman Kinerja Pengelolaan Sampah menurut Persepsi Masyarakat

Kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong menurut persepsi masyarakat untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.23 maupun gambar 4.3 berikut :

TABEL IV.23
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN
SAMPAH DI KOTA GOMBONG

NO	VARIABEL	INDIKATOR	SKOR RATA-RATA	KATEGORI
I.	Kondisi kebersihan	1. Kebersihan jalan utama	2.64	Cukup baik
		2. Kebersihan drainase	2.21	Kurang baik
		3. Kebersihan di lingkungan pasar dan kawasan pertokoan	2.28	Kurang baik
		4. Kebersihan di TPS / Kontainer	2.35	Kurang baik
II.	Sarana Prasarana	5. Kondisi TPS atau Kontainer	2.41	Kurang baik
		6. Jumlah TPS atau Kontainer	2.29	Kurang baik
		7. Penempatan TPS atau Kontainer	2.59	Cukup baik
		8. Waktu pengumpulan sampah	2.44	Kurang baik
		9. Kondisi alat pengumpul	2.67	Cukup baik
		10. Jumlah alat pengumpul	2.46	Kurang baik
		11. waktu/frekuensi pengangkutan	2.42	Kurang baik
		12. Kondisi alat pengangkutan	2.80	Cukup baik
III.	Personil	13. Kualitas petugas kebersihan	2.77	Cukup baik
		14. Jumlah petugas kebersihan	2.38	Kurang baik
IV.	Tanggapan keluhan	15. Tanggapan terhadap keluhan	2.12	Kurang baik
			2.46	

Sumber: Hasil analisis



Sumber: Hasil analisis

GAMBAR 4.4

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GOMBONG

Dari tabel maupun grafik di atas, kinerja pengelolaan sampah sebagian besar masih kurang baik dan mendekati cukup baik. Kualitas pengelolaan sampah maksimal yang dicapai adalah cukup baik, yaitu kondisi kebersihan jalan utama, penempatan TPS atau kontainer, kondisi alat pengumpul sampah, kondisi alat pengangkutan sampah dan kualitas petugas kebersihan.

4.5. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Sampah.

Sistem pengelolaan sampah diperkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen sub sistem yang saling mendukung dan berinteraksi. Komponen tersebut adalah aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta

masyarakat (Kodoati, 2003:217). Dari hal tersebut, maka baik buruknya kinerja pengelolaan sampah dapat di pengaruhi oleh kelima aspek tersebut.

4.5.1. Aspek Teknis

Dari hasil analisis di atas, kinerja pengelolaan sampah dipengaruhi oleh aspek teknis yaitu :

1. Jumlah Peralatan dan Tenaga Kebersihan

Salah faktor yang mempengaruhi hasil kinerja adalah jumlah sarana prasarana persampahan dan jumlah personil. Jumlah peralatan persampahan di Kota Gombong saat ini meliputi 7 buah becak sampah, 2 *dump truck*, 1 *arm roll truck* dan 4 kontainer sampah. Jumlah tenaga kebersihan di Kota Gombong saat ini, meliputi tenaga penyapuan atau pengumpul sampah sebanyak 4 orang dan tenaga pengangkutan 14 orang.

Menurut Standar Nasional Indonesia (SK SNI T-12-1991-03) Departemen Pekerjaan Umum, kebutuhan peralatan maupun personil dalam pengelolaan sampah adalah untuk setiap 2.000 rumah membutuhkan 16 buah Gerobak atau becak sampah, *dump truck* satu buah atau satu *arm roll truck* dengan 3 kontainer. Jumlah personil yang dibutuhkan untuk tenaga pengumpul sampah adalah sebanyak 16 orang dan untuk tenaga pengangkutan sebanyak 8 orang.

Berdasarkan target prioritas pelayanan sampah di Kota Gombong, maka target penduduk terlayani adalah 39.774 jiwa (tabel IV.6). Apabila setiap rumah mempunyai anggota keluarga rata-rata 5 orang (hasil kuesioner) maka jumlah rumah di Kota Gombong yang seharusnya terlayani adalah sebanyak 7.955 rumah.

Dari beberapa hal tersebut di atas, maka dapat dianalisis jumlah personil dan jumlah peralatan pengelolaan sampah di kota Gombong, sebagai berikut:

1. Apabila setiap 2.000 rumah membutuhkan 16 tenaga pengumpulan sampah maka untuk 7.955 rumah membutuhkan tenaga pengumpulan sampah sebanyak 63 orang dan peralatan pengumpulan berupa becak sampah sebanyak 63 buah. Dari kondisi eksisting, jumlah tenaga pengumpulan atau penyapuan jalan saat ini sebanyak 4 orang, maka saat ini baru mencapai 6,3 %. Sedangkan jumlah alat pengumpulan yang berupa becak sampah sebanyak 7 buah, maka tingkat pencapaiannya adalah 11 %.
2. Kebutuhan tenaga pengangkutan sampah, adalah setiap 2.000 rumah membutuhkan 8 orang, sehingga untuk melayani 7.955 rumah dibutuhkan 32 orang. Dari kondisi eksisting tenaga pengangkutan sebanyak 14 orang, maka dapat disimpulkan saat ini baru mencapai adalah 43,75 %.
3. Jumlah kendaraan pengangkut sampah *arm roll truck*, sesuai SNI adalah untuk setiap 2000 rumah di perlukan 1 *arm roll truck* dengan 3 kontainer.
4. Oleh karena itu, dengan prioritas pelayanan 7.955 rumah maka dibutuhkan *arm roll truck* sebanyak 4 buah yang dilengkapi dengan 12 kontainer. Dari kondisi eksisting, jumlah *arm roll truck* di Kota Gombong adalah sebanyak 1 buah sedangkan kontainer sebanyak 4 buah. Dengan demikian tingkat pencapaiannya adalah 25 % untuk *arm roll truck*, dan untuk kontainer mencapai 33 %.
5. Sedangkan kebutuhan kendaraan pengangkut sampah adalah untuk setiap 2.000 rumah diperlukan 1 buah *dump truck*, sehingga dengan perioritas

pelayanan 7.955 rumah diperlukan 4 buah *dump truck*. Kondisi eksisting *dump truck* saat ini berjumlah 2 buah, sehingga saat ini baru mencapai 50 %.

Adapun hasil prosentase penyediaan peralatan persampahan dan jumlah tenaga kebersihan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.8 berikut:

TABEL IV. 24
ANALISIS JUMLAH PERSONIL DAN PERALATAN
PENGELOLAAN SAMPAH

NO	PERSONIL DAN JENIS PERALATAN	KONDISI EKSISTING	IDEAL (HASIL ANALISIS)	PROSENTASE
1	Tenaga pengumpul sampah	4	63	6,3
2	Tenaga pengangkutan, TPA	14	32	43,75
3	Alat Pengumpul (becak sampah)	7	63	11
4	Alat Pengangkutan (<i>arm roll truck</i>)	1	4	25
5	Kontainer	4	12	33
6	<i>Dump truck</i>	2	4	50

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan jumlah peralatan dan jumlah tenaga yang menangani masalah persampahan masih sangat kurang. Hal ini yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah sehingga sampah yang terangkut juga masih rendah.

2. Jenis Tempat Pembuangan Sementara

Jenis TPS yang tidak memadai akan mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah terutama dalam pengangkutan sampah. Secara umum TPS yang ada di Kota Gombong sebagian besar terbuat dari pasangan batu bata seperti yang ada di Jalan Puring, Jalan Sempor dan Jalan Karangbolong. Menurut Hartono (2002), TPS jenis batu bata ini sebenarnya sudah tidak dianjurkan lagi. Dari hasil pengamatan, waktu pengambilan sampah dari TPS jenis ini ke dalam *dump truck*

membutuhkan waktu yang lama serta jumlah petugas yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap ritasi juga menjadi lebih lama sehingga jumlah ritasi pengangkutan setiap harinya menjadi lebih sedikit.

Penggunaan sistem kontainer mempunyai lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan TPS pasangan batu bata karena lebih mudah dalam operasional pengangkutan sampah. Oleh karena itu, penggunaan TPS pasangan batu bata seperti pada gambar 4.5, seharusnya tidak digunakan lagi dan diganti dengan sistem kontainer.



Sumber : Foto September 2006

GAMBAR 4.5
KONDISI TPS DARI PASANGAN BATU BATA

3. Sistem Pengumpulan Sampah

Sistem Pengumpulan sampah saat ini belum mempunyai petugas yang tetap. Dari wawancara dengan petugas pengumpulan sampah yang ada di daerah permukiman, sebagian besar mereka melakukan pengumpulan sampah hanya sebagai pekerjaan sambilan di luar jam kerja. Tugas mereka sebenarnya adalah petugas pengangkut sampah dengan kendaraan *dump truck* maupun *arm roll truck*. Dari kondisi tersebut, maka petugas pengumpul sampah dari pemerintah yang khusus menangani sampah dari permukiman belum ada.

Disamping itu, jumlah peralatan pengumpulan sampah yang hanya 7 buah becak sampah, sangat tidak memadai sehingga jangkauan pelayanan sampah menjadi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan sampah tidak seluruhnya dapat terangkut TPA Semali.

4. Sistem Pengangkutan Sampah

Sistem pengangkutan sampah yang diterapkan di Kota Gombong belum menerapkan sistem yang baku, terutama pada penggunaan kendaraan *dump truck* yang melayani pengangkutan sampah dari transfer depo maupun TPS batu bata. Dari hasil pengamatan dilapangan, disamping mengangkut sampah dari Transfer depo/TPS, kendaraan pengangkut sampah (*dump truck*) juga masih mengangkut secara langsung sampah (*door to door*) dari wadah individual. Selain itu, pada pola pengangkutan sampah menggunakan *dump truck* tersebut, sampah dari dalam TPS pasangan batu bata diangkut ke dalam *dump truck* secara manual sehingga membutuhkan tenaga yang banyak serta operasionalnya lebih lama. Kondisi di atas menyebabkan jumlah ritasi per hari setiap kendaraan *dump truck* menjadi terbatas.

Sampai saat ini kegiatan pengangkutan sampah menggunakan 2 buah *dump truck* yang masing-masing memiliki lebih dari satu rute pengangkutan. Hal ini dikarenakan banyak TPS yang dilayani setiap 3-4 hari sekali. Dari kondisi eksisting yang ada, waktu tempuh kendaraan pengangkut sampah dari TPS-TPS yang ada menuju ke TPA Semali dengan jarak ± 10 km membutuhkan waktu tempuh kurang lebih 5 jam setiap ritasi. Dari hasil observasi, setiap *dump truck* hanya beroperasi 1 ritasi per hari atau setiap hari dengan waktu kerja *dump truck*

dari pukul 07.30 WIB s/d 12.00 WIB, sehingga masih ada waktu yang tersisa selama 2 jam karena jam kerja sampai dengan pukul 14.00 WIB. Menurut SNI T-13-1990-F, sebenarnya setiap dump truck dapat beroperasi 2–3 rit/hari.

Melihat kondisi tersebut, sebenarnya masih dapat dilakukan pengaturan pola pengangkutan sehingga setiap *dump truck* dapat beroperasi 2-3 ritasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jangkauan pelayanan, penambahan TPS dan frekuensi pengangkutan sehingga pengangkutan dengan menggunakan *dump truck* lebih efisien dan efektif.

Pola pengangkutan sampah dengan *arm roll truck* menggunakan rute tetap, yaitu kontainer yang ada di pasar Wonokriyo diangkut setiap hari, sedangkan kontainer yang ada di jalan Kartini, Jalan Yos Sudarso Timur maupun Komplek TNI diangkut setiap 3 atau 4 hari sekali. Hal ini menunjukkan pengangkutan sampah dengan *arm roll truck* belum maksimal karena hanya mengangkut rata-rata 2 kontainer setiap hari, padahal setiap *arm roll truck* sebenarnya mampu melayani 3 – 4 kontainer setiap hari.

Disamping itu, pola pengangkutan kontainer yang digunakan adalah pola pengangkutan cara I, dimana kendaraan *arm roll truck* berangkat kosong tanpa kontainer untuk mengambil kontainer dari lokasi pertama langsung kembali ke lokasi pertama untuk mengembalikan kontainer kosong dan selanjutnya mengambil kontainer dari lokasi kedua untuk dibawa ke TPA. Dengan melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan keberadaan kendaraan *Arm roll truck* kurang optimal, karena membutuhkan waktu untuk menuju kontainer satu ke kontainer berikutnya.

Dari kondisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah kendaraan pengangkutan sampah yang terbatas hanya 2 *dump truck* dan 1 *arm roll truck* menyebabkan jangkauan pelayanan pengangkutan maupun penduduk yang terlayani sangat terbatas dan tidak merata, sehingga berakibat pada rendahnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA Semali.

5. Kondisi Kebersihan TPS/Kontainer

Kondisi kebersihan TPS/Kontainer yang kurang bersih akan mempengaruhi kinerja pengangkutan sampah. Dari pengamatan lapangan masih dijumpai kondisi TPS atau Kontainer yang kurang bersih, yang ditunjukan dengan masih banyaknya sampah yang berserakan diluar kontainer. Hal ini disebabkan oleh masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga sampah tidak dimasukan ke dalam kontainer tetapi hanya di letakan diluar kontainer.

Dengan kondisi seperti ini, kontainer tidak dapat langsung diangkat dan akan membutuhkan waktu angkat lebih lama karena petugas harus terlebih dahulu membersihkan sekaligus memasukan sampah ke kontainer. Hal ini menyebabkan waktu pengangkutan sampah menggunakan *arm roll truck* maupun *dump truck* menjadi lebih lama sehingga kurang efisien. Kondisi kebersihan di TPS atau kontainer dapat dilihat pada 4.6 berikut.



Sumber : Foto September 2006

GAMBAR 4.6
KONDISI KEBERSIHAN LANDASAN DAN KONTAINER

4.5.2. Aspek Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, dengan bentuk UPT Dinas Kimprasda Wilayah Gombong sebenarnya untuk kota kecil atau sedang sudah tepat sesuai dengan SK SNI T-13-1990-F. Namun dengan bentuk UPT tersebut, tidak hanya memiliki tugas di bidang penanganan sampah saja, tetapi juga menangani bidang lain seperti jalan. Hal ini menunjukkan besarnya beban tugas yang harus diemban oleh UPT tersebut.

Dari hasil penilaian kinerja pengelolaan sampah secara kuantitatif telah disimpulkan bahwa jumlah sampah yang terangkut masih rendah dan jangkauan pelayanan sampah masih sangat terbatas. Selain itu, dari hasil kinerja secara kualitatif berdasarkan persepsi masyarakat, hasilnya sebagian besar juga kurang baik. Kondisi demikian dapat disebabkan oleh jumlah personil yang terbatas.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah seluruh tenaga pengumpul sampah yang hanya 4 orang dan tenaga pengangkutan sebanyak 14 orang. Jumlah ini masih sangat jauh dari mencukupi dibandingkan dengan kondisi ideal yaitu untuk tenaga pengumpulan sebanyak 63 orang dan pengangkutan sebanyak 32 orang. Dengan

demikian jumlah personil yang terbatas menyebabkan jangkauan pelayanan sampah menjadi kurang luas.

Disamping jumlah personil yang terbatas, adanya petugas pengangkutan yang merangkap menjadi petugas pengumpulan sampah menunjukkan masih belum adanya pembagian tugas yang jelas kepada personil pengelolaan sampah.

4.5.3. Aspek Pembiayaan

Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil kinerja adalah dari aspek pembiayaan. Dari hasil wawancara dengan petugas kebersihan, tidak maksimalnya pola pengangkutan sampah dengan *dump truck* maupun *arm roll truck* adalah karena masih minimnya pembiayaan yang disediakan untuk operasional kendaraan tersebut, sehingga tidak dapat meningkatkan jangkauan pelayanan dengan menambah ritasi. Selain itu, rendahnya kinerja pengelolaan sampah disebabkan oleh belum tersedianya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan seperti gerobak sampah, kontainer maupun *arm roll truck* sesuai dengan jangkauan pelayanan sampah.

Kondisi pemasukan dari retribusi yang ada saat ini sangat tidak seimbang dibandingkan dengan biaya operasional kendaraan. Biaya retribusi yang diperoleh setiap bulan sekitar Rp. 1.450.000,-, tidak sebanding dengan biaya operasional pengelolaan sampah dan gaji tenaga lapangan yang mencapai sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulan. Hal ini menyebabkan dalam operasional pengelolaan sampah tetap mengandalkan pada subsidi dari Pemerintah.

Dari hasil penelitian, saat ini masyarakat membayar retribusi atau iuran kebersihan antara Rp 2.000,- sampai dengan Rp. 12.000,-. Disamping ada juga

yang langsung membayar retribusi bersama dengan rekening listrik sebesar Rp. 300,- per bulan. Dengan besarnya retribusi sampah yaitu untuk rumah tinggal Type R1 sebesar Rp 300,- dan untuk rumah tinggal Type R2 sebesar Rp 750,-, saat ini sudah tidak relevan lagi apabila dibandingkan dengan tingkat penghasilan masyarakat di Kota Gombong yang sebagian besar mencapai Rp. 500.000,- Rp 2.000.000,- (hasil kuesioner). Menurut Ditjen Cipta Karya (1993), besarnya retribusi idealnya adalah 0,5 - 1 % dari penghasilan masyarakat. Apabila diasumsikan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.000.000,- maka minimal besarnya retribusi adalah sebesar Rp. 500,- s/d Rp 1.000,-. Disamping itu dari hasil wawancara dengan masyarakat sebagian besar tidak merasa keberatan dengan besarnya retribusi yang berlaku saat ini.

Gaji/penghasilan petugas kebersihan yang sebagian besar Tenaga Harian Lepas sebesar Rp 465.000,- untuk saat ini tergolong rendah. Hal juga mempengaruhi kinerja personil pengelolaan sampah, karena dengan gaji yang lebih tinggi diharapkan kinerja personil menjadi lebih baik.

4.5.4. Aspek Peran Serta Masyarakat

Masih rendahnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Gombong. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah yang dibuang ke sungai maupun lahan kosong, padahal sudah tersedia TPS atau kontainer.

Disamping itu dari pengamatan dilapangan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak ke dalam kontainer tapi justru di luar kontainer, sehingga menjadi beban petugas kebersihan pada saat proses pengangkutan

sampah ke TPA. Ini menunjukkan masyarakat belum sepenuhnya mendukung kegiatan pengelolaan sampah.

Dari hasil wawancara dengan Bidang Kebersihan dan Pertamanan maupun masyarakat sekitar, untuk kegiatan pengumpulan sampah dari kawasan permukiman sebenarnya sebagian masyarakat telah turut berpartisipasi dalam melakukan pengumpulan sampah sehingga dapat meringankan beban pemerintah dalam menyediakan alat pengumpulan sampah.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, pola pengumpulan sampah tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti di Kelurahan Wonokriyo, Desa Semanding dan Desa Selokerto. Pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masyarakat selanjutnya di tampung ke dalam TPS yang ada, namun dari hasil pengamatan di lapangan masih ada yang membuang sampah langsung ke tanggul sungai, seperti dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut.



Sumber : Foto September, 2006

GAMBAR 4.7
PEMBUANGAN SAMPAH DI LAHAN KOSONG DAN TANGGUL
SUNGAI

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut, dapat disebabkan karena pengetahuan terhadap pola pengelolaan sampah masih

rendah, maupun kurangnya penyuluhan tentang masalah persampahan. Hal ini seperti ditunjukkan sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat yang sebagian besar menyatakan belum pernah mendapatkan penyuluhan kebersihan baik oleh pihak pemerintah maupun Desa/Kelurahan.

4.5.5. Aspek Hukum

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah adalah aspek hukum. Perangkat hukum pengelolaan sampah di Kota Gombong adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19 tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan, pasal 16 ayat b yang berbunyi *“Untuk menjaga kebersihan dilarang membuang sampah atau barang-barang di jalan-jalan umum, tempat umum, saluran umum, sungai atau halaman orang lain”*. Dengan adanya perda tersebut, payung hukum pengelolaan sampah di Kota Gombong sebenarnya sudah tersedia.

Namun apabila melihat dari permasalahan di lapangan, masih banyaknya sampah yang tidak terangkut ke TPA, yang disebabkan oleh adanya pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya seperti ke tanggul sungai maupun pekarangan kosong, menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap para pelanggaran Peraturan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelaku pelanggaran Perda tersebut. Selain itu juga Pemerintah perlu memberikan sosialisasi tentang masalah kebersihan kepada masyarakat. karena dari hasil wawancara dengan masyarakat, umumnya mereka tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

4.5.6. Rangkuman Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.

Dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, maka dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Aspek Teknis

- a. Jumlah sarana pengumpulan sampah masih jauh dari mencukupi.
- b. TPS yang ada sebagian besar terbuat dari Pasangan batu bata sehingga tidak efisien dalam operasional pengumpulan.
- c. Belum adanya petugas pengumpulan sampah yang tetap.
- d. Sistem pengangkutan belum menerapkan sistem yang baku.
- e. Kendaraan pengangkutan hanya beroperasi satu ritasi per hari sehingga masih kurang optimal.
- f. Kondisi TPS yang kurang bersih sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengangkut ke dalam truk.

2. Aspek Kelembagaan

- a. Jumlah personil yang masih terbatas dan belum mencukupi sehingga tidak dapat melayani secara maksimal.
- b. Adanya pembagian tugas masing-masing personil yang belum jelas.
- c. UPT Dinas Kimprasda mempunyai beban tugas yang besar karena tidak hanya menangani persampahan saja, namun juga menangani masalah lain seperti jalan.

3. Aspek Pembiayaan

- a. Masih terbatasnya dana yang disediakan untuk operasional peralatan.

- b. Pemasukan dari retribusi tidak seimbang dengan biaya operasional sehingga harus disubsidi.
- c. Bersarnya retribusi yang terlalu rendah terutama untuk perumahan.
- d. Gaji petugas kebersihan yang rendah.

4. Aspek Peran serta Masyarakat

- a. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah.
- b. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah.

5. Aspek Hukum

- a. Kurangnya penindakan terhadap pelanggar perda kebersihan.
- b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah.

4.6. Analisis Komprehensif Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombong

Penyebaran produksi sampah di Kota Gombong yang mencapai 279 m³/ hari apabila melihat pada kondisi tata ruang kota, maka produksi sampah yang terbesar berada di Kelurahan Wonokriyo dan Kelurahan Gombong. Besarnya produksi sampah ini berasal dari non permukiman seperti fasilitas pasar dan pertokoan, sehingga terdapat produksi sampah yang cukup besar selain dari sampah permukiman di Kelurahan Wonokriyo dan Gombong.

Untuk menangani besarnya produksi sampah yang ada di Kota Gombong diperlukan sarana prasarana yang memadai mulai dari pewadahan, pengumpulan,

pemindahan dan pengangkutan. Sarana prasarana ini, akan menentukan baik buruknya hasil pengelolaan sampah (Ismaria, 1992).

Sarana dan prasarana persampahan yang tidak memadai mempengaruhi hasil kinerja pengelolaan sampah. Demikian pula dengan sarana prasarana yang mempunyai efisiensi tinggi, akan sangat mendukung tercapainya kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong yang lebih baik.

Prioritas pelayanan persampahan di Kota Gombong saat ini sudah sesuai dengan SK SNI T-13-1990-F, yaitu untuk skala prioritas pelayanan utama yaitu pelayanan intensif di jalan protokol, pusat kota, kawasan permukiman tidak teratur dan daerah komersial. Hal ini dapat dilihat dari daerah pelayanan yang ada saat ini yang meliputi 6 Desa/Kelurahan, merupakan pusat kota dan daerah yang dilewati oleh jalan protokol serta sebagai daerah komersial. Namun demikian, dari hasil analisis jangkauan pelayanan sampah, terdapat 17 Desa/Kelurahan yang prioritas mendapatkan pelayanan sampah, sehingga dengan cakupan pelayanan sampah saat ini yang hanya 6 Desa/Kelurahan masih harus ditingkatkan.

Berdasarkan skala prioritas pelayanan sampah, maka produksi sampah, baik yang berasal dari daerah permukiman dan non permukiman, yang seharusnya dapat terangkut ke TPA adalah $109,43 \text{ m}^3/\text{hari}$. Namun kondisi saat ini, sampah yang dapat terangkut hanya sebesar $40 \text{ m}^3/\text{hari}$ sehingga hasil kinerja pengelolaan sampah yang diukur berdasarkan jumlah sampah yang terangkut adalah sebesar 36,5 %. Selain itu, luas daerah terlayani mencapai 36,20 % dan penduduk terlayani mencapai 30,17 %. Dari prosentase pencapaian tersebut, maka dapat disimpulkan kinerja pengelolaan sampah masih sangat kurang karena masih dibawah 50 % . Hal ini juga sesuai dengan pendapat Nurmandi (1999:193), bahwa

untuk mengetahui kinerja pelayanan dapat dilihat dari seberapa besar output. Semakin besar output berarti semakin besar tingkat kinerjanya. Dari hasil pencapaian dibawah 40 %, dapat disimpulkan kinerja pengelolaan sampah masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

Kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong berdasarkan persepsi masyarakat, menunjukan sebagian besar variabel dinilai masih kurang baik. Variabel tersebut yaitu kebersihan drainase, kebersihan di lingkungan pasar dan pertokoan, kebersihan TPS/Kontainer, kondisi TPS, jumlah TPS, waktu pengumpulan, jumlah alat pengumpul, frekuensi pengangkutan, jumlah petugas kebersihan dan tanggapan terhadap keluhan. Dengan kondisi tersebut, menunjukan masyarakat masih kurang puas dengan kinerja pengelolaan sampah karena belum sesuai dengan harapan. Disamping itu, dapat disimpulkan juga bahwa dengan jumlah personil, peralatan dan pembiayaan yang ada saat ini, belum dapat melayani daerah pelayanan sampah di 6 Desa/Kelurahan, secara optimal.

Variabel yang menurut persepsi masyarakat sudah cukup baik, yaitu untuk kondisi kebersihan jalan, penempatan TPS, kondisi alat pengumpul, kondisi alat pengangkutan dan kualitas petugas kebersihan. Dengan kondisi di atas, menunjukan masyarakat sudah cukup puas dengan kinerja penyapuan jalan yang dilakukan oleh petugas penyapuan jalan yang berjumlah 4 orang. Hal ini juga sesuai dengan pendapat masyarakat yang menyatakan kualitas petugas kebersihan cukup terampil. Disamping itu, masyarakat juga merasa cukup puas dengan penempatan TPS, kondisi alat pengumpul dan pengangkutan sampah. Penempatan TPS yang cukup tepat, dapat mempermudah dan mempercepat proses selanjutnya

yaitu pengangkutan sampah. Dengan kondisi alat pengumpul dan pengangkutan yang cukup baik, maka proses pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tidak terganggu oleh kondisi peralatan.

Menurut Mulyadi (2006:118), pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata dengan hasil yang diharapkan. Menurut Nurmandi (1999:193), efektifitas memfokuskan pada tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan, yang salah satu ukurannya adalah derajat kepuasan masyarakat. Jadi apabila masyarakat merasa puas atau sudah merasa sesuai harapan, terhadap hasil pengelolaan sampah, berarti pengelolaan sampah tersebut berjalan efektif. Dengan melihat hasil kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong yang sebagian besar masih kurang baik, menunjukkan hasil kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Dari hasil kinerja berdasarkan standar normatif maupun berdasarkan persepsi masyarakat, yang menunjukkan hasil kurang baik atau belum sepenuhnya sesuai harapan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Gombong saat ini kurang efektif. Hasil kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong dipengaruhi oleh 5 aspek yaitu aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pendapat Ismaria (1992) bahwa salah faktor penentu baik buruknya operasional pengelolaan sampah adalah metode operasional yang dipengaruhi oleh komponen operasinya seperti kendaraan, tenaga operasional dan faktor eksternal lainnya.

Kaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah dapat dilihat pada gambar 4.8 Pohon masalah kinerja pengelolaan sampah.

Dari gambar diagram tersebut, yang menjadi masalah utama rendahnya kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong adalah kurang optimalnya sistem pengelolaan sampah.

Dari sisi pembiayaan, pemasukan dari retribusi yang rendah menyebabkan pemerintah harus memberikan subsidi untuk operasional pengelolaan sampah. Keterbatasan dari sisi biaya tersebut juga berpengaruh terhadap operasional kendaraan sehingga jumlah ritasi pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi terbatas yang berdampak pula jangkauan pelayanan sampah yang terbatas. Hal ini juga berakibat pada rendahnya jumlah sampah yang terangkut, luas daerah terlayani dan penduduk terlayani.

Kondisi sarana prasarana yang masih kurang memadai, menyebabkan operasional kendaraan menjadi kurang efektif. Ini juga berakibat pada jumlah ritasi yang terbatas dan sistem pengangkutan yang tidak optimal. Disamping itu, jumlah ritasi yang terbatas dan masih adanya masyarakat yang membuang sampah di luar TPS menyebabkan kondisi TPS menjadi kurang bersih.

Jumlah personil pengelolaan sampah yang kurang mencukupi, menyebabkan pembagian tugas menjadi belum jelas, seperti adanya petugas pengangkutan yang merangkap sebagai petugas pengumpulan sampah. Jumlah personil yang terbatas pada akhirnya akan berdampak pada jangkauan pelayanan sampah terbatas sehingga jumlah sampah yang terangkut juga rendah. Disamping itu dengan gaji yang rendah menyebabkan petugas kebersihan masih mencari penghasilan tambahan di luar jam kerja seperti sebagai petugas pengumpul sampah.

Kurangnya penyuluhan tentang kebersihan maupun peraturan daerah tentang kebersihan, serta kurangnya penindakan kepada pelanggar peraturan daerah, menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Gombong. Ini berakibat pada banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke sungai maupun saluran serta kondisi TPS yang kurang bersih sehingga menyebabkan pula pada rendahnya jumlah sampah yang terangkut ke TPA.

Faktor-faktor penyebab di atas, pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, yang ditunjukan dengan hasil pengelolaan sampah yang belum sesuai harapan atau sebagian besar menunjukan hasil kurang baik sesuai dengan persepsi masyarakat. Hal ini menunjukan pula bahwa kinerja pengelolaan sampah belum efektif.

Adapun diagram alir analisis komprehensif kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong, dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut.

BAB. V

PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini baik temuan dilapangan maupun hasil analisis yang telah dilakukan. Disamping itu, dalam bab ini akan disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan persampahan serta sebagai masukan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sampah di kota Gombong pada masa yang akan datang. Selain itu karena keterbatasan dalam studi ini maka disampaikan mengenai usulan tema penelitian lanjutan.

5.1 Kesimpulan

Produksi sampah di Kota Gombong berdasarkan jumlah penduduk mencapai 269 m³/hari yang berasal dari 29 Desa/Kelurahan dan yang berasal dari non permukiman sebesar 10 m³/hari. Dari 29 Desa/Kelurahan tersebut, yang perlu mendapatkan prioritas jangkauan pelayanan sampah mencapai 17 Desa Kelurahan, dengan jumlah sampah yang seharusnya terangkut atau terlayani sebesar 109,43 m³/hari. Jumlah timbulan sampah yang dapat terangkut saat ini hanya sebesar 40 m³/hari sehingga kinerja pengelolaan sampah mencapai 36,5 %, sedangkan luas daerah terlayani mencapai 36,20 % dan penduduk terlayani mencapai 30,17 %. Dengan kondisi tersebut maka kinerja pengelolaan sampah masih sangat kurang atau kurang efektif.

Sarana dan prasarana persampahan yang ada di Kota Gombong saat ini, untuk sistem pewadahan yang dapat mendukung kinerja adalah tong (Bin). Sedangkan untuk sarana pengumpulan sampah, penggunaan becak sampah lebih efisien dibandingkan dengan gerobak sampah. Penggunaan kontainer sebagai sarana pemindahan lebih tepat dibandingkan dengan TPS batu bata karena mempunyai banyak kelebihan. Untuk sistem pengangkutan sampah, *arm roll truck* lebih efisien dibandingkan dengan dump truck. Kondisi sarana dan prasarana persampahan yang ada saat ini dinilai masih kurang memadai seperti penggunaan bak sampah batu bata dan TPS batu bata, yang sudah tidak dianjurkan lagi sehingga menyebabkan pengelolaan sampah menjadi kurang efisien. Penggunaan sarana prasarana yang mempunyai efektifitas tinggi, dapat meningkatkan kinerja pengelolaan sampah.

Hasil kinerja pengelolaan sampah berdasarkan persepsi masyarakat, sebagian besar dinilai oleh masyarakat masih kurang baik sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kepuasan atau harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan efektif.

Hasil kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong dipengaruhi oleh aspek yaitu teknis, kelembagaan, pembiayaan, hukum dan peran serta masyarakat. Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah adalah:

- Jumlah personil dan sarana prasarana masih sangat terbatas, pola pengangkutan masih belum memadai.
- Masih kurang jelasnya pembagian tugas terutama pada sistem pengumpulan dan pengangkutan, beban tugas UPT yang tidak hanya menangani persampahan saja.

- Masih terbatasnya sumber pembiayaan dari retribusi sehingga masih harus mendapatkan subsidi. Disamping itu biaya operasional yang disediakan masih sangat terbatas.
- Masyarakat belum sepenuhnya mendukung pengelolaan sampah.
- Masih kurangnya penindakan terhadap pelanggaran peraturan tentang persampahan
- Masih kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah.

Dari faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kinerja pengelolaan sampah di kota Gombong disebabkan oleh kurang optimalnya sistem pengelolaan sampah.

5.2 Rekomendasi

Melihat hasil kesimpulan seperti di atas, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah maupun masyarakat, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah :

- a. Jangkauan pelayanan sampah perlu ditambah mengingat beberapa desa sudah membutuhkan pelayanan sampah.
- b. Untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan sampah baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, maka pemerintah perlu menambah personil maupun sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti *arm roll truck* dan kontainer sampah
- c. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, maka Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah, karena pemasukan dari penarikan retribusi saat

ini belum dapat diandalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pula penyesuaian tarif maupun mekanisme penarikan retribusi sampah kepada masyarakat.

- d. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Kota Gombong, Pemerintah perlu mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah misalnya pada proses pengumpulan sampah.
- e. Perlunya sistem pengelolaan sampah yang tepat untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi baik melalui perubahan pola pengumpulan maupun pengangkutan sampah, serta mengganti sarana persampahan yang dapat mengurangi efisiensi, seperti penggunaan TPS batu bata yang sebagian besar ada di Kota Gombong dan diganti dengan sistem kontainer.
- f. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap pengelolaan persampahan.
- g. Pemerintah perlu mengembangkan pola pengelolaan sampah dengan konsep 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk menangani produksi sampah yang cukup besar di Kota Gombong.

2. Bagi masyarakat :

- a. Masyarakat perlu mendukung program pengelolaan sampah di Kota Gombong dengan meningkatkan kesadaran dalam membuang sampah sesuai dengan aturan yang berlaku, meningkatkan kesadaran dalam membayar retribusi sampah maupun menerapkan pola pengelolaan sampah dengan konsep 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

- b. Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengumpulan sampah seperti penyediaan sarana pengumpulan sampah (becak sampah) maupun tenaga pengumpulan, mengingat masih adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah.

5.3 Usulan Tema Penelitian Lanjutan

Dari hasil penelitian ini masih perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam, hal ini mengingat penelitian ini dilakukan dengan berbagai keterbatasan baik waktu maupun minimnya materi yang bersifat teori maupun data yang berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, maka dari penelitian ini perlu diusulkan tema penelitian lanjutan yang mengarah pada penelitian yang lebih mendalam, antara lain:

1. Penelitian mengenai mekanisme penarikan retribusi sampah dan kemampuan masyarakat membayar sampah.
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Gombong.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Azwar, Azrul, 1990, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Boedoyo.1986, *Psikologi Manusia Dengan Lingkungan*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Daldjoeni, N., 1997, Geografi Baru, *Organisasi Keruangan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Alumni.
- Faisal, 2005, *Format-format penelitian sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gulo, W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta.
- Hadiwiyoto, Soewedo, 1983, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Hartono, I, Gusniani, 2000, *Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan*. Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Kodoatie, Robert J., 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muljadi, 2006, *Manajemen Strategik (Perencanaan dan Manajemen Kinerja)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Nazir, Moh. 1988, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nurmandi, Achmad, 1999, *Manajemen Perkotaan*, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta.
- Nuryani S, dkk (2003). *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, UGM Yogyakarta.
- Prawirosentono, Suyadi (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan*. BPPE Yogyakarta
- Rahmat, Jalaludi, 1996, *Psikologi Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

- Riduwan, 2002, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Simamora, Bilson, 2004, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sinulingga, Budi D, 1999, *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sudjarwo, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung
- Sugiarto, et. Al, 2001, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sudjarwo, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung
- Sugiarto, et. Al, 2001, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tchobanoglous, H.H, Theisen & S.A. Vigil, 1993, *Integrated Solid Waste Management*, McGraw-Hill International Edition, New York.
- Umar, Husein, 2003, *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Wojowasito.1992, *Kamus Lengkap Praktis Inggris-Indoesia dan Indonesia – Inggris*. Jakarta.
- Widyatmoko, Sintorini, 2002, *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*, Abadi Tandur, Jakarta.

SKRIPSI/TESIS

- Dewanto LA, 2003, *Studi Persepsi Penghuni Terhadap Ketersediaan Ruang Terbuka Publik di Perumahan Kota Wisata Cibubur*, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah, UNDIP, Semarang.
- Hartingtyas EP, 2005, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Pelayanan Fasilitas Pasar, Studi Kasus Pasar Kutoarjo Kabupaten Purworejo*, Tugas Akhir, Jurusan Perencanaan Wilayah, UNDIP, Semarang.
- Haryono, 2002, *Kinerja Pelayanan Persampahan di Kota Yogyakarta*, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP, Semarang.
- Irman, 2004, *Peran Serata Masyarakat Dalam Teknik Operasional Sampah di Kota Padang*, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP, Semarang.

Waluyo, D, 2003, *Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Kebumen*, Magister Teknik Lingkungan ITS Surabaya.

MAKALAH DALAM SEMINAR

Moersid, Muhammad M, 2004, *Konsep National Action Plan Pengelolaan Sampah dalam rangka Millenium Development Goals* , Makalah Seminar Kajian Pengelolaan Sampah secara Terintegrasi, 26 Februari 2004.

Syafrudin 2001, *Pengelolaan Limbah Padat Perkotaan (Sampah)*, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Undip, Semarang .

TERBITAN TERBATAS

Ismaria, 1992, *Prinsip Dasar Pengukuran Efektifitas Sistem Pengelolaan Sampah*, ITB Bandung.

Nasrullah, 2001, *Pengelolaan Limbah Padat*, Diktat Kuliah Persampahan, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Undip, Semarang.

Syafrudin 2006, *Buku ajar Pengelolaan Limbah Padat (Sampah) Perkotaan*, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Undip, Semarang .

Modul Pelatihan Manajemen Persampahan, Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 1993.

Studi Analisis Penentuan lokasi TPA Kota Gombong, Dinas Cipta Karya Propinsi Dati I Jawa Tengah, 1997

Tata Cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan: SK SNI-T 13-1990-F, Yayasan LPMB Bandung, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta

Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman: SK SNI-T 12-1994-03, Yayasan LPMB Bandung, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta

Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia : SK SNI-S 04-1993-03, Yayasan LPMB Bandung, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta

Rencana Umum Tata Ruang Kota Gombong 1996/1997-2016/2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 19 Tahun 1993 Tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan di Kabupaten Kebumen. 1993

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan. 1996

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 30 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Kebumen. 2004.

BUKU DATA/LAPORAN

Kecamatan Gombong Dalam Angka, 2005, Kantor Kecamatan Gombong

Kecamatan Sempor Dalam Angka, 2005, Kantor Kecamatan Sempor

Kecamatan Kuwarasan Dalam Angka, 2005, Kantor Kecamatan Kuwarasan

Kecamatan Buayan Dalam Angka, 2005, Kantor Kecamatan Buayan

Kecamatan Rowokele Dalam Angka, 2005, Kantor Kecamatan Rowokele,

Kecamatan Karanganyar Dalam Angka, 2005, Kantor Kecamatan Karanganyar,